



UNIVERSITAS INDONESIA

***CONTAINER SECURITY INITIATIVE SEBAGAI
ECONOMIC STATECRAFT DALAM GLOBAL WAR ON
TERRORISM AMERIKA SERIKAT***

TESIS

**TOTON HARTANTO
1006743802**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI KAJIAN TERORISME
DALAM KEAMANAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

***CONTAINER SECURITY INITIATIVE SEBAGAI
ECONOMIC STATECRAFT DALAM GLOBAL WAR ON
TERRORISM AMERIKA SERIKAT***

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
pada Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional**

**TOTON HARTANTO
1006743802**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI KAJIAN TERORISME
DALAM KEAMANAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Toton Hartanto

NPM : 1006743802

Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Juni 2012



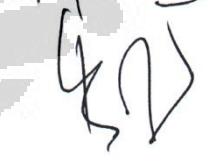

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Toton Hartanto
NPM : 1006743802
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional
Judul Tesis : *Container Security Initiative* sebagai *Economic Statecraft*
dalam *Global War on Terrorism* Amerika Serikat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Andi Widjajanto, M.Sc., M.S. ()
Sekretaris : Asra Virgianita, M.A. ()
Pembimbing : Broto Wardoyo, M.A. ()
Penguji Ahli : Dr. Hariyadi Wirawan, M.Soc.Sc. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Tersungkur dalam sujud syukur, tertunduk malu atas semua kealpaan diri dihadapan-Mu Yaa Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, *alhamdulillah* dalam kehinaan ini, Engkau masih berikan ayunan pertolongan terindah-Mu sehingga tesis ini terselesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister Sains (M.Si.) pada Universitas Indonesia. Selanjutnya dengan penuh kesadaran diri, bahwa penyelesaian tesis ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, untuk itu perkenankan pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Broto Wardoyo, M.A., dosen pembimbing penulis yang dengan penuh pengertian membantu memberikan pemaknaan yang mencerahkan penulis sehingga tesis ini lebih bernilai;
- (2) Dr. Hariyadi Wirawan, M.Soc.Sc, penguji ahli dalam sidang tesis penulis, yang telah memberikan penguatan materi dan masukan yang membangun sehingga memotivasi penulis menjadi manusia pembelajar;
- (3) Andi Widjajanto, M.Sc., M.S., ketua sidang tesis, yang memberikan arahan penyajian hasil pengolahan statistik yang menjadikan tesis penulis lebih baik;
- (4) Asra Virgianita, M.A., sekretaris sidang yang telah membantu perbaikan teknis penulisan tesis;
- (5) Makmur Keliat, Ph.D yang telah meminjamkan buku referensi yang sangat bermanfaat bagi penulisan tesis ini, dan para dosen penulis yang dengan penuh dedikasi memberikan pengajaran terbaik dan transfer pengalaman yang menginspirasi;
- (6) Teman-teman kelas KTKI Angkatan 1 yang saling bahu-membahu membangun kecemerlangan kolektif yang kebersamaan ini menjadi salah satu kenangan terindah dalam hidup penulis;
- (7) Buat Pak Udin, Mbak Ice dan semua staf sekretariat program di Salemba yang dengan penuh kesabaran memberikan pelayanan prima sehingga terselesaikannya hal-hal administratif;

- (8) Rekan-rekan penulis di DJBC, yang dengan penuh ketulusan telah bersedia menggantikan tugas-tugas penulis pada saat penulisan tesis ini terlewatkan, dan para senior penulis yang memberikan informasi yang berguna;
- (9) Ayahanda penulis Sardjono (Alm.) dan Ibunda Sumarti, S.Pd., yang tanpa pengasuhan yang terbaiknya dan kasih sayangnya, penulis tidak akan pernah mampu melalui tangga-tangga kehidupan ini;
- (10) Bapak/Ibu Mertua penulis, Ir. H. Iyus Suryanto dan Ani Permani yang senantiasa berdoa selepas sholat malam mereka untuk kebaikan dan kesuksesan penulis;
- (11) Istri tercinta dan sahabat paling setia penulis, Astriani Saputri, SST.Akt., yang senantiasa menemani penulis dalam malam-malam yang melelahkan sehingga tetap menyenangkan hingga detik-detik terakhir penyelesaian tesis ini;
- (12) Hilmiya Wafi Elkayyisa dan Khalila Fatin Elkayyisa, kedua putri penulis yang telah hadir menjadi penyejuk mata dengan keceriaan mereka, selalu menyegarkan suasana jiwa penulis untuk tetap semangat menjalani kehidupan.

Penulis berharap Allah Yang Maha Mendengar, berkenan membalas segala kebaikan mereka dengan mengabulkan semua doa dan permintaan mereka. Akhirnya penulis ingin menyampaikan *wejangan* Eyang penulis “*Memayu Hayuning Bawono, Ambrasto dhur Angkoro*”, dimana tugas kita dalam hidup adalah menciptakan kesejahteraan demi kebahagiaan abadi, menghilangkan ancaman demi keamanan yang sejati. Semoga tesis ini menjadi sumbangsih penulis bagi keluhuran tugas ini.

Jakarta, 27 Juni 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Toton Hartanto
NPM : 1006743802
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

***“Container Security Initiative sebagai Economic Statecraft
dalam Global War on Terrorism Amerika Serikat”***

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Juni 2012

Yang menyatakan



(Toton Hartanto)

ABSTRAK

Nama : Toton Hartanto
Program Studi : Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional
Judul : *Container Security Initiative* sebagai *Economic Statecraft*
dalam *Global War on Terrorism* Amerika Serikat

Tesis ini membahas tentang pengaruh *threat against U.S.* terhadap pilihan instrumen kebijakan luar negeri AS dalam *Global War on Terrorism* (GWOt) dimana salah satunya adalah *Container Security Initiative* (CSI). Analisis dalam tesis ini menggunakan *Economic Statecraft Concept* (Baldwin, 1985) sebagai teori utama. Kajian literatur dalam penelitian ini menemukan adanya *security threat* dan *economic threat* yang mendorong AS memilih CSI sebagai *economic statecraft* dalam kebijakan GWOt. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana dari pengolahan data statistik menggunakan *logistic regression* yang mendapatkan adanya bukti yang membenarkan CSI sebagai *economic statecraft* dan efektifitas CSI sebagai instrumen kontra terorisme AS.

Kata kunci:

Perang Global terhadap Terorisme, *Economic Statecraft*, *Container Security Initiative*, Ancaman

ABSTRACT

Name : Toton Hartanto
Study Program : Terrorism Studies in International Security
Title : Container Security Initiative as Economic Statecraft
in United State of America's Global War on Terrorism

This thesis discusses the impact of the threat against U.S. to choose foreign policy instrument in the Global War on Terrorism (GWOt), in this case is Container Security Initiative (CSI). The analysis in this thesis using Economic Statecraft Concept (Baldwin, 1985) as main theory. Literature review in this study found security threat and economic threat that drives the U.S. choose CSI as economic statecraft in GWOt policy. This study is a quantitative research, in which processing of statistical data using logistic regression found evidence to justify CSI as economic statecraft and effectiveness of CSI as an instrument of U.S. counter-terrorism.

Key Words:

Global War on Terrorism, Economic Statecraft, Container Security Initiative, Threat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR PERSAMAAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	2
1.2.1. Pertanyaan Penelitian.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Signifikansi Penelitian	3
1.5. Tinjauan Pustaka	4
1.6. Kerangka Teori	8
1.7. Hipotesis	27
1.8. Metodologi Penelitian	28
1.9. Sistematika Penulisan	31
2. CONTAINER SECURITY INITIATIVE (CSI) DAN PENGGUNAAN <i>ECONOMIC STATECRAFT</i> DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS.....	33
2.1. Container Security Initiative dan Security Threat.....	34
2.1.1. Pertimbangan Keamanan dan Lingkungan Hukum	35
2.1.2. Operasionalisasi CSI.....	41
2.1.3. Initialization Cost.....	46
2.2. Sanksi Ekonomi dalam Kebijakan Luar Negeri AS	47
2.3. Kebijakan Ekonomi Luar Negeri AS Pasca 9/11	55
3. FAKTOR YANG MENDUKUNG <i>CONTAINER SECURITY</i> SEBAGAI <i>ECONOMIC STATECRAFT</i>	59
3.1. Potensi Ancaman Serangan Terorisme terhadap Perdagangan Internasional	59
3.1.1 Kapabilitas Al Qaeda untuk melakukan Serangan Terhadap Kapal dan Pemanfaatan <i>Container</i>	64
3.1.2 Dukungan Keuangan Al Qaeda.....	67
3.2. Defisit Neraca Perdagangan dan Kebijakan GWT AS	74
3.2.1 Dampak Defisit Neraca Perdagangan dalam Perekonomian AS	75

3.2.2	Kebijakan <i>Non Tarrif Trade Barrier</i> sebagai Pilihan	79
4.	ANALISA TERHADAP HUBUNGAN <i>CONTAINER SECURITY INITIATIVE</i> (CSI) DENGAN <i>THREAT</i>	83
4.1.	Analisa Statistik Deskriptif	83
4.2.	Prediksi Model	84
4.3.	Interpretasi	87
4.4.	Analisa <i>Threat</i> dalam Menjelaskan Pilihan AS terhadap CSI sebagai <i>Economic Statecraft</i>	90
4.5.	Analisa <i>Threat</i> dalam Menjelaskan Pilihan AS terhadap CSI sebagai Kebijakan Luar Negeri AS	94
4.6.	Analisa <i>Threat</i> dalam Menjelaskan Pilihan AS terhadap CSI sebagai Strategi Penanggulangan Terorisme dalam GWOt	96
5.	KESIMPULAN	99
	DAFTAR PUSTAKA	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Model Analisa Sederhana	25
Gambar 2.1. Modernisasi Segel <i>Container</i>	43
Gambar 2.2. Proses Pemeriksaan <i>Container</i> pada CSI.....	45
Gambar 2.3. Sebaran Kapasitas Mesin <i>Gamma-Ray</i> dan <i>X-Ray</i> dalam Proses <i>Container Scanning</i> Pelabuhan.....	46
Gambar 3.1. Rute Pelayaran Perdagangan Internasional.....	62
Gambar 3.2. Peta Perdagangan Kokain	72
Gambar 4.1. <i>Class Plot Model</i>	86
Gambar 4.2. Sebaran CSI <i>Port</i> Antara Belahan Utara-Selatan	92
Gambar 4.3. Tren CSI <i>port</i> dan Presentase <i>Container</i> Diperiksa.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tipologi <i>Statecraft</i> dalam Kebijakan Luar Negeri.....	17
Tabel 1.2. Kategori Tujuan Sanksi.....	18
Tabel 1.3. Kelayakan Sanksi.....	19
Tabel 1.4. Taksonomi Target	20
Tabel 1.5. Tingkat Kelayakan.....	20
Tabel 1.6. <i>Direct Material Impact</i>	20
Tabel 1.7. Tingkat <i>Direct Material Impact</i>	21
Tabel 1.8. Operasionalisasi Konsep.....	25
Tabel 1.9. <i>Kolmogorov-Smirnov Test</i>	29
Tabel 3.1. Estimasi Biaya Serangan Al Qaeda	69
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	84
Tabel 4.2. <i>Likelihood Model</i>	85
Tabel 4.3. <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	85
Tabel 4.4. Uji Wald.....	85
Tabel 4.5. Koefisien dalam Model.....	87

DAFTAR PERSAMAAN

Persamaan 1.1. Model Umum *Logit* 29

$$\text{Logit} (CSI_{ij}) = \beta_i X_j$$

Persamaan 1.2. Model *Logistic Regression* 30

$$\begin{aligned} \text{Ln} \frac{CSI}{1 - CSI} = & \beta_0 + \beta_1 \text{QAE} + \beta_2 \text{INC} + \beta_3 \text{REL} + \beta_4 \text{DIS} \\ & + \beta_5 \text{IMP} + \beta_6 \text{EXP} + \beta_7 \text{BOT} \end{aligned}$$

Persamaan 1.3. Model Ekspensial *Logistic Regression* 30

$$CSI = \frac{1}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 \text{QAE} + \beta_2 \text{INC} + \beta_3 \text{REL} + \beta_4 \text{DIS} + \beta_5 \text{IMP} + \beta_6 \text{EXP} + \beta_7 \text{BOT}}}$$

Persamaan 4.1. Model Penelitian dalam *Logistic Regression* 87

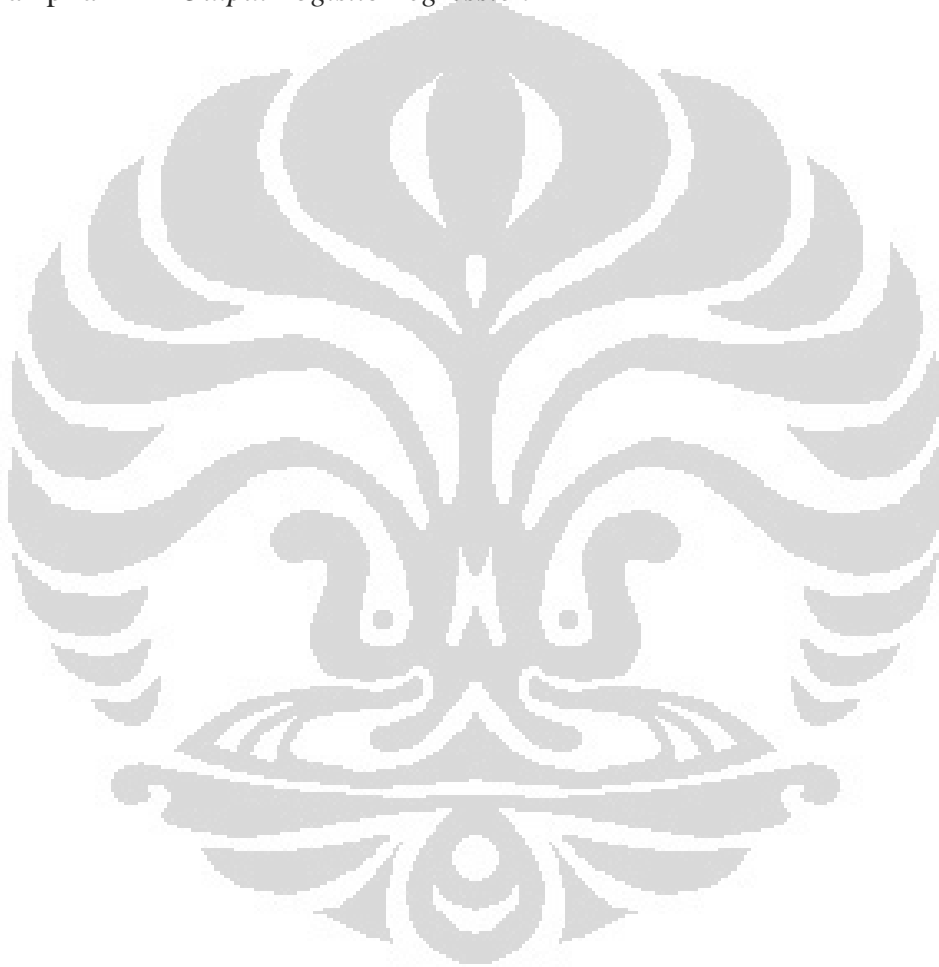
$$\text{Ln} \frac{CSI}{1 - CSI} = 0.908 \text{IMP} - 0.887 \text{EXP} + 0.882 \text{BOT}$$

Persamaan 4.2. Model Penelitian dalam Ekspensial *Logistic Regression* 87

$$CSI = \frac{1}{1 + e^{0.908 \text{IMP} - 0.887 \text{EXP} + 0.882 \text{BOT}}}$$

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Sumber Data
- Lampiran 2 Data Terkait Penelitian
- Lampiran 3 *Output Descriptive Statistics*
- Lampiran 4 *Output Logistic Regression*



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Serangan terorisme ke Amerika Serikat (AS) pada tanggal 11 September 2001 telah menjadi simbol perkembangan baru gerakan terorisme, yang membawa implikasi terhadap perspektif keamanan internasional. PBB pada tanggal 28 September 2001, mengeluarkan Resolusi DK PBB nomor 1373 tahun 2001 yang secara ringkas memuat keharusan (*mandatory obligation*) setiap negara untuk melakukan tindakan yang serius dalam memerangi terorisme internasional. Terlepas dari terorisme telah menjadi ancaman bersama, bobot isi resolusi tersebut, dapat diartikan sebagai wadah bagi kepentingan nasional AS.

Penggunaan pesawat terbang komersial sebagai alat serangan 11 September terhadap gedung WTC, telah mempengaruhi AS untuk meningkatkan kewaspadaannya. Berdasarkan pemikiran para pengambil keputusan keamanan nasional, organisasi teroris semakin bersemangat untuk menghancurkan infrastruktur ekonomi negara sebagai upaya mencapai target politik mereka. Dengan mempertimbangkan hal ini, AS membuat serangkaian kebijakan yang menjamin keamanan nasionalnya terlindungi, termasuk pengamanan obyek vital ekonomi dan politiknya.

Singh (2006) menjelaskan bahwa serangan terorisme 11 September 2001 merupakan pemicu kemunculan kebijakan luar negeri AS yang dikenal sebagai *the Bush Doctrine*. Doktrin tersebut memuat tentang *preventive war*, kontrol terhadap *weapon of mass destruction* dan perang terhadap terorisme, perubahan rejim untuk *rogue states*, dan demokrasi (Singh, 2006, hal. 11).

Salah satu kebijakan luar negeri AS terkait dengan *The Bush Doctrine* adalah serangan militer ke rejim Taliban di Afghanistan. Sebagai pelaksanaan *preemptive war* terhadap jejaring terorisme, dan pergantian rejim. Ini menunjukkan bahwa Bush dalam *Global War on Terrorism* menekankan pada tingkat kekuatan militer, kepemimpinan, fokus pada *rogue states*, dan kebutuhan untuk bertindak *pre-emptive* (Swanson, 2003:120).

Selanjutnya menjadi objek penelitian yang menarik, ketika AS mengeluarkan kebijakan *Container Security Initiative* (CSI), yang diluncurkan pada Januari 2002. CSI merupakan kebijakan ekonomi luar negeri AS untuk tujuan keamanan nasional AS. Sehingga obyek kebijakan ini adalah seluruh peti kemas yang masuk ke AS. Saat ini sekitar 90 persen perdagangan dunia dikapalkan dalam peti kemas (*container*). Setengahnya atau kurang lebih 7 juta peti kemas tersebut dibongkar di berbagai pelabuhan di AS setiap tahunnya (US CBP, 2011, para. 4). Dan kebijakan CSI bertujuan untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk ke AS adalah aman.

Menjadi penting untuk kemudian melakukan suatu penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong AS menggunakan CSI sebagai *economic statecraft* dalam kebijakan GWoT-nya. Selanjutnya penulis juga akan memaparkan tentang mengapa China, yang sering berseberangan baik dalam kebijakan ekonomi maupun politik internasional AS, menandatangani CSI dan memperbolehkan US CBP berkantor di negaranya padahal tuntutan berlaku *reciprocal* tidak disetujui AS, AS hanya memperbolehkan Jepang dan Kanada.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dari paparan latar belakang permasalahan di atas, terdapat sesuatu hal yang menarik yang dapat dijadikan sebagai rumusan permasalahan, yaitu: Kebijakan *Global War on Terrorism* AS yang merupakan kepanjangan *Bush Doctrine* memiliki pendekatan yang lebih merupakan strategi kontra terorisme dengan penggunaan kekuatan militer yang lebih dominan, sehingga keluarnya *Container Security Initiative* (CSI) menjadi objek penelitian menarik karena CSI merupakan kebijakan ekonomi luar negeri AS namun digunakan untuk kepentingan pencapaian politik AS di tingkat internasional.

1.2.1 Pertanyaan Penelitian

Dari pemikiran tersebut di atas maka penelitian ini akan menelaah dan menggambarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Mengapa Amerika Serikat memilih strategi economic statecraft sebagai salah satu instrumen kebijakan GWoT-nya dengan membuat Container Security Initiative (CSI)?

Penelitian tersebut hanya dibatasi pada periode 2001 sebagai tahun dasar pengambilan kebijakan untuk mendapat kerangka analisa yang memadai.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh penjelasan tentang latar belakang dipilihnya strategi *economic statecraft* dengan mengeluarkan CSI sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri AS dalam GWoT. Selain itu juga untuk mendapatkan penjelasan tentang efektifitas CSI dengan mendapatkan faktor penjas tentang perbedaan respon negara target terhadap kebijakan AS ini. Terakhir penelitian ini juga ingin mendapatkan manfaat dan biaya dari menerima atau menolak menandatangani CSI.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang *Container Security Initiative* (CSI) hanya sebatas pada bahasan tentang dampaknya terhadap perdagangan, tanpa ada bahasan tentang CSI sebagai *economic statecraft* dalam kebijakan GWoT AS, yang merupakan alasan dikeluarkannya CSI dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Mengingat bahwa CSI merupakan *positive sanction* dalam *economic statecraft* AS, menarik untuk dilakukan penelitian yang mendalam karena sebelumnya AS menggunakan *negative sanction* seperti embargo.
- b. Menambah penelitian tentang hubungan keterkaitan antara studi kebijakan luar negeri dengan keamanan internasional.

1.5 Tinjauan Pustaka

***Container Security Initiative* (CSI) sebagai Instrumen Kebijakan GWoT**

Container Security Initiative (CSI) merupakan instrumen kebijakan GWoT yang keluar sebelum *Proliferation Security Initiative* (PSI). CSI

sebagai bagian dari kebijakan *maritime security* Amerika Serikat terkait dengan pengamanan terhadap lalu lintas barang dari luar ke dalam Amerika Serikat. Obyek kebijakan CSI adalah seluruh peti kemas yang masuk ke Amerika Serikat. CSI bertujuan untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk ke Amerika Serikat adalah aman. Fakta menunjukkan 90 persen perdagangan dunia dikapalkan dalam peti kemas (*container*) atau sekitar 14 juta peti kemas setiap tahun. Setengahnya, atau kurang lebih 7 juta peti kemas tersebut masuk dan dibongkar di berbagai pelabuhan di AS setiap tahunnya.

Secara teknis, kebijakan CSI dilakukan dengan pemeriksaan terhadap peti kemas yang akan diekspor ke AS dilakukan di pelabuhan muat (*port of origin*) oleh tim dari US Customs and Border Protection (US CBP). Pemeriksaan tersebut mencakup penggunaan sumberdaya intelijen, teknologi informasi, detektor sinar gamma. Selain itu, juga pemanfaatan peti kemas yang memiliki kepekaan terhadap berbagai upaya modifikasi. Pada Juni 2002, AS melakukan diplomasi gencar ke *World Customs Organization* (WCO) sehingga secara aklamasi mengesahkan sebuah resolusi yang dapat dijadikan dasar hukum bagi 161 anggotanya untuk penerapan sistem pemeriksaan peti kemas yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara selain yang diterapkan dalam CSI tersebut.

Berdasarkan data yang dikeluarkan *US CBP Representative* yang dimutakhirkan sampai dengan 18 Juni 2009, berikut negara yang pelabuhannya (*port*) telah mengimplementasikan CSI (DHS, 2009, para. 2):

1. Tahun 2002 : Canada, Belanda dan Prancis (3 Negara)
2. Tahun 2003 : Jerman, Belgia, Singapura, Jepang, Hongkong, Inggris, Italia, Korea Selatan, Swedia, dan Afrika Selatan (10 Negara)
3. Tahun 2004 : Spanyol, Thailand, Malaysia, dan Yunani (4 Negara)
4. Tahun 2005 : China, Taiwan, Uni Emirat Arab, Brazil, Sri Lanka, Argentina, dan Portugis (7 Negara)
5. Tahun 2006 : Oman, Honduras, Republik Dominika, Jamaica, dan Bahamas (5 Negara)

6. Tahun 2007 : Pakistan, Panama, Kolumbia, Israel, dan Mesir (5 Negara).

Gilpin (1981) menjelaskan struktur dan distribusi manfaat akan mencerminkan kepentingan yang dominan dalam sistem. Kepentingan yang dominan tersebut berubah sepanjang waktu, aktor yang akan mendapatkan keuntungan dari perubahan dalam sistem akan berusaha untuk mengubah sistem untuk mendapatkan distribusi yang lebih menguntungkan dengan 2 (dua) sumber perubahan yaitu (Gilpin, 1981, hal.10):

- a. Perubahan distribusi kekuatan internasional, didefinisikan sebagai, kemampuan militer, ekonomi, dan teknologi negara.
- b. Perubahan dalam preferensi domestik (redefinisi dari kepentingan nasional), karena perubahan dalam politik dalam negeri.

Selanjutnya terkait distribusi kekuasaan Gilpin berbeda dengan Waltz, ia berpendapat bipolaritas bukan yang paling stabil - satu sisi mungkin gagal untuk menyeimbangkan terhadap yang lain, keseimbangan antara kedua belah pihak dapat dengan mudah terganggu oleh perubahan kecil, dengan konsekuensi serius, dan ketidakmampuan untuk mengakomodasi masuknya kekuatan baru ke dalam sistem.

Hegemonic Stability Theory menjelaskan bahwa hegemoni sebagai prasyarat untuk munculnya rezim perdagangan liberal (Gilpin, 2002, hal.165-182). Sementara Krasner dan Gilpin menyebutkan bahwa hegemon menggunakan bujukan dan paksaan untuk menciptakan atau mempertahankan pasar terbuka, dengan bukti empiris mereka (Inggris pada abad ke-19 dan AS pada abad ke-20) yang berisi anomali yang tidak mampu menjelaskan bagaimana hubungan antara stabilitas rezim perdagangan dan kekuasaan hegemoni.

Container Security Initiative (CSI) sebagai Strategy Againsts Threat

GWoT sebagai respon Amerika Serikat terhadap ancaman keamanan nasional AS, berdasarkan *Bush Doctrine* perlu dilakukan adanya *preventive war* dan *deterrence* terhadap ancaman itu. Ancaman tersebut adalah ancaman jejaring teroris global yang didukung oleh *rogue state*. Kelompok teroris

tersebut dalam serangan 911 terhadap gedung WTC dengan menggunakan pesawat terbang komersial sebagai alat serangan, sehingga menimbulkan tingkat kerusakan besar dan korban yang sangat banyak. Hal ini telah mempengaruhi Amerika Serikat untuk meningkatkan kewaspadaannya.

Berdasarkan pemikiran para pengambil keputusan keamanan nasional, jejaring teroris global semakin hari semakin bersemangat untuk menghancurkan infrastruktur ekonomi negara sebagai upaya mencapai target politis mereka. Dengan mempertimbangkan hal ini, Amerika Serikat membuat serangkaian kebijakan yang menjamin keamanan nasionalnya terlindungi, termasuk pengamanan obyek vital ekonomi dan politiknya.

Container Security Initiative (CSI) merupakan instrumen kebijakan GWoT yang keluar sebelum *Proliferation Security Initiative* (PSI). CSI sebagai bagian dari kebijakan *maritime security* Amerika Serikat terkait dengan pengamanan terhadap lalu lintas barang dari luar ke dalam Amerika Serikat. *Maritime security* secara umum dimaknai sebagai perpaduan antara *maritime safety* dengan *maritime security* itu sendiri.

Obyek kebijakan CSI adalah seluruh peti kemas yang masuk ke Amerika Serikat. CSI bertujuan untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk ke Amerika Serikat adalah aman. Berdasarkan data U.S. CBP menyebutkan bahwa lebih dari 90 persen perdagangan dunia dikapalkan dalam peti kemas (*container*) atau sekitar 14 juta peti kemas setiap tahun. Setengahnya, atau kurang lebih 7 juta peti kemas tersebut masuk dan dibongkar di berbagai pelabuhan di AS setiap tahunnya.

CSI sebagai instrumen strategi *balancing* Amerika Serikat terhadap ancaman terorisme global, sejalan dengan hipotesis Kenneth Waltz dalam *Theory of International Politics*, dimana teori *Balance of Power* memahami konsep *balancing* sebagai tindakan negara dalam mempertahankan posisinya dalam sistem, bukan meningkatkan kekuatan (Waltz, 1979, hal.126). Lebih lanjut, Schweller menambahkan bahwa tujuan *balancing* merupakan pertahanan diri dan perlindungan nilai-nilai (Randall dan Schweller, 1994, hal.74).

Balancing merupakan strategi negara untuk meningkatkan kapabilitas internalnya untuk mengimbangi ancaman. Dalam *balancing* tidak ada tindakan untuk melawan ancaman. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Stephen M. Walt (1985) bahwa ketika memasuki aliansi, maka negara dapat melakukan *balance* akan menjadi lawan dari sumber ancaman. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa *balancing* digerakkan oleh dorongan untuk menghindari kekalahan/kerugian (Walt, 1985, hal. 4).

Container Security Initiative (CSI) dalam Perdagangan Internasional

Berdasarkan penelitian Mirza dan Verdier (2011, hal.1) menunjukkan adanya suatu hubungan interdependensi antara perdagangan, keamanan dan terorisme global. Dalam penelitian tersebut Mirza dan Daniel juga menyebutkan bahwa berdasarkan analisa statistik dengan pendekatan *gravity model* mendapatkan suatu pola yang menguatkan temuan Laporan Uni Eropa yang menyatakan bahwa CSI telah meningkatkan biaya yang memungkinkan adanya *involuntary trade barrier* berupa biaya ekonomi tambahan dan keterlambatan pengiriman barang yang kemudian menurunkan efisiensi produksi negara (Mirza dan Verdier, 2011, hal. 18).

CSI telah menciptakan *non tariff trade barrier* karena *tariff trade barrier* yang akan berakhir dalam era perdagangan bebas maka CSI akan menjadi *trade barrier* baru. Hanya negara yang memiliki kemampuan keuangan yang besar dan kapasitas negara yang kuat yang mampu *compliance* dengan CSI akan dapat meningkatkan *gain utility*-nya. Sedangkan dalam penelitian Shakurova dan Velea (2011, hal.1) yang menguji hubungan antara *trade flows* dengan *security measures* menyimpulkan bahwa CSI memang menyebabkan peningkatan biaya yang signifikan bagi negara dengan *weak power* namun tidak signifikan bagi negara yang *strong power*.

Shie (2004, hal. 1) dalam penelitiannya tentang respon negara terhadap CSI dan PSI di kawasan asia tenggara memberikan suatu kesimpulan bahwa kecuali Singapura, sebagian besar negara-negara di kawasan tersebut merasa tidak perlu merespon dengan dua alasan yaitu permasalahan kedaulatan dan tidak adanya *trade barrier* yang signifikan ke AS. Berbeda dengan Nigel

Brew yang melakukan penelitian respon Australia terhadap CSI, dimana disebutkan beberapa temuannya bahwa persepsi Australia bahwa CSI tidak akan mampu mencegah terorisme dengan menggunakan sarana prasarana cargo ke AS, kedua Australia menolak CSI karena hanya menguntungkan AS saja (Brew, 2003, para. 1-10).

1.6 Kerangka Teori

Global War on Terrorism yang berkembang menjadi suatu kajian menarik dalam keamanan internasional. Buzan dan Hansen mengajukan pertanyaan apakah aksi terorisme global yang ditandai dengan peristiwa 9/11 telah mengubah kajian keamanan internasional, karena walaupun terdapat perhatian tentang bagaimana peristiwa 9/11 yang mempengaruhi politik internasional serta konsekuensinya terhadap konsep keamanan, serta asumsi-asumsinya tentang rasionalitas aktor terdapat perdebatan tentang polaritas. Buzan dan Hansen memprediksikan bahwa masa depan kajian keamanan internasional akan kembali kepada realisme.

Sebagaimana Elman (2008), realisme memiliki daya tahan yang panjang dalam kajian keamanan, dengan berbagai fasilitas adaptasi (Elman, 2008, hal. 507). Realisme dapat membuat penyesuaian terhadap teori mereka untuk menghindari kontradiksi dengan berbagai anomali empirik, namun hal inilah yang membuat realisme tetap menjadi kontributor sentral terhadap kajian keamanan. Sehingga penggunaan *Economic Statecraft Concept* dan *Foreign Policy Analysis* untuk menjelaskan perilaku aktor dan menafsirkan *power* dalam kebijakan luar negeri yang akan menambah pembuktian benar atau tidaknya prediksi Buzan dan Hansen.

Prespektif Realisme dan Neorealisme terhadap Ancaman Terorisme

Fiala, A. (2002) menjelaskan bahwa tujuan dari *self preservation* dari segala hal yang teratribusi kepada negara, dari perspektif ini maka terorisme harus dianggap sebagai serangan terhadap *political power* yang ditunjukkan dengan menjadikan terorisme sebagai ancaman (*threat*) terhadap *life* dan disisi

yang lain *a no-limits war against terrorism* dianggap sebagai usaha untuk mempertahankan *power* dan kehidupan (Fiala, 2002, hal. 5).

Maka bagi realis, negara harus memandang war on terrorism sebagai bagian dari pertahanan diri dan *power*. Sehingga memberikan label teroris sebagai agen dari sebuah negara menjadi penting karena perang melawan terorisme harus didudukkan pada posisi antara negara dengan negara. Hal ini dijelaskan oleh Masci dan Jost sebagaimana dikutip Fiala, strategi yang hanya berkonsentrasi pada individu dan kelompok akan gagal sebab teroris sangat bergantung pada negara yang mendukungnya. Inilah yang menjelaskan mengapa Amerika Serikat menyerang Afghanistan karena sebagai respon terhadap serangan terorisme kelompok Al Qaeda yang didukung oleh Taliban (Fiala, 2002, hal. 5).

Walau pada dasarnya neorealisme merupakan pengembangan dari pemikiran realisme, pandangan neorealisme cenderung melihat segala sesuatu dari kacamata struktur dan unit-unitnya. Jika bagi realis manusia adalah jahat, maka bisa jadi menurut neorealis yang jahat adalah sistem. Teori neorealisme (realisme struktural) berusaha untuk lebih ilmiah dan lebih positif. Neorealis tetap mempertahankan nilai realis bahwa hubungan internasional antarnegara yang merupakan hubungan antagonistik dan konfliktual yang disebabkan oleh struktur anarkis dalam sistem internasional.

Hal yang membedakan neorealisme dengan realisme dilihat dari aktor yang berperan di dalam sistem internasional. Jika pada realisme aktor yang menjadi kunci utama dalam sistem internasional adalah negara (*state*), maka pada neorealisme aktornya adalah sistem itu sendiri. Sehingga meskipun negara merupakan aktor yang dominan, *non-state actors* memiliki peranan yang penting dalam sistem internasional.

Struktur internasional dalam konsep neorealisme adalah anarki internasional, negara sebagai unit, perbedaan kapabilitas negara serta adanya *super power* lebih dari satu dimana terdapat hubungan antar negara-negara tersebut. Sedangkan konsep kunci dari neo realisme adalah perimbangan kekuatan, pengulangan internasional, dan konflik internasional yang berupa perang dan perubahan sistem internasional.

Neorealis menekankan bahwa anarki dalam hubungan internasional bukan berasal dari *human nature*, yang seperti realis katakan bahwa manusia pada dasarnya jahat. Tetapi neorealis mengatakan strukturlah yang membuat tindakan manusia itu jahat dan anarki. Dalam neorealis anarki dan damai disebabkan oleh struktur yang ada. Jika struktur menunjukkan damai, maka negara berupaya untuk membuat suatu kebijakan baik berupa aliansi atau pun *balance of power* guna sebagai respon terhadap suatu struktur tersebut. Tetapi sebaliknya, jika struktur menunjukkan sebuah perdamaian, maka suatu negara juga akan mengubah kebijakannya.

AS tidak akan mengeluarkan kebijakan GWoT, jika struktur internasional tidak memaksanya, dengan terjadinya serangan terorisme terhadap gedung WTC. Hal ini menunjukkan bahwa struktur internasional tidak aman, dan tidak ada kekuatan di atas kedaulatan negara. Struktur inilah yang mendorong dan memaksa AS mengaplikasikan kebijakan GWOT sebagai respon menghadapi struktur internasional tersebut.

Unilateralisme Kebijakan *Global War on Terrorism* (GWoT) AS

Bush Doctrine memberikan arahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mengubah pendekatannya dari multilateral ke pendekatan unilateral bila diperlukan. Invasi Afghanistan (2002) dan Irak (2003) merefleksikan unilateralisme kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Meski ditolak oleh sekutu-sekutu terdekat, seperti Perancis dan Jerman, dan juga Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat mengabaikannya. Inggris, meskipun bergabung dengan Amerika Serikat dalam invasi ke Irak, dapat belajar cepat dan memahami kemarahan dunia. Terlebih setelah Tony Blair terpilih kembali dan mendapati kenyataan bahwa dirinya dan Partai Buruh mengalami erosi suara yang signifikan. Inggris bersama beberapa negara lain lebih memilih jalan diplomasi dalam menangani nuklir Iran dan Korea Utara, namun AS lebih menyukai cara konfrontasi dengan kedua negara itu.

Unilateralisme AS juga bisa terlihat dari tindakan Amerika Serikat keluar dari keanggotaan Mahkamah Internasional, Perjanjian Non Proliferasi Nuklir (NPT), dan Protokol Kyoto. Belajar dari kasus kejahatan perang

Serbia, Amerika Serikat berusaha melindungi para jenderal perangnya. Dan satu-satunya cara adalah keluar dari Mahkamah Internasional.

Robert Jervis dalam *Understanding the Bush Doctrine* menjelaskan bahwa GWoT menjadi kebijakan luar negeri yang dibuat Amerika Serikat untuk mengendalikan perannya sebagai hegemoni dalam politik internasional. Sebagai kekuatan hegemoni, Amerika Serikat memposisikan diri sebagai kekuatan yang unipolar. Unipolar merupakan kondisi yang kurang stabil karena adanya konsentrasi *power* terlalu besar yang bersifat mengancam kepentingan aktor lain, dimana aktor tersebut memungkinkan untuk melakukan *balancing* (Waltz, 1997, hal. 915–916).

Goldstein (1988) menyatakan jika hegemoni berarti kebiasaan untuk mendikte, mendominasi, mengatur, dan merancang konstelasi dan geopolitik internasional, maka AS bisa dikatakan telah menghegemoni. Dan untuk melanggengkan hegemoni itu, AS memerlukan militer yang kuat. Bush secara tegas menyampaikan hal ini ketika ia berpidato pada pelepasan kadet baru West Point 1 Juni 2002:

Amerika harus bisa memastikan kekuatannya mampu mengatasi berbagai tantangan, meskipun harus merusak stabilitas perlombaan senjata dunia. AS juga harus membatasi kekuatan negara lain meskipun kekuatan itu ditujukan untuk perdamaian.

Dalam konteks sejarah keamanan internasional, penempatan aliansi Barat terhadap Uni Soviet, memainkan peran penting dalam promosi Amerika dalam perdagangan bebas. Meskipun *Bank of England* memainkan peran sentral dalam pengelolaan standar emas, namun sistem moneter abad kesembilan belas umumnya *denationalised*. Pasca Perang Dunia II sistem tersebut didasarkan pada dolar dan tunduk pada pengaruh Amerika.

Amerika Serikat muncul dari Perang Dunia I dengan visi yang jelas dari tatanan internasional baru yang ingin diciptakan. Visi tersebut disebut Rooseveltian, diambil dari nama Franklin Delano Roosevelt, presiden AS. PBB dan khususnya Dewan Keamanan (termasuk lima anggota tetap) akan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan internasional. Selain itu, konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 mengusulkan bahwa konstelasi

lembaga ekonomi baru, IMF, Bank Dunia dan WTO, harus bertanggung jawab untuk promosi dan administrasi ekonomi dunia yang terbuka dan multilateral, Amerika Serikat dan mitra ekonomi membentuk Perjanjian tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) sebagai bentuk negosiasi perdagangan dan bukan sebuah organisasi internasional yang penuh. Tatanan internasional pascaperang adalah didasarkan pada Piagam Atlantik dan isu HAM. Dalam struktur ini, pemenang akan membangun dunia yang damai, sejahtera, dan manusiawi yang telah menghindarkan manusia setelah Perang Dunia I. Pada pergantian abad ini, tidak semua tujuan yang baik itu akan tercapai.

Foreign Policy Analysis

Dalam perspektif Realis, tujuan nasional dalam kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh perilaku internasional, seperti keamanan, kapabilitas militer, aliansi negara, dan *balance of power* (Morgenthau dan Thompson, 1993, hal. 57). Sementara itu Christopher Hill dan Margot Light menyatakan bahwa kebijakan luar negeri sama halnya dengan bola *billiard*, dimana kebijakan luar negeri berada pada posisi sebagai determinan utama (Hill, Christopher dan Light, 1986, hal. 157). Kebijakan luar negeri dalam *Interdependency Theorists* lebih ditekankan pada ekonomi politik internasional, politik domestik dan fluktuasi kepentingan nasional dan strategi diplomasi. Dimana dinamika politik domestik merupakan masalah dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (George, 1980, hal. 114). Definisi kebijakan luar negeri menurut Holsti, adalah gagasan atau tindakan yang dirancang oleh pembuat keputusan suatu Negara untuk menyelesaikan permasalahan maupun mempromosikan sejumlah perubahan, pada perilaku sebuah atau beberapa aktor negara lain maupun non negara; ataupun juga mengubah atau mempertahankan sebuah objek, kondisi atau praktik di lingkungan eksternal (Holsti, 1992, hal. 82).

Maka bila dijabarkan, substansi kebijakan luar negeri suatu Negara dipengaruhi oleh (1) faktor-faktor konteks eksternal yang meliputi: struktur sistem internasional; struktur ekonomi dunia; tujuan dan kebijakan Negara lain; masalah-masalah global dan regional yang ditimbulkan oleh aktivitas

perorangan; serta hukum internasional dan opini dunia (Holsti, 1992, hal. 271-302), (2) faktor-faktor politik domestik, yang meliputi berbagai kebutuhan atau kepentingan sosioekonomi dan keamanan; karakter geografis; atribut nasional; struktur pemerintahan; opini publik; birokrasi; serta pertimbangan etis, (3) pengaruh persepsi dan perilaku para aktor pembuat kebijakan meliputi, citra, perilaku, nilai, doktrin, ideologi, analogi dan bahkan kepribadian.

Rosenau (1969) mengemukakan bahwa situasi dan kondisi lingkungan (internal dan eksternal) saling berinteraksi dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri sebuah negara, sehingga keterkaitan antara aspek nasional dan internasional (internal dan eksternal) digunakan sebagai variabel bebas. Sedangkan, kebijakan luar negeri suatu negara digunakan sebagai variabel terikat (Rosenau, 1987:1). Selanjutnya, Rosenau juga mengemukakan bahwa keterkaitan antara aspek internal dan eksternal memberikan input dalam kebijakan luar negeri suatu negara (Rosenau, 1969, hal. 1-16).

Sejalan dengan pendekatan Rosenau dan Holsti diatas, Kim (1994) secara garis besar mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan utama yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Pertama, pendekatan internal (*domestic/societal*), kedua, adalah pendekatan eksternal (*external/systemic*), dan yang ketiga, adalah keterkaitan antara faktor internal dan eksternal (*domestic and external linkages*) (Kim, 1994, hal. 21).

Dalam pendekatan internal dikemukakan bahwa kebijakan luar negeri hanya ditentukan oleh faktor internal seperti, warisan sejarah, kepemimpinan, politik dalam negeri, kepentingan nasional, ideologi dan kemampuan. Sedangkan, pendekatan eksternal mengemukakan bahwa tingkah laku negara di dunia internasional, kedudukannya ditentukan dalam sistem internasional (Kim, 1994, hal. 21).

Economic Statecraft Concept

David A. Baldwin dalam *Economic Statecraft* menjelaskan bahwa *statecraft* secara tradisional didefinisikan sebagai *the art of conducting state*

affairs. Selain itu Baldwin juga mengutip beberapa definisi lain terkait dengan pendefinisian *statecraft*, seperti Harold dan Margaret Sprout yang senada dengan K.J. Holsti yang memandang bahwa *statecraft* sebagai aksi yang terencana dari negara untuk mengubah *external environment* baik kebijakan ataupun perilaku negara lain sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh *policy makers* (Baldwin, 1985, hal. 8-9).

Selanjutnya Baldwin dalam mendefinisikan *economic statecraft* memberikan pemaparan mulai dari *semantic taste* hingga perdebatan akademis yang berkembang, sehingga ia membuat kesimpulan bahwa *semantic taste* tidak relevan untuk memahami definisi *economic statecraft*, dan Baldwin menjelaskan bahwa *economic statecraft* didefinisikan sebagai (Baldwin, 1985, hal. 39-40):

1. *Emphasizes means rather than ends*, lebih menekankan maksud dari pada hasil akhirnya, misalnya pemboman pabrik-pabrik tidak dapat didefinisikan sebagai *economic statecraft*.
2. *Economic statecraft does not restrict the range of goals that may be sought by economic means*, secara empiris fakta yang tidak terbantahkan bahwa para pengambil kebijakan sering menggunakan instrumen ekonomi untuk tujuan yang lebih luas dari tujuan ekonomi.
3. *Economic statecraft treats policy instruments as property concept, thus facilitating the maintenance of a clear distinction between undertakings and outcomes*, negara memperlakukan instrumen kebijakan sebagai *property concept* sehingga memudahkan untuk pemeliharaan perbedaan antara usaha dengan hasil.
4. *Economic statecraft* memasukkan definisi ekonomi, sehingga dapat membedakan antara teknik ekonomi dan yang bukan.

Selain itu Baldwin (1985) juga membedakan *economic statecraft* dalam dua bentuk yaitu *negative sanction* (contohnya: embargo) dan *positive sanction* (contohnya: *tariff discrimination*). Secara sederhana ia membedakan bahwa *positive sanction* didefinisikan sebagai sanksi yang memberikan atau menjanjikan kepada negara target dengan *reward*, sedang *negative sanction* didefinisikan sebagai sanksi yang akan memberikan atau mengancamnya

dengan *punishment* (Baldwin, 1985, hal. 41-42).

Untuk memberikan kerumitan pemahaman antara *reward* dengan *punishment* adalah menentukan *baseline* harapan negara target pada saat *sender* memberikan sanksi. Dalam *positive sanction*, target mengharapkan adanya posisi relatif di masa depan (*expected future value*) terhadap sesuatu yang bernilai bagi target, sedangkan *negative sanction* akan menciptakan *relative deprivation* atau menjanjikan kecenderungan untuk membayar *cost* yang signifikan ketika berhasil, dan akan mengancam *cost* lebih tinggi lagi jika gagal.

Selanjutnya untuk operasionalisasi konsep tersebut, Francesco Giumelli menjelaskan *dependent variable* dan *independent variable* dari *economic statecraft* yang digagas oleh Baldwin dengan membangun kerangka teoritis dari sanksi. Giumelli berpendapat bahwa tidak semua sanksi dibuat secara *equal*, sehingga dibutuhkan suatu *functional typology* yang memberikan pemahaman tentang perbedaan dari sanksi-sanksi itu. Dan pembuatan *typology* hanya mungkin dibuat jika setiap klasifikasi sanksi harus dipahami bahwa sanksi (hanya salah satu dari empat metode kebijakan luar negeri tersebut) tidak pernah dikenakan sendiri, yang berarti bahwa sanksi selalu dan hanya berkontribusi pada tujuan kebijakan luar negeri (Baldwin, 1971; Lawson, 1983; van Bergeijk, 1994; Nincic, 2008 sebagaimana dikutip oleh Giumelli, 2011, hal. 29-30).

Lanjut Giumelli menegaskan bahwa sanksi adalah salah satu aksi yang dapat dipilih para pengambil keputusan kebijakan luar negeri terhadap lingkungan eksternalnya. Pilihan yang lainnya yang mungkin adalah penggunaan *violence*, penawaran *material gains* dan diplomasi Giumelli, 2011, hal. 29-30). Giumelli dengan mengintegrasikan dan mengembangkan penelitian Baldwin, Art dan Haas dapat menyajikan tipologi sebagaimana tabel 1.1. Dalam tabel 1.1 ini, Baldwin menjelaskan tujuannya dalam *Economic Statecraft* adalah untuk menjelaskan bagaimana *state* menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan politiknya, Art menjelaskan *forces* sebagai alatnya dan Haas menjelaskan bagaimana konflik diartikulasikan. Sehingga Baldwin membuat instrumen kebijakan luar negeri menjadi 4

kategori yaitu propaganda, diplomasi, *economic statecraft*, dan *military statecraft* (Art, 1980; Hass, 1974; Balwin, 1985 sebagaimana dikutip Giumelli, 2011, hal. 29-30).

Sedangkan cara untuk mempengaruhi aktor lain dapat digunakan dengan cara persuasi yang damai, memberi insentif atau sanksi, dan serangan sehingga mau mengerjakan sesuatu. Sedang tujuan dari aksi, Art menjelaskan sebagai “*What a policy instrument used for*” atau “*in what ways the target(s) is(are) influenced*” sehingga Giumelli menjadikannya dua kategori yaitu *cooperative* atau *non cooperative*. *Exercise of power* tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan, Wolfer membaginya menjadi *survival*, *possession* dan *milieu goals* (Rummel dan Tantel, 1966; Haas, 1974; Wolfer, hal. 1962, sebagaimana dikutip Giumelli, 2011, hal. 29-30). Sedang target atau siapa yang hendak dipengaruhi, Baldwin (1985, hal. 45) menjelaskan akan sangat bervariasi mulai individu, entitas, Negara dan organisasi internasional.

Bereskoetter dan Williams menjelaskan sanksi adalah *exercise of power* dalam kebijakan luar negeri, dan *power* dapat diartikan menjadi tiga dimensi, *winning the conflict*, *limiting alternatives and shaping normality*, yang kemudian Elman membagi sanksi dalam *non cooperative* (yang nantinya akan digunakan oleh penulis sebagai fokus penelitian) menjadi tiga kategori tujuan yaitu *coercion*, *constraint* dan *signal*, yang secara sederhana dalam tabel 1.2 (Bereskoetter dan Williams , 2007; Elman, 2005 sebagaimana dikutip Giumelli, 2011, hal. 32-34).

Selanjutnya Giumelli (Giumelli, 2011, hal. 32-34) menjelaskan bahwa diperlukan 2 asumsi dasar yang dipilih secara induktif, yaitu faktor *feasibility* dan *direct material impact*. Faktor *feasibility*, jika suatu sanksi layak (*feasible*) maka target tahu apa yang harus dilakukan dan dapat melakukannya karena permintaan tersebut tidak membahayakan keberadaannya. Di sisi lain, jika permintaan tersebut tidak dapat diterima oleh target, maka tujuan dari sanksi tidak akan mengubah perilaku target.

Tabel 1.1 Tipologi Statecraft dalam Kebijakan Luar Negeri

Domains (Baldwin 1985)	Methods, Mode, Techniques (Haas 1974; Art 1980)	Tools, means, instruments, levers	Purpose (Art 1980)		Ends, aims, objectives, goals	Targets (primary and secondary) (Baldwin 1999/2000)	
			Scope (Lasswell and Kaplan 1950)	Logic or mechanic			
STATECRAFT	Propaganda	Peaceful	Statements	Cooperative	Milieu Possession Survival (Wolfer 1962)	Individuals Entities Domestic Audience States International organisations International Audiences	
	Diplomacy	Incentives	Diplomatic advantages Economic aids Etc.	Non-cooperative			
	Economic statecraft	Sanctions	Financial Restrictions Travel Bans Arms Embargo Commodity Boycotts	To signal To support To cooperate			To signal To constrain To coerce
	Military statecraft	Violence	Strategic bombing Invasion Etc.				

Sumber: Dikutip dari Francesco Giumelli. *Coercing, Constraining and Signalling*. ECPR Press: 2011, hal 31.

Tabel 1.2 Kategori Tujuan Sanksi

Type	Logic	Possible positive outcome	Cases
Coercion	Impose a burden on targets to affect their cost/benefit calculation in order to do something	Behavioural change Creating a bargaining chip	UN on Libya EU on Belarus
Constraint	Impose a burden on targets to prevent the target from doing something	Stop targets Impose a burden on target	UN on Iraq EU on Zimbabwe
Signal	Signal the position of the sender without the imposition of a direct burden	Signal commitment Establish international standards Exercise diplomatic pressure Please audience Behavioural change under logics that different from cost imposed	UN on Rwanda EU on DRC

Sumber: Dikutip dari Francesco giuelli. *Coercing, Constraining and Signalling*. ECPR Press: 2011, hal 33.

Kelayakan permintaan didasari oleh dua dimensi: ketepatan (*preciseness*) dan kepraktisan (*practicality*). Ketepatan merujuk pada apakah permintaan telah diartikulasikan cukup sehingga target tahu apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kehendak pengirim (*sender*), dan kepraktisan berarti bahwa permintaan tersebut dapat dipenuhi oleh target tanpa mengorbankan keberadaannya. Permintaan disebut *precise* jika *sender* meminta target untuk melakukan satu atau lebih tindakan tertentu, kondisi *precise* tercapai jika target dapat mematuhi tanpa membahayakan keberadaannya.

Evaluasi kepraktisan sangat terkait dengan jenis target karena tidak semua aktor internasional berperilaku sesuai dengan prinsip yang sama. Kerangka kerja ini membedakan antara aktor rasional, ideologis dan kriminal. Kategori pertama meliputi aktor yang berpikir dan bertindak secara strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka; kategori kedua aktor

tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat, tetapi mereka telah membangun legitimasi mereka untuk bertentangan dengan *sender* dan menganggap lebih penting daripada biaya yang mereka pikul atas sanksi, sedangkan kategori ketiga melibatkan aktor yang pada dasarnya keberadaan mereka adalah melawan sanksi, setiap biaya yang dapat dikenakan kepada mereka tidak akan mengubah perilaku mereka, dan kepatuhan tidak akan menjadi pilihan (misalnya Al-Qaeda, Uni Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola - UNITA). Variabel ini akan menjadi elemen penting untuk menganalisis kelayakan tuntutan. Ketepatan dan kepraktisan akan diukur dalam skala ordinal.

Faktor kedua adalah *direct material impact*, kurang signifikannya dampak yang ditimbulkan tidak berarti bahwa pengirim tidak memiliki kemauan politik untuk secara efektif memainkan peran dalam krisis. Faktor tersebut dibentuk oleh *cost of sanction* (biaya sanksi) dan *dependence* (ketergantungan) terhadap sumber daya yang ditolak oleh sanksi misalnya minyak pada Iran/Irak.

Tabel 1.3 Kelayakan Sanksi

		Kinds of evidence (the list is not exhaustive)
Preciseness	1: vague, the target does not know what to do	<ul style="list-style-type: none"> - the demands stated in official documents - the coherence of states after the approval of the official documents
	2: medium, the target has a partial knowledge of what to do	
	3: precise, the target knows what to do	
Practicality	1: little, the request cannot be met by the target	<ul style="list-style-type: none"> - regime change - domestic situation of targeted groups - whether there are demands at all
	2: medium, meeting the request may comport high danger for the target	
	3: high, the request can be met by the target	

Sumber: Dikutip dari Francesco Giumelli. *Coercing, Constraining and Signalling*. ECPR Press: 2011, hal 37.

Tabel 1.4 Taksonomi Target

	Goal	Costs/benefits	Sensitivity to costs
Rational	Well-being	Yes	High
Ideological	Legitimacy from confrontation	Reputational	Reputational
Criminal	Free ride within the system	No	Low

Sumber: Dikutip dari Francesco Giumelli. *Coercing, Constraining and Signalling*. ECPR Press: 2011, hal 37.

Tabel 1.5 Tingkat Kelayakan

		Practicality		
		1	2	3
Preciseness	1	Low	Low	Low
	2	Low	Low	High
	3	Low	High	High

Sumber: Dikutip dari Francesco Giumelli. *Coercing, Constraining and Signalling*. ECPR Press: 2011, hal 37.

Tabel 1.6 Direct Material Impact

		Kinds of evidence (the list is not exhaustive)
Cost	1: low, no cost imposed by sanctions	<ul style="list-style-type: none"> – degree of monitoring – degree of implementation – degree of international cooperation – sector's share of the economy
	2: medium, partial cost imposed by sanctions	
	3: high, significant cost imposed by sanctions	
Dependence	1: low, no dependency on the resource denied	<ul style="list-style-type: none"> – relevance of the resource denied – commodity share in the economy – domestic structure of economic benefits – rate of interdependence on the resource denied – short, middle or long term consequences
	2: medium, some dependency on the resource denied	
	3: high, high dependency on the resource denied	

Sumber: Dikutip dari Francesco Giumelli. *Coercing, Constraining and Signalling*. ECPR Press: 2011, hal 37.

Tabel 1.7 Tingkat *Direct Material Impact*

		Dependence		
		1	2	3
Cost	1	Low	Low	Low
	2	Low	Low	High
	3	Low	High	High

Sumber: Sumber: Dikutip dari Francesco Giumelli. *Coercing, Constraining and Signalling*. ECPR Press: 2011, hal 39.

Adapun variable dasar *Economic Statecraft* adalah sebagai berikut:

1. *Threat to Sender*

Variabel *threat* mengacu pada tingkat ancaman yang diidentifikasi oleh pengirim. Dalam sistem internasional yang anarki, realistis percaya bahwa aktor negara mengejar kelangsungan hidupnya sebagai tujuan yang paling penting. Dengan demikian, dari sudut pandang *Clausewitzian*, jika sanksi adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain, maka semakin tinggi *threat against sender*, semakin tinggi komitmen *sender* untuk menghapus ancaman tersebut dengan memastikan bahwa target adalah tidak lagi berbahaya. Di sini, aktor yang relevan dari krisis adalah pengirim saja.

2. *Saliience*

Saliience adalah *degree of importance* yang melekat pada isu yang aktor buat. *Saliience* dari sebuah isu dapat dikorelasikan dengan tingkat ancaman, tetapi mengacu pada pentingnya krisis untuk alasan yang tidak langsung terkait dengan kelangsungan hidup pengirim. Dengan kata lain, krisis yang menonjol mungkin tidak menimbulkan ancaman bagi pengirim, dan ancaman mungkin tidak menonjol karena *saliience* tidak diukur dalam hal keamanan tradisional.

3. *Complexity of Dispute*

Complexity of Dispute merupakan variable yang digunakan untuk menggambarkan tingkat *intractability* krisis, dan variabel sistem yang memiliki kekuatan penjas dalam kebijakan luar negeri sebagai *interest* menjadi *incompatible*, karena itu, *sender* dan target masuk ke dalam *zero-sum game*, di mana keterlibatan dapat dipertimbangkan ketika peluang

menang tinggi dan *interest* dipertaruhkan. Konsekuensinya sanksi dapat diterapkan untuk menghilangkan musuh, untuk menghindari intervensi dalam daerah yang bahaya atau untuk mengejar beberapa keuntungan.

Teori Kontra Terorisme

Ganor (2005) menyebutkan bahwa para penentu kebijakan kontra-terorisme untuk memahami rumusan apa sebenarnya tujuan utama untuk memerangi terorisme. Ganor kemudian menekan bahwa tujuan utama kebijakan kontra-terorisme yaitu: *eliminating terrorism acts*, *minimizing damage caused by terrorism*, dan *preventing the escalation of terrorism* (Ganor, 2005, hal. 44-46). Mengeliminasi aksi terorisme dengan tindakan represif yang terukur dan proses peradilan yang terbuka. Namun, meminimalisasi dampak yang ditimbulkan aksi terorisme tak hanya menyangkut aspek keamanan dan hukum, melainkan juga aspek sosial-ekonomi. Terlebih lagi, mencegah perkembangan gejala terorisme harus dimulai dari penanaman nilai kebangsaan dan keagamaan yang terbuka, serta pendidikan kewarganegaraan.

Ada beberapa masalah yang unik dalam demokrasi untuk menciptakan sebuah kebijakan kontraterorisme yang efektif. Salah satu aspek paling penting dari sebuah kebijakan kontraterorisme yang efektif adalah pengumpulan informasi intelijen. Informasi ini akan menyediakan pembuat kebijakan dan pejabat militer mengambil tindakan yang tepat. Namun, sulit bagi badan intelijen untuk mengumpulkan informasi tentang organisasi teroris. Semua negara memiliki kesulitan mengumpulkan informasi organisasi terorisme.

Mossad Israel yang dianggap salah satu intelijen terbaik di dunia, mereka pun tidak dapat sepenuhnya mencegah serangan terorisme. Miliaran dolar yang dihabiskan di seluruh dunia untuk kebutuhan intelijen dalam kerangka kontra terorisme, namun ancaman masih tetap muncul. Pengumpulan informasi intelijen tentang kelompok-kelompok teroris telah dikenal sejak Perang Dingin banyak pola pendekatan pengumpulan informasi intelijen negara, persaingan antar agensi intelijen, dan kegagalan untuk

menyusup ke dalam kelompok terorisme. Masalah pengumpulan informasi intelijen yang paling berat adalah demokrasi, karena pengumpulan informasi akan melanggar tradisi demokrasi yang transparansi dan pertanggungjawaban publik yang rumit.

Selain itu, sulit untuk membuat kebijakan kontraterorisme efektif karena penegakan hukum. Terorisme sulit untuk mendefinisikan dan tidak ada definisi yang diterima secara tunggal. Definisi terorisme yang luas akan mencakup tindakan-tindakan oleh kekuatan-kekuatan besar. Sejak ada kesulitan dalam mendefinisikan terorisme, sulit untuk bernegosiasi dalam sebuah perjanjian. Ketika berhadapan dengan terorisme, sulit untuk mematuhi norma-norma internasional dan hukum konvensional, seperti Konvensi Jenewa, karena konvensi ini dibuat hanya untuk aktor negara dengan negara bukan aktor non-negara.

Mekanisme formal demokrasi yang membentuk prosedur-prosedur yang membatasi kecepatan eksekutif untuk merespon segala sesuatu yang akan merusak keseimbangan dalam trias politika. Dilema demokrasi adalah ketika berhadapan dengan kebijakan keamanan nasional maka dihadapkan pada isu penguatan eksekutif. Hal ini membuat para legislative cenderung bersikap kritis terhadap kewenangan-kewenangan yang tidak memiliki kriteria pengawasan publik yang baik. Hal ini berbeda dengan negara yang menganut otoritarian, yang lebih praktis. Maka kebijakan GWOt AS seringkali dianggap akan merusak nilai-nilai demokrasi yang dibawa oleh AS sendiri.

Kelayakan *Container Security Initiative* (CSI) sebagai *Economic Statecraft*

CSI harus bersesuaian dengan definisi *economic statecraft* sebelum menimbang kelayakannya. Definisi Balwin (1985) memberikan 4 pedomannya sehingga selanjutnya (1) CSI harus dipahami bahwa maksud kebijakan tersebut, bukan hanya tercapainya 100% peti kemas yang masuk AS telah diperiksa; (2) CSI tidak hanya merupakan instrumen kebijakan perdagangan untuk menciptakan *non tariff trade barrier* namun juga untuk tujuan yang lebih luas dari tujuan ekonomi tersebut; (3) CSI merupakan

instrumen yang secara jangka panjang memiliki kapitalisasi politik bagi AS; (4) CSI secara jelas diketahui sebagai bagian teknik *trade barrier* walaupun dikemas dalam isu perang terhadap terorisme. Sehingga dengan melihat kesesuaian CSI dengan definisi *economic statecraft* tersebut, maka dilakukan pengujian kelayakan CSI sebagai *economic statecraft*.

Kelayakan CSI sebagai *economic statecraft* harus memenuhi dimensi ketepatan (*preciseness*) dan kepraktisan (*practicality*), merujuk pada permintaan US CBP (2011, para. 10) terhadap target terkait CSI adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi peti kemas dengan risiko tinggi dengan menggunakan *targeting* yang terotomasi untuk mengidentifikasi container dengan memiliki potensi risiko terhadap terorisme berdasarkan informasi pendahuluan dan intelijen strategik.
2. Melakukan *prescreen* dan evaluasi peti kemas sebelum dikapalkan di pelabuhan keberangkatan (*port of origin*) dari negara target.
3. Menggunakan *x-ray and gamma ray machines* yang memungkinkan semua container telah dilakukan *screening*.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa negara target dapat secara tepat mengimplementasikan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kehendak pengirim (*sender*), dan permintaan tersebut sangat mungkin untuk dicapai target, walaupun *initial cost* tinggi pada saat pelaksanaannya, yang dalam jangka panjang akan memberikan keuntungan relatif (*relative gain*) bagi target. Sehingga CSI dapat dikategorikan layak (*feasible*) sebagai *economic statecraft* karena memenuhi dimensi ketepatan (*preciseness*) dan kepraktisan (*practicality*) bagi negara target.

Operasionalisasi Konsep

Untuk operasionalisasi konsep, penulis hanya akan menggunakan *threat* sebagai variabel bebas dalam pemodelan, yang meliputi *security and economic threat*. Hal ini diambil dengan pertimbangan agar penulisan tesis ini tetap fokus pada *threat* sebagai variabel penjelas bagi variabel terikat yaitu *container security initiative*, sehingga didapat suatu penelitian yang mendalam

dalam kajian terorisme dalam keamanan internasional. Selanjutnya *threat* akan dibagi menjadi 8 (delapan) *proxy* yang meliputi *security and economic threat* yang diuraikan dalam tabel 1.8.

Untuk mempermudah analisa dapat digambarkan model analisa sederhana sebagaimana dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1. Model Analisa Sederhana



Tabel 1.8 Operasionalisasi Konsep

Variabel Terikat	Variabel Bebas		Kategori	Indikator
CSI sebagai Instrumen <i>Economic Statecraft</i> dalam Kebijakan GWOt AS	<i>THREAT (Security and Economic Threat Against US)</i>	<i>Existence of Al-Qaeda Network (Al Qaeda/QAE)</i>	Ada	Canada, Belanda, Perancis dan China merupakan negara yang diketahui didalamnya ada jaringan Al Qaeda menjadi negara target CSI.
			Tidak Ada	

		<i>Incident of Political Violence</i> di Negara Target (Incident/INC)	Tinggi	Israel dan Pakistan merupakan negara dengan tingkat <i>political violence</i> tinggi dapat mengancam AS
			Rendah	
		<i>Islam as Common Religion</i> di Negara Target (Religion/REL)	Mayoritas Muslim	Sebagian besar negara target yang mayoritas muslim tidak merespon secara optimal kebijakan GWoT
			Mayoritas Bukan Muslim	
		Keanggotaan Negara Target dalam NATO atau Partner NATO (Friend/FRE)	Teman	Negara yang bukan anggota NATO atau <i>Partner</i> NATO merespon pada tingkat yang rendah
			Bukan Teman	
		Rute terdekat dari <i>port</i> negara target ke N.Y /L.A. <i>port</i> AS (Distance/DIS)	Dekat	Secara tradisional semakin dekat suatu negara dalam kondisi anarki semakin mengancam keamanan
			Jauh	
		Import AS dari Negara Target (Impor/IMP)	Pemasok Signifikan	Canada, Jepang, China, dan Jerman adalah pemasok 45% impor AS, sehingga probabilitas ancaman terorisme dengan peti kemas lebih tinggi dibanding negara lain.
			Pemasok Non Signifikan	
		Ekspor AS ke Negara Target (Ekspor/EXP)	Pasar Besar	<i>Economic Statecraft</i> membutuhkan kondisi asimetris dengan negara target, sehingga pasar besar memiliki posisi <i>bargaining</i> dengan kebijakan AS
			Pasar Kecil	
		Neraca Perdagangan dengan Negara Target (BOT)	Defisit	Canada, Jepang, China, dan Jerman adalah penyumbang lebih dari 50% defisit perdagangan AS dapat mengancam stabilitas ekonomi AS.
			Surplus	

1.7 Hipotesis

Berdasarkan teori utama yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan membuktikan hipotesis penelitian sebagai berikut:

“*Threat* mempengaruhi secara signifikan terhadap CSI sebagai Instrumen *Economic Statecraft* dalam Kebijakan GWOt AS”

1.8 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat memilih salah satu dari instrument kebijakan GWOt-nya adalah instrument ekonomi yaitu *Container Security Initiative* (CSI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu untuk menganalisa hubungan antar variabel dalam model. Penggunaan *Economic Statecraft Concept* dan *Foreign Policy Analysis* dalam penelitian ini akan digunakan sebagai alat analisis atas variabel-variabel.

Data

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Sumber data primer diperoleh dari terbitan *US CBP- Department of Homeland Security* (data terkait negara yang telah merespon CSI) dan *National Consortium for Study of Terrorism and Response to Terrorism (START), A Center of Excellence of The U.S. Department of Homeland Security Based at the University of Maryland* (data terkait *global terrorism database*), dan *US Department of Commerce* (data impor dan ekspor AS) dan sumber lainnya. Sumber data skunder diperoleh dari berbagai penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang bersifat valid seperti penelitian *International Centre for Political Violence and Terrorism Research* pada *Institute of Defence and Strategic Studies*, Singapura.

Untuk tujuan pengolahan data peneliti membuat *dummy* untuk variabel terikat (CSI), dimana negara yang di analisa merupakan negara target dari kebijakan CSI tersebut dengan didapatkan memiliki satu atau lebih pelabuhan (*port*) yang telah patuh terhadap CSI sebagai *included group* dengan kode 1 (satu), sedangkan negara yang tidak memiliki pelabuhan yang patuh CSI

disebut *excluded group* dengan kode 0 (nol). Sedangkan untuk variabel bebas untuk variabel *Existence of Al-Qaeda Network* (Al Qaeda/QAE), *Islam as Common Religion* di Negara Target, (Religion/REL), Keanggotaan Negara Target dalam NATO atau Partner NATO (Friend/FRE) juga digunakan dummy, dimana (1) pada variabel QAE jika di negara target terdapat jaringan Al Qaeda diberi kode 1 (satu) dan jika tidak ada diberi kode 0 (nol), (2) pada variabel REL jika di negara target mayoritas agama penduduknya adalah muslim diberi kode 1 (satu) dan jika tidak ada diberi kode 0 (nol), (3) pada variabel FRE jika negara target adalah anggota/partner NATO maka diberi kode 1 (satu) dan jika tidak ada diberi kode 0 (nol). Untuk kelima variabel bebas lainnya (INC,DIS,IMP,EXP,BOT) akan menggunakan data primer.

Selanjutnya analisa data merupakan langkah yang ditujukan untuk memperoleh informasi yang relevan, yang terkandung dalam data tersebut sehingga hasil pengolahannya dapat bermanfaat dalam pemecahan masalah. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dari sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai data yang valid dalam pengujian empiris. Beberapa data dibuat variabel *dummy* untuk menyatakan satu kategori variabel *non metric* dengan k kategori dapat dinyatakan k-1 variabel *dummy*, *excluded* dan *included group*. Sehingga didapatkan informasi bahwa variabel terikat adalah *metric* sedangkan variabel bebas merupakan campuran *metric* dan *non metric*.

Pemilihan Teknik Statistik

Analisa terhadap hubungan *Container Security Initiative* (CSI) dengan *Threat* digunakan untuk membuktikan hipotesis yang dibuat. Dalam penelitian tersebut akan menggunakan pengujian secara statistik. Berdasarkan analisa jenis data yang didapatkan pada bahasan sebelumnya maka didapatkan petunjuk untuk pemilihan analisa yang tepat. Berdasarkan penjelasan Ghazali (2001) maka hubungan yang terbentuk merupakan model dependen yang dapat dianalisa dengan menggunakan *multivariate analysis*, selanjutnya variabel Terikat hanya 1 (satu) variabel yaitu CSI yang bersifat *non metric* dan Variabel Bebas merupakan campuran dari data yang bersifat *metric* dan *non*

metric sehingga analisa yang dapat digunakan adalah *LOGIT and PROBIT Analysis* (Ghozali, 2001,hal. 5-7). Berdasarkan pengujian asumsi *multivariate normal distribution* dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagaimana Tabel 1.9. didapatkan nilai probabilitas/ *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih kecil dari nilai alpha 5% kecuali variabel DIS, maka dapat disebutkan bahwa variabel tidak terdistribusi normal, sehingga model *normal cumulative distribution function* (CDF) yang biasa disebut *PROBIT Model*, kurang baik untuk digunakan. Selanjutnya pilihan analisa akan dilakukan dengan *LOGIT analysis*. Memperhatikan jenis data variabel terikat yang berupa dummy dan ordinal maka hal ini yang sering disebut dengan model logit kumulatif atau juga disebut *binary logistic regression* atau *ordinal logistic model* (Hosmer, dan Lemeshow, 1989, hal. 1-10).

Tabel 1.9. *Kolmogorov-Smirnov Test*

		CSI	QAE	INC	REL	FRE	DIS	IMP	EXP	BOT
N		68	68	68	68	68	68	68	68	68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.50	.43	14.75	.15	.59	5.28	17.04	10.98	-6.3
	Std. Deviation	.50	.49	34.95	.36	.49	2.44	35.51	24.18	15.4
Most Extreme Differences	Absolute	.34	.37	.358	.51	.39	.13	.34	.33	.27
	Positive	.34	.37	.358	.51	.29	.13	.34	.29	.22
	Negative	-.34	-.30	-.33	-.34	-.39	-.07	-.33	-.33	-.27
Kolmogorov-Smirnov Z		2.80	3.11	2.95	4.23	3.18	1.10	2.77	2.74	2.25
Asymp. Sig. (2-tailed)		.00	.00	.00	.00	.00	.18	.00	.00	.00

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *Output SPSS Ver. 17.0*

Maka model *CUMULATIVE LOGIT* atau *BINARY LOGISTIC REGRESSION* adalah sebagai berikut:

$$\text{Logit} (CSI_{ij}) = \beta_i X_j \quad (1.1)$$

atau

$$\begin{aligned} \ln \frac{CSI}{1 - CSI} = & \beta_0 + \beta_1 QAE + \beta_2 INC + \beta_3 REL + \beta_4 DIS \\ & + \beta_5 IMP + \beta_6 EXP + \beta_7 BOT \end{aligned} \quad (1.2)$$

atau

$$CSI = \frac{1}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 QAE + \beta_2 INC + \beta_3 REL + \beta_4 DIS + \beta_5 IMP + \beta_6 EXP + \beta_7 BOT}} \quad (1.3)$$

Dimana:

$$\begin{aligned} \ln & = \text{Log natural}; \\ \frac{CSI}{1 - CSI} & = \text{odds} = \frac{\text{Probabilitas (CSI | Variabel Bebas)}}{1 - \text{Probabilitas (CSI | Variabel Bebas)}} \end{aligned}$$

Sehingga $\ln \frac{CSI}{1 - CSI}$ akan dibaca sebagai *log of odds*, yang merupakan fungsi linier dari variabel bebas dan dapat diinterpretasikan seperti koefisien pada analisis regresi sederhana.

Variabel Terikat:

CSI = *Container Security Initiative* sebagai Instrumen *Economic Statecraft* dalam Kebijakan GWoT AS;

Variabel Bebas: *THREAT (Security and Economic Threat Againsts US)*

QAE = *Existence of Al-Qaeda Network*;

INC = *Incident of Political Violence (bombing, armed/unarmed assault, assassination, infrastructure attack, kidnapping, hijacking)* di Negara Target;

REL = *Islam as Common Religion* di Negara Target;

DIS = Jarak Rute Pelayaran Komersial terdekat dari *port* negara target ke New York /Los Angeles *port* AS;

IMP = *Import* AS dari Negara Target;

EXP = *Export* AS ke Negara Target;

BOT = *Balance of Trade* (Neraca Perdagangan) dengan Negara Target;

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6, \beta_7$ = Nilai koefisien dari setiap variabel bebas.

1.9 Sistematika Penulisan

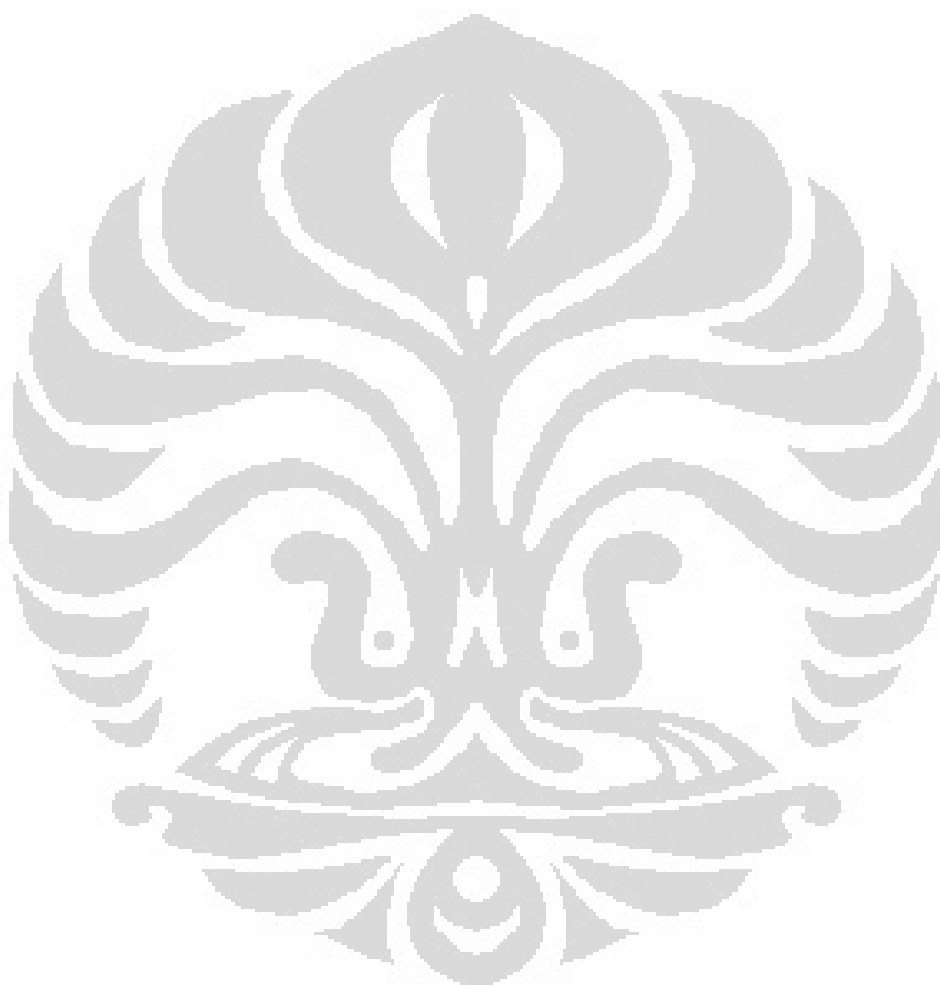
Bab 1 merupakan pendahuluan tesis tersebut yang memaparkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Dari latar belakang permasalahan tersebut peneliti mengajukan rumusan permasalahan dan mengajukan pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian dipaparkan tinjauan pustaka. Selanjutnya diuraikan kerangka teori yang digunakan untuk memperjelas hubungan antar variabel dan model analisis, dan menyusun sebuah hipotesis dan metodologi penelitian.

Bab 2 memaparkan variabel terikat yaitu *Container Security Initiative* (CSI), dimana kebijakan luar negeri AS seringkali menggunakan instrumen ekonomi untuk tujuan-tujuan politik internasionalnya. Selain itu juga untuk memahami kecenderungan kebijakan luar negeri pasca 9/11 sehingga diperoleh penjelasan tentang mengapa *economic statecraft* dipilih sebagai salah satu instrumennya.

Bab 3 memaparkan variabel bebas yaitu menguraikan faktor-faktor yang mendukung CSI sebagai *economic statecraft* dalam kebijakan GWoT AS sehingga memberikan gambaran tentang ancaman terhadap AS (*threat against U.S.*) baik variabel yang terkait dengan ancaman keamanan (*security threat*) maupun ancaman ekonomi (*economic threat*) yang menjadikan alasan menjelaskan mengapa kebijakan CSI dipilih.

Bab 4 berisi tentang analisa hubungan antara variabel bebas yaitu *security threat* dan *economic threat* dengan variabel terikat pilihan kebijakan CSI. Analisa ini menggunakan *Economic Statecraft* dan *Foreign Policy Analysis* sebagai pisau bedah sehingga, dapat dipaparkan bukti empiris yang diperoleh dalam penelitian tersebut berdasarkan pengujian statistik *logistic regression* dengan menggunakan bantuan *software* statistik SPSS ver 17.0. untuk pengolahan data.

Bab 5 berisi kesimpulan dari paparan dan analisa pada bab-bab sebelumnya yang menjelaskan mengapa CSI dipilih sebagai *economic statecraft* dalam kebijakan GWoT AS. Kesimpulan ini diharapkan dapat merangkum keseluruhan bahasan dalam penelitian tersebut.



BAB 2

CONTAINER SECURITY INITIATIVE (CSI) DAN PENGUNAAN *ECONOMIC STATECRAFT* DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI AS

Serangan terorisme pada tanggal 11 September 2001 telah menjadi pendorong bagi perubahan orientasi kebijakan luar negeri AS. Presiden George W. Bush menyatakan bahwa “*every resource at our command - every means of diplomacy, every tool of intelligence, every instrument of law enforcement, every financial influence, and every necessary weapon of war*” (Bush, 2001, hal. 2). Bush telah melakukan langkah awal penyesuaian kebijakan keamanannya dengan pergeseran prioritas kebijakan luar negeri AS. Salah satu yang sangat nampak adalah perubahan kebijakan *foreign aid* pasca 9/11, bantuan bilateral melambung tinggi melebihi Marshall Plan. Selanjutnya para pembuat kebijakan AS juga mencoba untuk mengelola kebijakan perdagangannya dengan meningkatkan akses negara berkembang yang memiliki posisi geopolitik penting dengan memperluas pasar impornya.

Dinamika politik dalam negeri AS tidak sepenuhnya dapat menerima kebijakan untuk membangun koalisi internasional tersebut yang akan mengorbankan sumber daya ekonomi demi mendapat pengaruh atau dengan memanipulasi *trade preferences* AS. Perubahan kebijakan luar negeri secara fungsional akan memacu dinamika domestik AS. Baldwin (1985) menyatakan tiga pandangan mempengaruhi pola dan warna kebijakan luar negeri AS, yaitu *isolationist*, *idealist*, dan *realist* (Baldwin, 1985, hal. 88-95).

Demikian pula ketika memandang *economic statecraft* ketiganya memiliki pandangan yang berlawanan. *Isolationist* berkeyakinan bahwa perdagangan dan politik dapat dipisahkan dan seharusnya tetap dijaga agar terpisah, hal ini dianut oleh Presiden Washington dan Jefferson. Sedangkan *idealist* yang dekat dengan pendekatan Eropa membuat gambaran bahwa pandangan *isolationist* tidak sempurna, ada suatu kebutuhan untuk menggantikan *traditional power politics* dalam diplomasi dengan *free trade* yang diyakini mampu menjembatani perdamaian dunia.

Pandangan ketiga, *realist* yang ingin mendorong *national interest* menggantikan arti penting ekonomi sebagaimana pandangan *idealist*, sehingga ekonomi dianggap sebagai *a tool of politic*. Antara *idealist* dan *realist* menurut Kaufman (1969) sebagaimana dikutip Baldwin (1985) menyatakan keduanya memiliki perbedaan tentang tujuan dari kebijakan luar negeri AS, namun kedua pandangan tersebut sepakat tentang penggunaan *economic statecraft*. Presiden Benjamin Franklin merupakan yang pertama menggunakan *economic statecraft* sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri AS (Baldwin, 1985, hal. 88-95).

Pada bahasan bab 2 selanjutnya, peneliti akan menguraikan tentang CSI untuk memperoleh gambaran yang utuh berdasarkan sumber resmi pemerintah AS dan penelitian yang relevan. Selain itu juga akan dipaparkan tentang kebijakan ekonomi luar negeri AS terkait dengan kebijakan kontra terorisme AS, sehingga didapatkan pemahaman tentang kecenderungan kebijakan para pengambil keputusan kebijakan luar negeri AS dalam merespon serangan terorisme 9/11.

2.1. Container Security Initiative dan Security Threat

Transportasi laut menjadi sistem transportasi yang paling efisien, murah dan *reliable* untuk mengangkut barang dalam jarak jauh. Sejak dulu perusahaan pelayaran telah menghubungkan semua bangsa dalam hubungan perdagangan dan terus berkembang membantu kebutuhan perdagangan yang menuntut kepraktisan (Caldwell, 2009, hal. 1-5). Dan *containerization* adalah sisi unggul dari pemuatan barang dalam kapal, yang dikenalkan sejak tahun 1950, dimana industri di bidang pelayaran tersebut mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Adapun keuntungan *containerization* sebagaimana dijelaskan dalam *NLRB Longshoremen* dalam sebagaimana dikutip Reams (1985, hal. 10) adalah sebagai berikut:

"The use of containers is substantially more economical than traditional methods of handling ocean-borne cargo. Because cargo does not have to be handled and repacked as it moves from the warehouse by truck to the dock, into the vessel, then from the vessel to the dock and by truck or rail to its destination, the costs of handling are significantly reduced. Expenses of separate export packaging, storage, losses from pilferage and breakage, and costs of insurance

and processing cargo documents may also be decreased. Perhaps most significantly, a container ship can be loaded or unloaded in a fraction of the time required for a conventional ship. As a result, the unprofitable in-port time of each ship is reduced, and a smaller number of ships are needed to carry a given volume of cargo.”

2.1.1. Pertimbangan Keamanan dan Lingkungan Hukum

Segera setelah peristiwa 9/11 DK PBB mengeluarkan resolusi 1373 yang merupakan wewenang PBB sebagaimana tercantum dalam bab VII Pasal 2b mengharuskan setiap negara untuk mengambil langkah-langkah yang sekiranya diperlukan untuk mencegah tindakan terorisme. Pemerintah diberikan waktu selama 90 hari untuk mengimplementasikan semua tuntutan dari resolusi tersebut. Sebagai konsekuensi dari resolusi tersebut, legislator AS bertindak cepat untuk memperbaiki sistem peraturan terkait kontra terorismenya.

Sejalan dengan ketentuan yang diharuskan oleh Resolusi DK PBB 1373, kongres AS mengeluarkan sejumlah aturan yang bertujuan untuk menjaga perbatasan dari serangan terorisme yang lebih jauh. Dasar hukum (legislasi) dari CSI dijamin dengan *Maritime Transportation Security Act* 2002 (MTSA) yang merupakan amandemen dari *the Trade Act* 2002. Fungsi dari dua aturan tersebut adalah untuk memasukkan praktik keamanan dan usaha untuk mengurangi kelemahan pertahanan menjadi praktik-praktik komersial.

The Trade Act 2002, *Homeland Security Act* 2002 and U.S. *PATRIOT Act* 2002 juga memfasilitasi implementasi dari CSI dengan menciptakan kondisi dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengukuran kontra terorisme yang efektif. *Security and Accountability for Every Port Act* 2006 (SAFE Port Act 2006) yang terbaru mengkodifikasi CSI didalamnya. Pada paparan selanjutnya peneliti perlu memberikan gambaran bagaimana lingkungan hukum di AS yang mendasari CSI dikeluarkan sebagai kebijakan, peneliti membuat ringkasan dari penelitian Dallimore (2008, hal 34-41) sebagaimana dijelaskan pada bahasan selanjutnya.

Homeland Security Act 2002, langkah pertama yang diambil oleh pemerintah AS dalam merespon 9/11 adalah mengorganisir ulang agen

keamanannya untuk meningkatkan kemampuan anti terorismenya. Hal ini dicapai melalui *Homeland Security Act 2002* yang pada saat itu disebut sebagai reorganisasi yang paling ekstensif dari pemerintahan federal sejak Harry Truman menandatangani *National Security Act. Section 101* dari peraturan tersebut menjadikan *Department of Homeland Security (DHS)*, sebagai Departemen dibawah Presiden dalam system pemerintahan AS. Departemen ini didirikan pada tanggal 24 Januari 2003 dan misi utamanya adalah untuk mencegah serangan terorisme, mengurangi kelemahan pertahanan, dan mengurangi kerusakan serta strategi pemulihan jika serangan teroris yang terjadi.

Section 402 mengidentifikasi agensi-agensi dan fungsi-fungsi yang terkait keamanan transportasi dan perbatasan yang akan ditransfer ke *Department of Homeland Security*. Secara keseluruhan, departemen tersebut menaungi 20 agen federal termasuk *US customs service, the Immigration and Naturalization Service, the Animal and Plant Health Inspection Service, the Coast Guard, and the Transportation Security Administration*. Penggabungan tersebut agensi tersebut dengan tugas mengatur keamanan perbatasan ke dalam satu departemen dengan seluruh tanggung jawab untuk memelihara keamanan bertujuan untuk meningkatkan arus informasi dan kerjasama diantara badan tersebut.

The US PATRIOT Act 2002 dikeluarkan sebagai respon langsung dari resolusi 1373 dan dijelaskan dalam pembukaannya sebagai peraturan untuk mencegah dan menghukum tindakan teroris di AS dan seluruh belahan dunia, untuk mengembangkan alat investigasi dalam penegakan hukum, dan tujuan lainnya. *Section 801* melarang serangan terorisme dan aksi kekerasan yang lain terhadap sistem transportasi massal. Hal ini termasuk kejahatan yang mengakibatkan dampak merusak, merobohkan, membakar, atau penghentian transportasi massa, menempatkan *asset* biologis atau alat perusak dalam transportasi massal dengan ceroboh atau dengan niat untuk membahayakan atau meletakkan hal tersebut, dekat dengan fasilitas transportasi massal sehingga transportasi tidak bisa berjalan. *Section 1016 (e)* dari aturan tersebut juga mendefinisikan istilah *critical*

infrastructure yang muncul untuk memasukkan jaringan fisik seperti sistem transportasi maritime. Serangan teroris dan aksi perusakan terhadap sistem transportasi massal dihukum dengan ancaman denda atau kurungan penjara.

The Maritime Transportation Security Act 2002 adalah legislasi yang pertama dalam kemaritiman terkait kontra terorisme dan bertujuan untuk melindungi pelabuhan dan jalur perairan di US dari serangan teroris tanpa mengakibatkan kerugian bagi perdagangan. *Section 102* dari aturan mengimplementasikan persyaratan keamanan dari *SOLAS amendments* dan *the ISPS Code* yang dikeluarkan oleh *the International Maritime Organization*. Tuntutan tersebut mengharuskan sektor swasta untuk ikut serta dalam membangun sistem antiterorisme nasional yang komprehensif, pengintegrasian penegakan hukum dengan badan-badan swasta, lokal, pemerintah dan federal terhadap keamanan perbatasan internasional di pelabuhan laut Amerika.

Sedangkan, penjaga pantai bertanggung jawab untuk menjamin keamanan pelabuhan dan kapal-kapal di AS. Bagaimanapun, terdapat dimensi di luar daratan terhadap aturan ini. *Section 108 (a) (1) (B)* mengharuskan adanya penilaian terhadap persyaratan anti teroris di pelabuhan asing dimana kapal-kapal asing berangkat yang nantinya akan melakukan perjalanann menuju AS. Sebagai tambahan, dalam sub-paragraph (C) memberikan kekuasaan kepada sekretaris untuk menilai perjanjian keamanan dari pelabuhan lain dengan mempertimbangkan adanya risiko bagi perdagangan laut internasional. Jika sekretaris menilai hasil evaluasi anti teroris dari pelabuhan lain dianggap tidak cukup memadai maka dia dapat menolak kapal-kapal tersebut untuk memasuki AS. Penyelewengan aturan tersebut berujung pada sanksi moneter yang berat.

Fungsi penting lain dari MTSA adalah untuk mengamandemen *Trade Act of 1930* sehingga mengizinkan bea cukai AS untuk mensyaratkan adanya ketentuan lanjutan melalui informasi elektronik. Salah satu aturannya adalah pemilik kapal atau fasilitas tersebut disyaratkan merupakan warga negara AS. Aturan tersebut juga merefleksikan kebutuhan untuk

bekerja sama dengan sektor swasta dalam menjamin keamanan fasilitas maritim.

The Trade Act 2002, pencegahan terorisme yang efektif membutuhkan kerja sama dari sektor swasta. Hal ini tercermin dari *Chapter 4 of the Trade Act 2002* yang mengandung sejumlah persyaratan anti terorisme. Dalam jangka waktu satu tahun dari keluarnya peraturan tersebut, mengharuskan pemindahan kepada *Customs Service* yang sekarang disebut dengan *Bureau of Customs and Border Protection (CBP)*, untuk mengirimkan informasi kargo secara elektronis sebelum dilakukannya impor/ekspor ke atau dari AS. Peraturan tersebut dapat mensyaratkan informasi oleh sekretariat jika dianggap dibutuhkan untuk menjamin penerbangan, maritim, dan keamanan serta keselamatan transportasi permukaan terhadap penegakan hukum tersebut dan diadministrasikan oleh *Customs Service*.

Sebagai tambahan, peraturan-peraturan tersebut membuat parameter-parameter dimana Pihak terkait harus mengembangkan dan menyebarkan peraturan tersebut, menuntutnya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan perdagangan dan keamanan untuk menyeimbangkan perbedaan dalam berbagai moda transportasi. Keberadaan dari hubungan yang kompetitif antara berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi khusus patut menjadi pertimbangan. Bea Cukai juga harus memahami kerahasiaan informasi. *Section 341 (a) of the Trade Act* juga meningkatkan imunitas dari pegawai kepabeanan dari tindakan masyarakat sipil saat melakukan investigasi.

The Security and Accountability for Every Port Act 2006, mulai tahun 2006, kepentingan politik dalam pengukuran tingkat keamanan yang diperkenalkan oleh CBP telah berkembang pesat dan para senator membuat berbagai peraturan untuk membuatnya lebih efektif. Dukungan politik untuk mengundang-undangkan CSI dan C-TPAT diperkuat dengan adanya pengakuan oleh *DP World of rights* untuk menjalankan pangkalan operasi di enam pelabuhan US pada tahun 2006.

The Security and Accountability for Every Port Act 2006 atau yang dikenal dengan istilah *SAFE Port Act 2006* dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 2006. Aturan ini secara spesifik membahas *maritime terrorism* dan tujuannya untuk meningkatkan keamanan di pelabuhan AS, mencegah munculnya ancaman terhadap AS dan melacak serta melindungi *container* yang rutanya melalui atau menuju AS. Aturan ini membahas kelemahan dalam keamanan maritim yang diidentifikasi dengan *Permanent Sub-Committee on Investigations* atau yang disebut kegagalan untuk memeriksa container dan sistem container yang berisiko tinggi.

Hal ini meningkatkan transparansi dari CSI dengan mensyaratkan adanya publikasi dari rencana strategis dan standar keamanan minimum, selain itu juga mendefinisikan istilah-istilah yang secara umum digunakan terkait keamanan maritim. Aturan ini juga mensyaratkan penempatan personil yang akan menjalankan CSI di negara target.

Title II pada *SAFE Port Act 2006* berkaitan dengan keamanan dari *international supply chain* didefinisikan, pada *Section 2 (10)*, sebagai proses *door to door* dari pengiriman barang ke dan dari AS. *Section 205* mengkodifikasi aspek yang paling penting dan paling kontroversial dari CSI. Contohnya, *Section 202 (a)* mensyaratkan DHS untuk mengembangkan aturan lanjutan dari perdagangan yang telah ditunda akibat adanya insiden keamanan transportasi. Rekomendasi akan diberikan kepada kapal-kapal yang memasuki 1) dari pelabuhan (CSI) yang telah mendapatkan persetujuan; 2) kapal-kapal yang dioperasikan oleh anggota C-TPAT; 3) membawa kargo jalur hijau (tingkat ketiga C-TPAT). *Section 205 (j)* menyatakan secara jelas bahwa kargo dari pelabuhan CSI dianggap memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan kargo yang berasal dari pelabuhan non-CSI dan *Section 202 (c) (1)* memberikan kewenangan terhadap komisioner kepabeanan untuk memberikan prioritas kepada kargo yang memasuki pelabuhan jika berasal dari pelabuhan asing yang diatur dengan CSI. *Section 201 (a)* mensyaratkan DHS untuk membuat rencana strategis untuk keamanan transportasi maritim dan membuat daftar persyaratan terkait *Section 201 (b) (1) – (11)*. Adanya rencana komplementer terkait dengan

keamanan transportasi maritime, dan harus mempertimbangkan efek dari persyaratan keamanan *supply chain* pada perusahaan ukuran kecil dan menengah. Hal ini dipenuhi oleh Section 201(c) yang mensyaratkan sekretariat untuk mengkonsultasikannya dengan pemangku kepentingan yang utama terlibat dalam keamanan dari container yang bergerak menuju international supply chain.

Yang terakhir terkait CSI adalah *Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act 2007 (IRCA)* tertera dalam Section 1701 yang mengamandemen Section 232 of the SAFE Port Act 2007 untuk mengharuskan *100 % scanning* terhadap seluruh container yang memasuki AS. Mengikuti pemberlakuan SAFE Port Act 2006 sejumlah amandemen mengerucut pada keharusan pemeriksaan 100% oleh senator yang menyetujui CSI sebagai tawaran terhadap lemahnya perlindungan terhadap container yang memiliki risiko yang tinggi yang dikenal dengan istilah “Sale Only if Scan”. Aturan ini mensyaratkan pelabuhan asing yang berpartisipasi dalam CSI untuk menscan seluruh container yang dikirimkan ke US untuk senjata nuklir dan radiologi sebelum dimuat. Kegagalan untuk menscan kargo akan berujung pada penundaan/penghentian perdagangan kargo kontainer dari negara tersebut, yang secara efektif membuat anggota CSI untuk mengimplementasikannya. Informasi yang didapat melalui *scanning* tersebut akan dicatat dan digunakan untuk meningkatkan sistem peringatan dini bagi AS.

2.1.2. Operasionalisasi CSI

Mendapatkan bahan peledak dan sejenisnya bukanlah hal sulit di peroleh di pasar gelap oleh kelompok terorisme. Hal terberat yang harus mereka lalui adalah penghindaran deteksi saat bahan peledak dibawa masuk ke sasaran, yang ke Amerika Serikat. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan memanfaatkan kerentanan dari sistem transportasi kargo global. Efisiensi dari sistem ini bergantung pada fleksibilitas dari intermoda kontainer – container dengan standar 40 atau 20 feet yang dapat melakukan perjalanan dengan kapal, kereta api atau truk tanpa dikemas ulang. Setiap

hari, 30.000 truk, 6.500 mobil rel dan 140 kapal memberikan lebih dari 50.000 kontainer tersebut ke tujuan dalam Serikat States. Meskipun beberapa dari lalu lintas perdagangan ke AS melalui jalan raya dan kereta api, sebagian besar kontainer masuk melalui salah satu sarana ini dari 361 pelabuhan dari berbagai negara. Sebagai ekonomi global terus berkembang, total volume impor dan ekspor barang melalui pelabuhan AS diperkirakan akan lebih dari dua kali lipat selama dua puluh tahun ke depan, secara dramatis meningkatkan beban CBP untuk mengamankan pelabuhan (Allison, 2004, hal. 107).

Pemeriksaan container yang masuk pelabuhan Amerika hanya sekitar dua puluh ribu per hari, atau kurang dari 5 persen yang dilakukan pemeriksaan kepabeanan (Allison, 2004, hal. 7). Teknologi saat ini tidak cukup digunakan untuk memungkinkan pemeriksaan dengan *scanning*. Peralatan yang berhubungan dengan keamanan dan *scanning*, seperti perahu kecil, kamera, skala besar mesin sinar-x, dan perangkat kapal pelacakan, masih kurang di banyak *port*. Situasi ini menciptakan peluang bagi teroris yang berusaha menyelundupkan senjata nuklir ke Amerika Serikat melalui kontainer dan dapat dengan mudah deteksi. Menurut sebuah penelitian, pada kenyataannya, probabilitas pemeriksa bea cukai untuk mendeteksi senjata nuklir atau prekursor terkait dengan *scanning* saat ini hanya sekitar 10% (Wein, 2003, hal. 24).

Untuk mengurangi kemungkinan sebuah senjata nuklir ke Amerika Serikat, maka kemungkinan deteksi harus meningkat secara signifikan. Jika tidak, teroris akhirnya akan berusaha untuk mengeksploitasi sistem ini, mengingat resiko yang relatif rendah sehingga senjata nuklir atau *dirty bomb* akan terdeteksi. Meskipun pemerintah AS melakukan investasi yang signifikan dalam keamanan nasional selama masa pertama pemerintahan Bush, ada bukti yang menunjukkan bahwa anggaran belum dialokasikan secara proporsional dengan ancaman.

Peningkatan yang signifikan untuk meningkatkan kewaspadaan secara nyata dengan memperkuat upaya untuk meningkatkan keamanan kargo dengan kontainer. Kebutuhan penting pertama adalah untuk

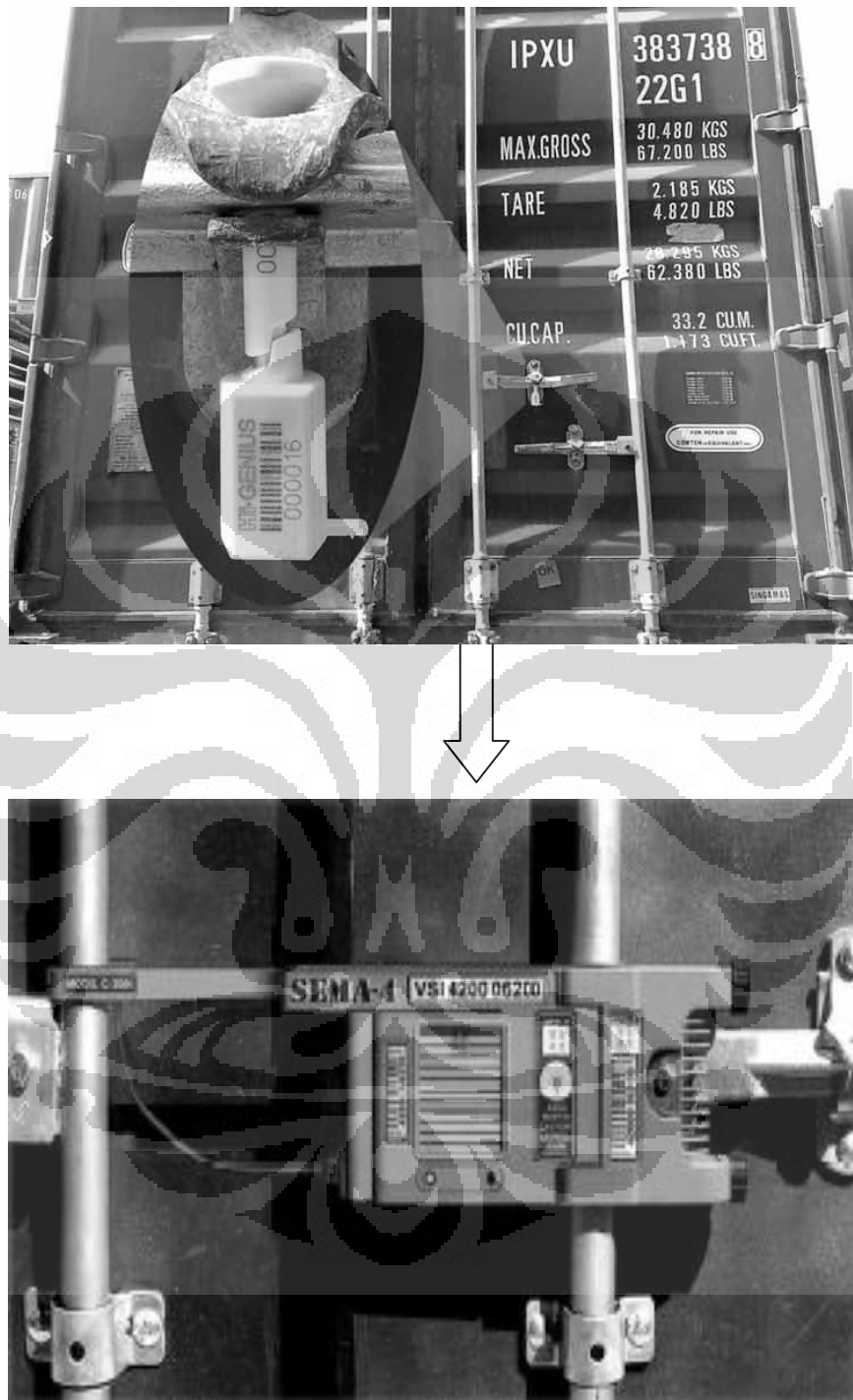
memastikan keamanan rantai pasokan global. Salah satu solusinya penggunaan perangkat keamanan multiguna yang akan diperlukan pada setiap kontainer pengiriman. Alat tersebut akan sesuai dengan standar internasional yang. Pertama, perangkat akan memiliki kemampuan deteksi untuk melindungi keamanan container dari pembukaan yang tidak sah. Selain itu, perangkat akan berisi peralatan deteksi radiasi dasar untuk mengidentifikasi keberadaan bahan nuklir. Serta perangkat keamanan juga akan berfungsi sebagai alat pelacak berbasis GPS untuk memantau lokasi wadah. Perangkat akan diuji melalui *radio frequensi* (RF) pada berbagai titik selama perjalanan, termasuk loading, embarkasi dan debarkasi, untuk memungkinkan petugas bea dan cukai untuk mengakses data yang dikumpulkan dan menentukan apakah sebuah container memiliki potensi ancaman atau tidak.

Biaya untuk membuat setiap *container* aman, dengan menanamkan suatu jenis teknologi segel saja dibutuhkan sedikitnya US \$ 500 per *container*. Jika terdapat 15 juta *container* diseluruh dunia maka dibutuhkan US \$ 7,5 Miliar atau Rp. 75 triliun. Ini hanya untuk mengamankan agar *container* tidak mudah dibuka oleh pihak yang tidak berwenang.

Setiap solusi untuk meningkatkan keamanan peti kemas harus memperhitungkan sifat komersial dari industri pelayaran. Dalam pertimbangan AS, perangkat \$ 200/\$500 yang awalnya mungkin tampak mahal dalam industri dengan margin relatif rendah, biaya perangkat keamanan tersebut akan menjadi murah pada produksi massal.

Salah satu cara untuk mengurangi dampak ekonomi dari langkah-langkah keamanan baru adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pemangku kepentingan dalam industri pelayaran maritim dipaksa menanggung sendirian. Sehingga Pengusaha harus menanggung biayanya agar tidak kehilangan kemampuan mereka untuk bersaing di pasar.

Gambar 2.1. Modernisasi Segel Container



Sumber: diambil dari <http://www.securtrack.com/SecurTrackProduct09.pdf> dan <http://www.unisto.co.uk/files/Seals/Hi-Genius-750.jpg> diakses tanggal 20 Juni 2012.

Selanjutnya setelah membahas tentang keamanan container secara fisik maka bagaimana CSI sebagai instrumen keamanan dioperasionalkan. Sebelumnya ada 4 (empat) hal yang menjadi elemen inti yaitu sebagai berikut (US CBP ,2006, hal. ii):

1. *Identify high-risk containers. CBP uses automated targeting tools to identify containers that pose a potential risk for terrorism, based on advance information and strategic intelligence.*
2. *Pre-screen and evaluate containers before they are shipped. Containers are screened as early in the supply chain as possible, generally at the port of departure.*
3. *Use technology to pre-screen high-risk containers to ensure that screening can be done rapidly without slowing down the movement of trade. This technology includes large-scale X-ray and gamma ray machines and radiation detection devices.*
4. *Use smarter, more secure containers, which will allow CBP officers at United States ports of arrival to identify containers that have been tampered with during transit.*

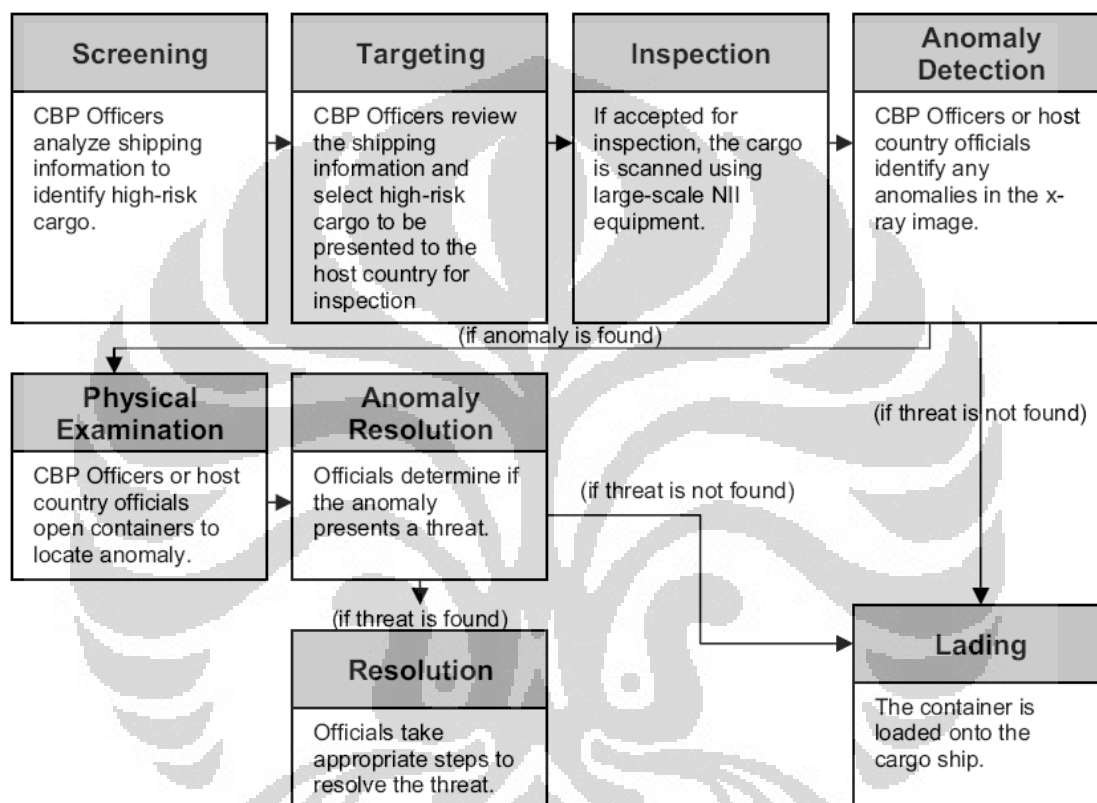
Mulai dari analisa sampai dengan pemberian respon kepada suatu *container* sebagaimana tersebut diatas maka akan diperoleh gambaran dalam sebuah alur teknis sebagaimana pada gambar 2.2.

Berdasarkan prosedur pemeriksaan kepabeanan seperti diatas, maka pada tataran normal maka US CBP hanya mampu memeriksa 2 persen dari keseluruhan barang yang masuk atau diimpor oleh AS dari berbagai negara setiap tahunnya. Pasca 9/11 US CBP mengungkapkan bahwa tidak mungkin untuk memeriksa barang impor yang masuk ke AS lebih dari 20 persen dari keseluruhannya (Walters, 2006, hal. 329). Selain itu, peningkatan pemeriksaan fisik kontainer dibatasi oleh tingginya lalu lintas perdagangan dan terbukti menimbulkan stagnasi.

Mengingat pengalaman ini, *US CBP* telah berusaha untuk menyeimbangkan fasilitasi perdagangan dengan pengawasan keamanan dengan menggunakan teknik manajemen risiko dalam rangka untuk menargetkan kontainer yang merupakan risiko tinggi gangguan teroris.

Penilaian risiko direkomendasikan oleh WCO. Hal ini juga menjadi dasar dari strategi pertahanan *pre-emptive* dengan memperluas batas pemeriksaan kepabeanan dengan memungkinkan US CBP untuk menilai risiko dari pengiriman kargo sebelum mereka mencapai pelabuhan kedatangan.

Gambar 2.2. Proses Pemeriksaan Container pada CSI

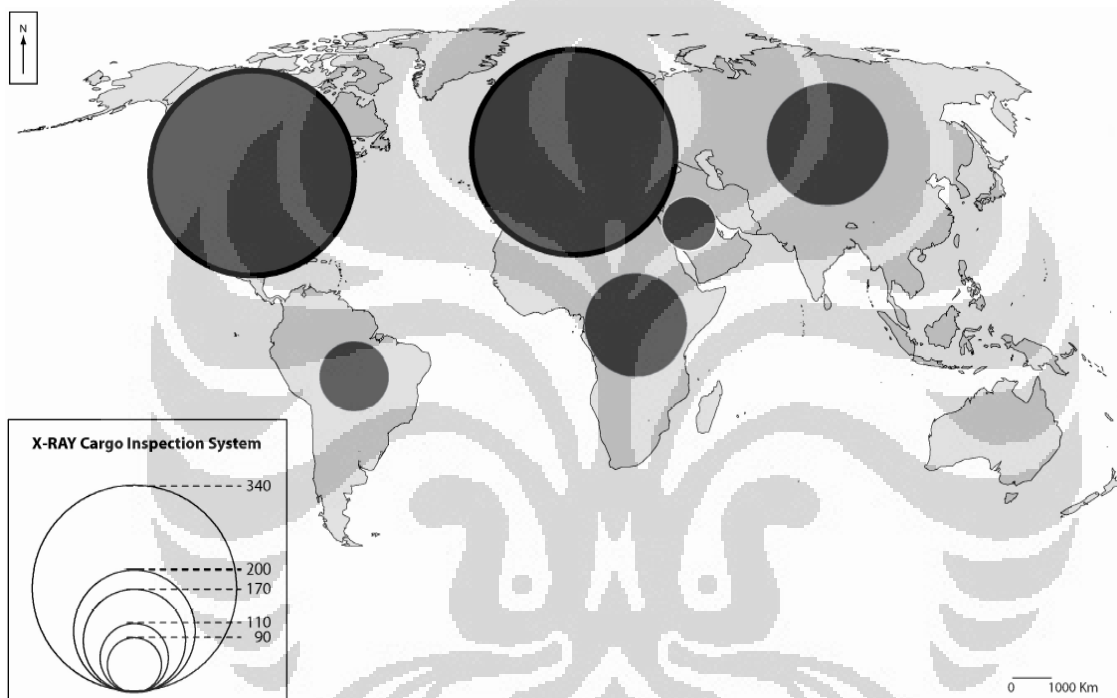


Sumber: Diolah dari *Office of Inspector General*. (2010, Februari). *CBP's Container Security Initiative Has Proactive Management and Oversight but Future Direction Is Uncertain*. Washington: U.S. Department of Homeland Security. pp.1.

Komponen pertama dari *Container Security Initiative* bertujuan untuk menghitung risiko pengirim sebelum memasuki Amerika Serikat. Ini terdiri dari dua elemen: pemberitahuan sebelum kargo kontainer dan pelaksanaan teknisnya. Namun demikian dalam mekanisme standar tersebut sebagaimana temuan unit pengendalian internal US DHS, standar tersebut memiliki beberapa benturan dengan beberapa kepabeanan negara yang telah mengimplementasikan CSI sehingga mengurangi efektifitasnya.

Pada gambar 2.3. menunjukkan kapasitas pelabuhan-pelabuhan besar untuk melakukan *scanning* kontainer. Hal ini dilakukan AS untuk menghitung kemampuan normal dan optimal masing-masing pelabuhan di setiap zona untuk menentukan negara target yang akan diprioritaskan untuk patuh terhadap CSI baik sukarela maupun dipaksa.

Gambar 2.3. Sebaran Kapasitas Mesin *Gamma-Ray* dan *X-Ray* dalam Proses *Container Scanning* Pelabuhan



Sumber: Diolah dari F., Alix,Y.,Joly,O. (2008). *Global Logistic Chain Security*. Brussel: World Customs Organization.pp.15.

2.1.3. Initialization Cost

CSI memerlukan biaya yang sangat besar, hal ini disebabkan tuntutan yang dipersyaratkannya, yang secara sederhananya kapasitas *port* yang ada sebelum CSI dibangun hanya untuk kapasitas pemeriksaan *container* pada tingkat 2-5%. Pemeriksaan yang minimal ini sebagai konsekuensi dari penerapan manajemen risiko di dunia kepabeanan. Dunia kepabeanan sebagai *front line* dalam pengawasan lalu lintas barang sebelum 9/11 didesain untuk tidak menghambat perdagangan. Peningkatan kapasitas pemeriksaan dari 2-5% menjadi 100% adalah sebuah lonjakan yang sangat

besar atau diperlukan kapasitas lebih 20 sampai dengan 50 kali dari yang secara regular telah dijalankan. Biaya terbesar ada pada awal implementasi CSI karena banyaknya belanja modal yang diperlukan.

Biaya tersebut kemudian disebut sebagai *initialization cost*, yang didefinisikan sebagai harga beli untuk peralatan, instalasi, uji coba operasional, pekerjaan teknik sipil, pelatihan bagi SDM yang akan mengoperasikan. Negara yang sepakat untuk mengimplementasikan CSI maka harus membeli peralatan dan membayar biaya perakitannya untuk sebuah peralatan yang terinstalasi seperti di gerbang impor AS. Estimasi biaya untuk menginstalasi sebuah *port* besar seperti *Rotterdam Port* Belanda atau *Los Angeles Port* AS, atau dibutuhkan hampir US \$ 4,5 juta atau setara dengan Rp. 4,5 triliun (Allison, Bennett, dan Chin, Y.Z , 2007, hal. 25). Biaya ini hanya terkait dengan peralatan belum termasuk perluasan pelabuhan dan infrastruktur lain yang mendukung.

2.2. Sanksi Ekonomi dalam Kebijakan Luar Negeri AS

Kebijakan GWOt memilih salah satu instrumen utamanya adalah *economic statecraft*. *Economic statecraft* dipahami oleh para pengambil keputusan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan *military craft* dalam memenangi suatu agenda politiknya. Pemerintah AS telah menggarap kebijakan ekonominya untuk kebijakan GWOt ini dengan langkah-langkah seperti perdagangan preferensial, penghapusan sanksi yang ada, ditambah dengan pinjaman untuk menghargai sekutu, dan sanksi baru untuk mengintimidasi. Dalam kebijakan GWOt ini, sanksi ekonomi digunakan sebagai *stick and carrot* (*positive dan negative sanction*).

Sanksi ekonomi saja tidak mungkin akan menghalangi kelompok teroris, namun sanksi ekonomi menyebabkan negara pendukung kelompok terorisme untuk berpikir ulang untuk memperluas dukungannya terhadap kelompok terorisme. Ekstradisi dua tersangka Pan Am oleh Libya menggambarkan sebuah perubahan penting dalam kebijakan negara yang salah satunya disebabkan adanya sanksi ekonomi.

Langkah pertama dalam kebijakan GWoT adalah memastikan bahwa semua akses keuangan kelompok terorisme terputus dan dibekukan. Pada tanggal 23 September 2001, AS membekukan semua aset terorisme secara individu ataupun kelompok dan organisasi yang diindikasikan melakukan penggalangan dana untuk kelompok terorisme, sehingga melemahkan jaringan keuangan jaringan Al Qaeda. Untuk mengkoordinasikan kegiatan tersebut AS menciptakan *Foreign Terrorist Asset Tracking Center* dibawah Departemen Keuangan AS, untuk melakukan pelacakan aset teroris di luar negeri.

Langkah-langkah ini melanjutkan tradisi dari upaya kontraterorisme AS terakhir. Kebijakan kontraterorisme AS sebenarnya kembali ke 1970-an, yang telah banyak berorientasi sanksi. Pada 1970-an dan 1980-an, kebijakan kontraterorisme AS terutama difokuskan pada negara yang mendukung terorisme global. Negara sponsor terorisme dimaksud adalah Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, Sudan, dan Suriah. Negara-negara tersebut kemudian dikenakan sanksi yang berbeda-beda mulai dari pembatasan ekspor, embargo senjata, larangan bantuan luar negeri, membatasi atau melarang impor barang dan jasa dari negara target, larangan melakukan transaksi keuangan dengan negara target, tidak memperoleh pinjaman atau bantuan keuangan dari badan internasional, tidak mendapatkan *Generalized System of Preferences* dalam perdagangan.

Berikutnya akan diuraikan beberapa sanksi terkait penerapan sanksi ekonomi dalam strategi kontra terorismenya berdasarkan penelitian Hufbauer. Pertama, Iran telah ditambahkan ke dalam daftar negara sponsor terorisme pada tahun 1984 sebagai tanggapan atas dugaan keterlibatan Iran dalam pemboman pangkalan Marinir AS di Lebanon. Iran dijatuhkan sanksi larangan untuk semua impor dari Iran dan ekspor barang ke Iran untuk barang yang berpotensi untuk pemanfaatan militer. Pada tahun 1992, sanksi tersebut dicabut (Hufbauer, Schott, dan Elliot, 2007, hal.125-148).

Namun pada tahun 1995 Presiden Clinton menjatuhkan serangkaian sanksi ekonomi karena proliferasi nuklir dan dukungan Iran pada kelompok-kelompok teroris. Sanksi ini menetapkan pelarangan untuk semua perdagangan AS, investasi, dan transaksi keuangan dengan Iran. Selain itu,

warga dan perusahaan AS dilarang membiayai proyek-proyek pengembangan minyak di Iran yang diperpanjang sampai dengan 2001. Pada tahun 1999 dan 2000, pemerintahan Clinton mencabut sanksi terhadap Iran dipilih untuk memberikan sinyal dukungan untuk reformasi oleh Presiden Mohammad Khatami. Berdasarkan laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tahun 2000, Iran tetap menjadi paling aktif sebagai negara sponsor terorisme global. Dengan kata lain, 20 tahun sanksi ekonomi AS gagal mengurangi kesediaan Iran untuk tidak mensponsori jaringan terorisme.

Kedua, Irak pertama kali ditempatkan dalam daftar negara sponsor terorisme pada bulan Desember 1979 dan dihapus pada tahun 1982. Setelah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990, Departemen Luar Negeri menempatkannya kembali sebagai negara sponsor terorisme. Sanksi AS dan PBB menghambat kemampuan Irak untuk mengembangkan senjata berteknologi tinggi seperti senjata nuklir atau senjata biologi. Berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2000 melaporkan bahwa Irak tetap mensponsori terorisme dan menawarkan *safety house* kepada Front Pembebasan Palestina dan Abu Nidal. Selanjutnya, pasca 9/11 diungkap adanya komunikasi Irak dengan salah satu pembajak (Mohammed Atta) dan juga adanya kemungkinan yang kuat pelaku serangan terror anthrax.

Ketiga, Libya memiliki sejarah panjang mensponsori terorisme internasional dan ditempatkan dalam daftar terorisme pertama pada Desember 1979. Kontrol ekspor diikuti oleh larangan impor minyak mentah dari Libya, pembatasan ekspor peralatan gas dan teknologi tinggi, dan kemudian larangan impor produk minyak sulingan. Libya diduga terlibat dalam serangan teroris di bandara di Roma dan Wina, sehingga AS menetapkan embargo ekonomi penuh pada tahun 1986.

Namun tahun 2000 terorisme Libya telah berkurang banyak setelah penerapan sanksi PBB. Sementara Libya telah membuat kemajuan mencapai tuntutan AS, pemerintahan Bush bersikeras bahwa sanksi sepihak AS akan tetap berlaku sampai Libya menerima tanggung jawab atas pemboman Am Pan, mengkompensasi para korban, dan menolak semua dukungan untuk terorisme. Keberhasilan sanksi PBB dalam kasus Libya menunjukkan bahwa

sanksi ekonomi, jika dikenakan secara multilateral, dapat mencapai tujuan kebijakan yang jelas dan relatif sederhana, digambarkan oleh ekstradisi Pan dua tingkat menengah Apakah tersangka.

Keempat, Suriah telah di daftar terorisme sejak didirikan pada Desember 1979. Meskipun dikenakan kontrol ekspor yang ketat dan pembatasan ekonomi lainnya karena posisinya dalam daftar terorisme, sebagian besar perdagangan dan investasi AS dengan Suriah diperbolehkan. Meskipun penunjukan sebagai negara, Suriah menikmati relatif hubungan normal dengan Amerika Serikat.

Menurut sumber Departemen Luar Negeri, tidak ada bukti keterlibatan Suriah langsung di atau dukungan atas tindakan teroris sejak 1986. Namun, Suriah terus mendukung dan memberikan *safe haven* kepada Hizbullah dan Hamas, antara lain kelompok teroris Palestina. Pada tahun 2000 Amerika Serikat menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Suriah sebagai bagian dari Kasus berkelanjutan 86-1 atas dukungan Suriah terorisme dan mengejar rudal dan senjata pemusnah massal (WMD) program.

Pada tahun 2011, Amerika Serikat dan Eropa meluncurkan sebuah kasus baru sanksi atas penindasan kekerasan demonstrasi sipil terhadap rezim Assad. Dalam kasus sebelumnya, pada Mei 2004, Presiden George W. Bush mengeluarkan *Executive Order 13338*, menerapkan ketentuan dalam UU Akuntabilitas Suriah, termasuk membekukan aset individu tertentu, larangan amunisi dan menggunakan item ganda, larangan ekspor ke Suriah selain makanan dan obat-obatan, dan larangan pendaratan pesawat Suriah di atau penerbangan di Amerika Serikat.

Sanksi juga diperlukan lembaga keuangan AS untuk memutuskan rekening koresponden dengan Bank Komersial Suriah karena masalah pencucian uang. Pada bulan April 2006, Amerika Serikat yang ditunjuk Bank Komersial Suriah sebagai lembaga keuangan keprihatinan pencucian uang utama dan memerintahkan bank-bank AS untuk memutuskan semua hubungan dengan lembaga. Pada bulan Februari 2008, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap Suriah, membekukan aset individu tambahan. Kasus terbaru sanksi terhadap Suriah ditujukan terhadap Presiden Bashar al-Assad

dan pemerintahannya, dalam menanggapi penggunaan kekuatan brutal terhadap warga sipil.

Sanksi dilaksanakan pada April 2011 oleh Amerika Serikat dan pada bulan Mei 2011 oleh Uni Eropa. Sebuah analisis rinci kasus ini tersedia di sini. Rezim Assad terus menggunakan kekerasan terhadap warga sipil. Pada bulan April 2012, PBB menjadi perantara gencatan senjata dan pengamat militer PBB dikirim ke Suriah untuk memantau kepatuhan. Suriah tidak mematuhi gencatan senjata dan, pada tanggal 19 April Sekjen PBB Ban Ki-moon mengumumkan bahwa Suriah telah gagal untuk melaksanakan setiap aspek dari rencana perdamaian. Militer Suriah terus menggunakan kekuatan mematikan terhadap warga sipil.

Selanjutnya, Sudan pada tahun 2000 mengisyaratkan kesediaannya untuk bekerja sama dengan upaya kontraterorisme internasional tak lama setelah Departemen Luar Negeri AS, menambahkan Sudan ke daftar negara sponsor pada bulan Agustus 1993. Di bawah tekanan AS, Sudan juga mengusir Osama bin Laden pada tahun 1996. Namun demikian, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi komprehensif tentang Sudan karena penganiayaan sipil di Sudan selatan. Preempting tindakan kongres, Presiden Clinton mengeluarkan *Executive Order 13067* pada bulan November 1997, memblokir semua milik pemerintah Sudan di Amerika Serikat, memberlakukan embargo perdagangan, dan melarang transaksi dengan Sudan.

Pada akhir 2000, Sudan telah menandatangani semua 12 konvensi internasional untuk memerangi terorisme dan mengambil beberapa langkah positif lainnya. Namun, Sudan belum memenuhi tiga Keamanan PBB Resolusi Dewan disahkan pada 1996. Resolusi ini menuntut ekstradisi tiga tersangka dalam upaya pembunuhan terhadap Presiden Mesir Hosni Mubarak pada tahun 1995 dan meminta bahwa Sudan akhirnya semua dukungan untuk teroris. Resolusi memaksakan perjalanan terbatas dan sanksi diplomatik, dan (dalam teori saja) membatasi penerbangan internasional masuk dan keluar dari Sudan.

Kuba, yang telah berada di bawah sanksi komprehensif AS sejak 1960, telah ditambahkan ke dalam daftar negara sponsor pada tahun 1982, terutama

karena dukungannya bagi organisasi gerilya M-19 di Kolombia. Meskipun rezim Castro sangat aktif dalam memberikan senjata dan pelatihan dengan organisasi teroris sayap kiri selama Perang Dingin, Kuba tidak lagi aktif dalam mendukung perjuangan bersenjata di seluruh dunia. Kuba, bagaimanapun, tetap dalam daftar teroris karena terus memberikan *safe haven* kepada teroris individual dan memelihara hubungan dengan pemberontak Amerika Latin.

Korea Utara mirip dengan Kuba, Korea Utara telah dikenakan sanksi AS yang komprehensif selama beberapa dekade (memang sejak Perang Korea). Korea Utara telah ditambahkan ke dalam daftar negara sponsor terorisme karena keterlibatannya dalam pemboman sebuah pesawat Korea Selatan pada November 1987. Meskipun Korea Utara telah beberapa kali secara terbuka mengutuk semua bentuk terorisme, tetap dalam daftar negara sponsor karena terus memberikan perlindungan kepada teroris internasional.

Afghanistan dinyatakan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1999 ditandai sebagai "*safe haven* utama bagi teroris". Tapi negara itu tidak pernah ditetapkan sebagai negara pendukung terorisme karena penentuan ini akan merupakan pengakuan *de facto* terhadap Taliban sebagai pemerintah yang sah di Afghanistan. Karena teroris fundamentalis Islam terus melatih dan beroperasi dari Afghanistan, dan lebih khusus karena Taliban terus melindungi Osama bin Laden dan jaringan teroris yang diyakini bertanggung jawab atas pemboman dua kedutaan besar AS di Afrika, pemerintahan Clinton menjatuhkan sanksi komprehensif tentang Taliban pada tahun 1999.

Melarang semua perdagangan dengan daerah di Afghanistan di bawah kontrol Taliban, membekukan aset Taliban di Amerika Serikat, dan dilarang kontribusi keuangan kepada Taliban. PBB mendukung upaya AS, memberlakukan larangan terbang, dan membekukan aset Taliban di luar negeri. Setahun kemudian, PBB juga memberlakukan embargo senjata dan memerintahkan pembekuan aset bin Laden dan semua anggota Al Qaeda.

Meskipun Somalia tidak terdaftar sebagai negara pendukung terorisme, pemerintahan Bush prihatin pusat teroris di Somalia dan menganggap negara itu sebagai tempat yang aman kemungkinan alternatif bagi Osama bin Laden dan rekannya-jika mereka meninggalkan Afghanistan. Somalia telah tanpa

pemerintah pusat sejak yang terakhir presiden Mohamed Siad Barre meninggalkan negeri ini pada tahun 1991 dan pertempuran interfactional kemudian menyebabkan disintegrasi nasional. PBB turun tangan pada tahun 1992 dan memberlakukan embargo senjata lemah ditegakkan. Amerika Serikat menutup kedutaannya dan berakhir partisipasinya dalam misi PBB di Somalia pada tahun 1994. Menurut laporan intelijen AS Somalia telah menjabat sebagai basis regional bagi operasi Al Qaeda sejak 1993, ketika Osama bin Laden pertama memberikan bantuan kepada panglima perang Mohamed Aideed (pasukan Aideed menewaskan 18 tentara AS yang bertugas di misi penjaga perdamaian PBB). Al-Qaeda juga mempertahankan hubungan dekat dengan kelompok Islam radikal Somalia Al-Itahaad.

Kebijakan AS terhadap negara sponsor terorisme menunjukkan sanksi sepihak AS. Meskipun beberapa dekade, sanksi ekonomi digunakan dan dikenakan pada mayoritas negara-negara sponsor yang tetap menjadi tempat kelompok teroris berkembang. Keberhasilan sanksi sepihak AS berdasarkan evaluasi terhadap laporan Departemen Keuangan AS menurun tajam pada dekade terakhir. Tingkat keberhasilan dari semua kasus sanksi AS atau menjadi bagian dari sanksi di kisaran 25 persen.

Meskipun pengalaman Departemen Keuangan AS dengan OFAC untuk mengelola sanksi keuangan, sebelum 9/11 tidak mencapai tingkat sukses yang rendah untuk menghentikan aliran uang kepada organisasi teroris tidak terlalu sukses. Tahun 2000 laporan Departemen Keuangan AS mengungkapkan bahwa hanya \$ 301.146 aset teroris yang dapat dibekukan dalam aset organisasi teroris asing yang ditetapkan di Amerika Serikat. Tantangan utama untuk program pembekuan aset adalah untuk mengidentifikasi dana milik individu, pemerintah, dan organisasi ditargetkan.

Meskipun sarana pelacakan aset keuangan telah sangat meningkat. Bahkan ketika dana individu dapat diidentifikasi, kerahasiaan dan kecepatan sangat penting dalam mencegah target bergerak aset ke nomor rekening di pusat-pusat perbankan lepas pantai. Sayangnya, kerahasiaan dan kecepatan tidak mudah dikoordinasikan. Pentingnya kerjasama baik diilustrasikan oleh laporan pers belakangan ini bahwa PBB, AS, dan Uni Eropa daftar ditargetkan

individu dan organisasi yang terkait dengan Taliban dan Osama bin Laden tidak cocok.

Setelah serangan pada 11 September, penegakan hukum difokuskan tajam pada jalur keuangan jaringan terorisme. Mendeklarasikan darurat nasional terhadap aksi terorisme, Presiden Bush menggunakan kekuasaannya di bawah IEEPA pada 23 September 2001 untuk memperluas otoritas yang ada dalam beberapa cara. Pertama, perintah eksekutif baru memperluas cakupan perintah eksekutif masa lalu dari terorisme di Timur Tengah untuk terorisme global. Kedua, memperluas kelas kelompok ditargetkan untuk mencakup semua pihak yang terkait dengan kelompok teroris yang ditunjuk. Ketiga, membentuk kemampuan untuk memblokir aset AS, dan menolak akses ke pasar AS, bank asing yang menolak untuk membekukan aset teroris.

Kesulitan lain dalam aset teroris beku adalah bahwa kelompok-kelompok dapat mentransfer uang di luar sistem perbankan baik secara tunai atau melalui jalan-sudut sistem pertukaran uang. Selanjutnya, tidak seperti pengedar narkoba yang mengendalikan bisnis yang sah untuk mencuci keuntungan ilegal, dalam kasus terorisme uang, bisnis yang sah dan amal dapat mengalihkan sebagian dana mereka untuk mendukung kelompok teroris. Bukti kuat bahwa uang sedang dialihkan untuk kegiatan teroris sulit didapat. Juga, jumlah yang terlibat dalam kegiatan teroris yang jauh lebih kecil daripada di perdagangan narkoba dan karena itu cenderung tidak menarik perhatian.

Ancaman sanksi AS mengirimkan pesan penting tentang tingkat komitmen AS untuk bank asing. Namun demikian, upaya sebelumnya untuk memperpanjang berlakunya sanksi AS untuk negara-negara ketiga selalu diperdebatkan. Koordinasi upaya dalam G-7 dan Dewan Keamanan PBB akhirnya dapat terbukti lebih sukses dalam mengamankan kerjasama internasional dari ancaman sanksi ekonomi sekunder.

Memang, kerja sama internasional secara dramatis ditingkatkan dengan upaya AS pasca 11 September mungkin telah membuat perbedaan terbesar dalam hal melacak aset teroris sejauh ini. Menurut sebuah rilis pers 11 Oktober oleh Departemen Keuangan, 102 negara telah berkomitmen untuk

bergabung dengan upaya untuk mengganggu aset teroris, dan 62 negara telah menempatkan memblokir perintah berlaku. Teroris aset yang dibekukan di luar negeri sebagai berikut: Jerman \$ 3.700.000, Bahama \$ 20.000.000, Belanda \$ 550.000, Inggris: \$ 88.000.000 (termasuk aktiva Taliban dibekukan sebelum 9/11).

Untuk lebih meningkatkan efektivitas sanksi keuangan, langkah-langkah lain yang mungkin dianggap meliputi: (1) menempatkan agen rahasia di bank di negara yang tidak bekerja sama dengan penegak hukum AS dan persyaratan pelaporan, (2) pelacakan yang lebih agresif bahkan transfer uang sebesar \$ 20.000 atau kurang, untuk imigran yang tinggal di Amerika Serikat, dan (3) penyediaan hadiah besar untuk menghargai pengungkapan dana teroris.

2.3. Kebijakan Ekonomi Luar Negeri AS Pasca 9/11

Pasca 9/11 nampak adanya tekanan keamanan terhadap kebijakan ekonomi luar negeri AS, hal ini didukung banyak penelitian yang menyatakan bahwa presiden memiliki keunggulan strategis dalam mengendalikan kebijakan luar negeri AS dalam agenda GWoT Presiden Bush. Presiden memiliki informasi yang lebih berkualitas sehingga memungkinkannya untuk memobilisasi tekanan terhadap suatu agenda kebijakan yang dipilihnya (Wrone, Howell dan Lewis, 2008 hal.1-16).

Selanjutnya terkait kebijakan ekonomi luar negeri, Krasner menjelaskan bahwa setiap keputusan ekonomi akan cenderung mempengaruhi secara diferensial, yang memiliki kecenderungan menciptakan konflik, maka untuk memahami mengapa suatu kebijakan diambil diperlukan pemahaman tentang motivasi dan persepsi pengambil keputusan (Krasner, 1978, hal. 70). Penelitian Milner dan Tingley (2011) menunjukkan bahwa faktor ekonomi politik dan ideologi secara sistematis mempengaruhi keputusan pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan *foreign aid* dan perdagangan.

Tekanan keamanan nasional AS yang luar biasa selama kebijakan GWoT setidaknya dalam jangka pendek telah mampu menyatukan kepentingan para pengambil keputusan domestik AS (Fleck dan Kilby, 2010,

hal 185-197). Dengan demikian didapatkan penjelasan dari variasi dalam kebijakan ekonomi luar negeri AS, yang menekankan kemampuan eksekutif untuk mengendalikan agenda kebijakan luar negeri, khususnya ketika masalah keamanan. Davis (2009, hal. 10) menjelaskan kepentingan keamanan mendorong negara untuk menawarkan *side payment* kepada sekutunya. AS akan menyelaraskan kebijakan ekonomi asing dengan kepentingan keamanan.

Pengalihan bantuan luar negeri AS dalam penelitian Moss, Rood dan Standly (2005, hal. 1) ditunjukkan bahwa agenda memerangi kemiskinan dalam GWoT, karena adanya keyakinan hubungan yang positif antara kemiskinan sebagai pemicu terorisme, memiliki keselarasan dengan negara target pada kebijakan GWoT, dimana secara geopolitik negara-negara tersebut berbatasan. Bukti lainnya adalah keputusan AS untuk menanggukkan pergeseran bantuan ekonomi dari Yordania karena dianggap sebagai sekutu yang mendukung tujuan strategis AS di kawasan timur tengah. Kebijakan ekonomi luar negeri AS telah dijadikan sebagai fungsi dari pergeseran prioritas keamanannya. Dalam konteks pasca 9/11, AS bergantung pada berbagai sekutunya untuk mendukung GWoT, dengan memanipulasi kebijakan ekonomi luar negerinya sebagai sarana untuk melibatkan mitra keamanannya di negara berkembang. Baldwin (1985, hal. 45) menyatakan bahwa dalam setiap upaya untuk mempengaruhi target, kebijakan luar negeri suatu negara akan mengejar lebih dari satu tujuan.

Terkait dengan hubungan antara Al Qaeda dengan sebagian besar gerakan gerilyawan Islam, permintaan kerja sama *counter terrorism* tumpang tindih dengan menuntut kerja sama *counter insurgent*. Tuntutan untuk kerjasama keamanan bilateral dapat dibedakan menjadi tiga yaitu (1) AS diperlukan untuk bermitra secara intensif dengan berbagai negara *front-line* (Afghanistan, Aljazair, Mesir, Indonesia, Iraq, Jordan, Libya, Morocco, Pakistan, Philipina, Saudi Arabia, Somalia dan Yaman), negara-negara di mana Al Qaeda dan afiliasinya beroperasi atau negara di mana pemberontakan muslim sedang berlangsung dan gerakan ini diduga didukung oleh Al Qaeda (Byman, 2006, hal. 767-811) (2) AS harus bekerjasama dengan negara-negara dengan jarak yang dekat dengan negara *front-line* (Bahrain, Djibouti, Kuwait,

Kyrgyzstan, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Tajikistan, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan, dimana AS memungkinkan untuk melakukan pergelaran pasukan militer (*military deployment*) (Byman, 2006, hal. 767-811), (3) Negara yang mendukung operasi AS baik secara materi maupun secara simbolis, yang pasukannya ikut serta dalam empat operasi di Iraq (di Afghanistan: Philipina, Selandia Baru, Pakistan, Rusia, Korea Selatan, Australia, Honduras, Hungaria, Italia, Jepang, Yordania, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania).

Tujuan dari kebijakan ekonomi luar negeri AS dengan dimensi keamanan dalam hubungan ini adalah untuk meningkatkan kemungkinan adanya kesepakatan dengan agenda GWoT AS (Davis, 2009, hal. 143-179). AS secara tidak proporsional telah mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi terkait keamanan dan fungsi aliansi, sedangkan keuntungan ekonomi yang asimetris diperoleh oleh negara target. Walaupun menurut penelitian Hsu (2011) bahwa tingkat keterlibatan bilateral ekonomi AS berhubungan positif dengan kepentingan AS untuk membentuk aliansi keamanan namun bervariasi dari waktu ke waktu dan berbeda di setiap negara target. Dalam upaya menguatkan isu kepentingan nasional, Krasner(1978) mencatat AS seringkali akan menghadapi pihak-pihak yang berseberangan baik di dalam negerinya atau pun mitranya seperti Inggris. Irak dijadikan Bush sebagai sebuah sasaran utama dalam GWoT, dan berdasarkan Komisi 9/11 tidak terbukti adanya hubungan Al Qaeda dan Irak sebelum invasi 2003.

Pasca 9/11, Pakistan terpilih sebagai sekutu utama dalam GWoT AS sehingga kebijakan AS terhadap Pakistan melalui bantuan ekonomi dan perdagangan sebagai alat strategis kebijakan luar negeri AS. Menurut penelitian Hsu (2011) menunjukkan keseluruhan bantuan AS ke Pakistan secara parallel dengan naik turunnya intensitas kepentingan AS di Pakistan. Hal ini juga dapat dilihat dari kenaikan yang sangat drastis bantuan ekonomi AS pasca 9/11, pada tahun 2001 dan 2002 saja lebih dari 1 miliar dolar AS, dibanding 8 tahun sebelumnya yang hanya puluhan juta dolar AS saja. Hal

Secara khusus, posisi strategis Pakistan yang berbatasan dengan Afghanistan dan Presiden Musharraf yang bersedia dalam bawah tekanan

yang besar dari AS untuk mendukung operasi militer AS dilengkapi dasar pemikiran untuk bantuan baru (Iseby, 2008, hal. 10-12). Antara 2002 dan 2010, Pakistan menerima sebesar \$ 6,5 miliar dalam paket bantuan ekonomi, belum termasuk lebih dari \$ 13 miliar pada bantuan militer (Epstein dan Kronstadt, 2011, hal. 10).

AS berusaha untuk memberikan preferensi perdagangan ke Pakistan dengan alasan pertama, kemungkinan bahwa ketika operasi AS di Afghanistan berlangsung akan menurun produksi tekstil Pakistan dan ekspor pakaianya karena tekstil dan industri pakaian mempekerjakan lebih dari 60 persen tenaga kerja Pakistan dan ekspor ke Amerika Serikat saja mencapai \$ 2 milyar pada tahun 2001.

Kedua, AS percaya bahwa perdagangan konsesi akan meningkatkan popularitas Musharraf di dalam negeri yang mendorong kerjasama pemerintahnya dengan Amerika Serikat melawan Taliban. Jika AS dapat memberikan konsesi perdagangan yang sebanding dengan pengorbanan ekonomi AS ke Pakistan akan mempermudah Pemerintah AS mendapatkan persetujuan di kongres AS yang seringkali kritis dengan kebijakan pemerintah.

Ketiga, AS berpikir bahwa perdagangan konsesi memiliki nilai simbolis. Kedatangan AS dengan bantuan ekonomi yang bukan melalui pemerintah, bisa meningkatkan citra AS di Pakistan. Pada awal September 24, 2001, pemerintahan Bush mulai mengurangi tarif dan memperluas kuota pada berbagai barang impor dari Pakistan. Menurut data Departemen Perdagangan AS, Pakistan peringkat pertama pada impor AS di kategori kapas, kain, lembaran kapas dan sarung bantal, dan membuat Pakistan pemasok terbesar ke-empat pada tekstil dan pakaian. Dan total impor AS dari Pakistan meningkat dari 100 jutaan dolar AS pada 2001 menjadi 200 jutaan dolar AS pada tahun 2008.

BAB 3

FAKTOR YANG Mendukung *CONTAINER SECURITY INITIATIVE* SEBAGAI *ECONOMIC STATECRAFT*

Dalam bahasan ini akan dibahas tentang faktor yang mendukung pilihan pengambil keputusan AS terhadap *Container Security Initiative* (CSI) , dimana penulis menguraikan 2 (dua) faktor *threat* yang mempengaruhinya. Faktor pertama yang akan diuraikan terkait dengan ancaman serangan terorisme oleh Al Qaeda termasuk membahas tentang kapabilitas dan dukungan keuangannya sedangkan faktor kedua terkait dengan *deficit balance of trade* AS yang menjadi salah satu penyebab resesi ekonomi pada tahun 2001, yang menguraikan bagaimana penyesuaian kebijakan pengurangan importasi AS dan kecenderungan pilihan pada kebijakan *non tariff trade barrier* dengan mendasarkan kebijakan strategik *Global War on Terrorism* AS.

3.1. Potensi Ancaman Serangan Terorisme terhadap Perdagangan Internasional

Shipping system laut telah menjadi bagian yang vital dalam perdagangan internasional. Selain kemampuang pengangkutannya yang sangat besar namun juga biayanya paling murah. *Containerized* muncul untuk meningkatkan kapasitas sarana pengangkut (kapal) sehingga dapat mengangkut barang pada kapasitas optimalnya. Munculnya *container* (peti kemas) selama setengah abad telah memungkinkan produksi dari suatu negara dapat dikonsumsi di pasar negara yang lainnya. Menurut *Maritime Intelligence Group analyst* (2005, hal. 1) terdapat 112.000 kapal dagang, 6.500 *port* dan fasilitas pelabuhan, dan 45.000 biro pengiriman yang menghubungkan sekitar 225 pesisir, daerah jajahannya, pulau, dan negara. *Shipping system* ini melayani sekitar 80 persen dari angkutan komersial, termasuk 15 juta *container*.

Lebih dari separuh dari semua peti kemas masuk ke Amerika lewat pelabuhan Los Angeles dan Long Beach. Jika terdapat gangguan pada pelabuhan ini dapat merusak ekonomi AS. Jaringan terorisme bisa menggunakan rantai pasokan *container* untuk memberikan senjata CBRN untuk setiap lokasi di Amerika Serikat. Suatu skenario dikembangkan oleh

RAND apat disusun untuk menunjukkan keragaman ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*), dan potensi konsekuensi (*consequences*) dari serangan teroris pada pengiriman *container* seperti meledakkan sebuah bom nuklir: *container* digunakan untuk mengangkut nuklir ke pelabuhan dekat sebuah kota dan akan meledakkan pada saat kedatangan. *Container* mungkin tiba di tempat tujuan di mana akan diledakkan di kapal atau melalui moda antara lainnya seperti truk atau kereta api (Gordon, Moore, Richardson dan Pan, 2005, hal. 262-286).

Setidaknya ada tiga faktor yang daya tarik mengapa *container* menjadi sarana serangan bagi terorisme. Pertama, sistem pengiriman *container* merupakan target yang mudah dan berisiko rendah. Rantai pasokan *container* sangat mudah diakses dan cukup fleksibel. Karakteristik ini telah memberi kontribusi pada pengembangan yang sangat dinamis pada efisiensi jaringan transportasi ekspor-impor yang juga menciptakan peluang untuk penyalahgunaan oleh kelompok terorisme. *Container* sangat penting ekonomi global, tindakan pengawasan untuk meningkatkan keamanan tidak berdampak signifikan terhadap pergerakan barang; kebanyakan ahli mengakui bahwa memeriksa semua atau bahkan sebagian besar kargo yang masuk tanpa mengganggu perdagangan akan sangat sulit dan mahal. Saat ini, hanya 2% sampai 5% dari *container* yang diperiksa di pelabuhan seluruh dunia, bahkan di fasilitas yang dilengkapi dengan peralatan canggih *x-ray* atau *gamma ray scanning technologies* (Frittelli, 2004, par 1-2). Karena *container* relatif sedikit di-*scan* atau diperiksa, dikhawatirkan bahwa teroris bisa dengan mudah menggunakan sistem untuk tujuan-tujuan mereka.

Kedua, sistem pengiriman *container* mampu mengangkut secara efisien senjata pemusnah untuk setiap lokasi di dunia. *Container* dapat dengan mudah dipindahkan ke moda lain tanpa dicurigai, melewati gerbang pelabuhan, selanjutnya melakukan perjalanan di jalan raya atau kereta api yang dioptimalkan untuk mengangkut barang dengan cepat dan efisien. Sebuah perangkat sensor yang mampu dikendalikan dengan teknologi *global positioning system* (GPS) yang tertanam dalam *container* bisa diprogram

untuk diledakkan sesaat mencapai daerah dengan penduduk padat atau simbol ekonomi atau politik.

Ketiga, sebuah serangan pada sistem pengiriman *container* bisa menimbulkan kerusakan ekonomi yang signifikan. Pelabuhan sangat penting dalam rantai pasokan global dan lokasi utama di mana *container* beralih dari laut ke angkutan darat. Gangguan pada sistem transportasi angkutan dapat berdampak pada seluruh sistem ekonomi. Selain itu, pelabuhan biasanya berada di daerah padat penduduk, sehingga ledakan sebuah bom di pelabuhan juga memiliki kemampuan untuk menyebabkan banyak kematian. Kerentanan sistem pengiriman *container* menciptakan banyak kesempatan untuk infiltrasi teroris. Setiap pengiriman melibatkan banyak pihak dari eksportir/importir, *forwarder*, *customs broker*, pemeriksa cukai, sopir truk, pekerja kereta api, pekerja dermaga, dan para awak pengumpan dan kapal laut. Kapanpun dan dimanapun *container* ditangani selama gerakan merupakan potensi kerentanan untuk keamanan kargo. Teroris dapat mengeksploitasi kerentanan untuk *container* diisi dengan senjata atau dengan memodifikasi isinya

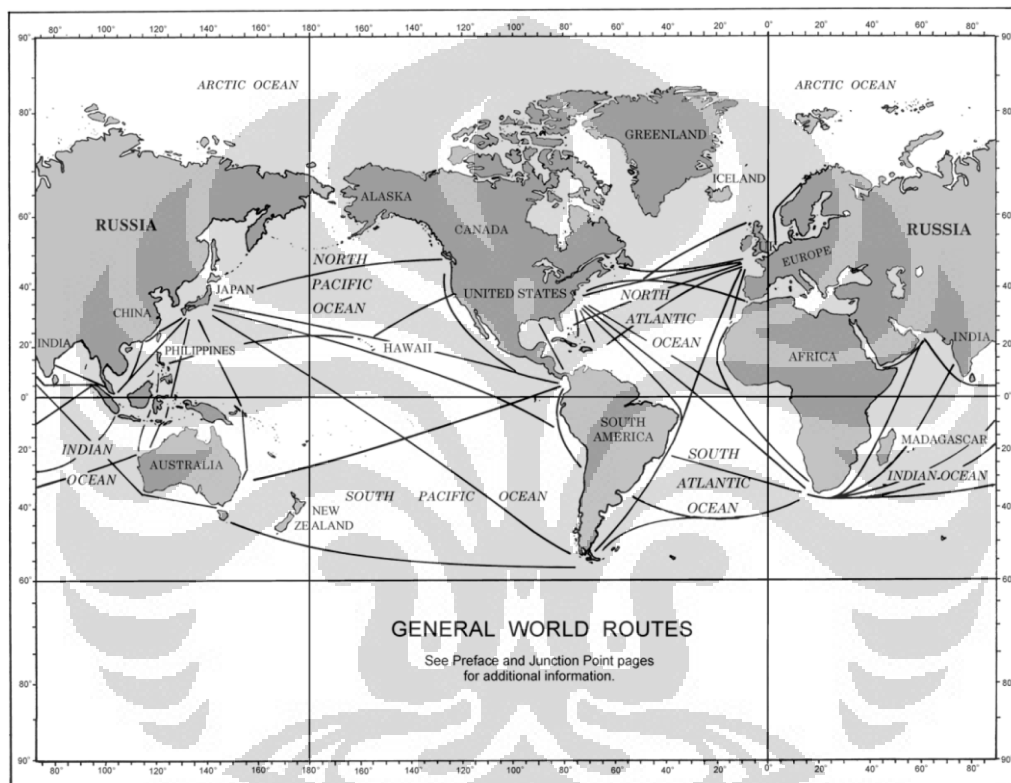
Ledakan tersebut tidak perlu membunuh banyak orang untuk memiliki efek ekonomi yang signifikan. Gordon (2005, hal. 25) menyebutkan bahwa dua bahan peledak mengandung radioaktif berkekuatan tinggi seberat 5 pound dapat mencemari area 2-5 km persegi. Tergantung pada jumlah bahan radioaktif yang terkandung dalam bom dan penempatan perangkat dalam pelabuhan, ini bisa memerlukan penutupan bagian-bagian penting dari sebuah pelabuhan besar selama beberapa minggu atau bulan, bahkan tahun. Serangan teroris pada sistem pengiriman peti kemas lebih mungkin untuk mengeksploitasi rantai pasokan kargo daripada menyerang saluran moda yang membawa kargo.

Samudera menjadi sarana transportasi yang tidak mendapat perhatian besar. Oleh karena itu, pergerakan dapat dilakukan tanpa terdeteksi. Imigran ilegal sering memanfaatkan sarana ini seperti dengan menyamar sebagai pelaut, yang memberikan mereka hak untuk pergi ke darat sementara kapal mereka bersandar/merapat tanpa dikenakan dengan jenis prosedur imigrasi yang digunakan untuk memeriksa penumpang normal. Jejaring terorisme

tentu bisa memanfaatkan ini untuk memfasilitasi penempatan anggota mereka di seluruh dunia.

Serangan terorisme dengan *container* di on-board kapal pada terusan penting seperti panama, dapat meningkatkan biaya angkut dan menambah biaya timbun karena terganggunya sistem pengiriman tersebut. Untuk melihat rute pelayaran dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini.

Gambar 3.1 Rute Pelayaran Perdagangan Internasional



Sumber: U.S. National Imagery and Mapping Agency. *Distances Between Ports. 11th ed.* Maryland:2001.

Risiko selanjutnya naik ketika, efektivitas pemeriksaan *point-of-origin* atau pelabuhan asal seringkali dipertanyakan. Karena petugas pemeriksa Bea Cukai akan menurunkan standar pemeriksaan untuk barang ekspor atau keluar, karena tekanan fasilitasi perdagangan. Sehingga pemeriksaannya tidak dapat dihandalkan.

Pemeriksaan di pelabuhan tujuan mungkin terjadi namun sudah terlambat untuk mencegah serangan teroris. ISPS *Code* hanya mengatasi sedikit masalah dengan mewajibkan satu standar minimal yang mengatur lalu

lintas manusia dan barang pada rantai pasokan kepelabuhan. Singapura yang pelabuhannya beroperasi dengan standar paling tinggi di dunia dengan *well-protected terminal* komersial, tidak mensyaratkan perusahaan pelayaran untuk membuat suatu *declaration* tentang barang di kapal mereka jika mereka hanya transit di pelabuhan karena akan membuat perusahaan pelayaran akan mengalihkan rutenya ke Klang, Malaysia atau ke Batam, Indonesia. Begitu pula pelabuhan Rotterdam, Belanda, termasuk yang tersibuk di dunia, dalam implementasi regulasi keamanan menurut penelitian Greenberg (2005, hal. 25) menemukan bukti bahwa prosedur keamanan yang hanya centang pada lembar pemeriksaan.

Dampak Ekonomi dari serangan terorisme pada sistem pengiriman *container* dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Dampak langsung adalah akibat langsung serangan teroris seperti klaim asuransi jiwa dan cedera, kompensasi, perbaikan atau penggantian kapal, kerugian pengangkutan, dan kerusakan dan kehancuran kekayaan milik pribadi dan infrastruktur publik. Efek tidak langsung adalah konsekuensi dari peran *container* pada rantai pasokan dalam perekonomian seperti gangguan bisnis jangka pendek karena tertunda atau hilangnya barang dalam pengiriman, jangka panjang penyesuaian terhadap dimodifikasinya angkutan transportasi sistem, ditambah prosedur keamanan dan kehilangan pendapatan dari pemerintah dan perusahaan. Serangan terhadap kapal, kerusakan akan terbatas pada kapal itu sendiri dan biaya hanya terbatas puluhan juta dolar untuk memperbaiki atau menggantinya (Frittelli, 2004, par 1-2). Jika semua kargo di kapal hilang, dampak ekonominya mungkin dalam ratusan juta dolar. Pelabuhan adalah bagian kunci dari infrastruktur publik dan serangan

mungkin berusaha untuk menghancurkan kemampuan pelabuhan untuk beroperasi secara normal dan efisien.

Biaya ekonomi yang signifikan akan terjadi jika kelompok teroris berhasil melakukan serangan untuk menonaktifkan pelabuhan besar Flynn (2005, hal. 10) percaya bahwa efek langsung ekonomi dapat menyebabkan resesi ekonomi suatu negara. *Lockout* pelabuhan pantai barat AS misalnya

akan mengganggu perjalanan lebih dari 200 kapal yang mengangkut 300.000 *container*. Diperkirakan penutupan pelabuhan Los Angeles dan Long Beach di AS selama seminggu akan mempengaruhi \$ 65 juta- \$ 150 juta per hari dan memiliki dampak jangka pendek kondisi perekonomian. Dan *shutdown* selama tiga tahun dari pelabuhan Los Angeles dan Long Beach akan mengakibatkan terganggunya ekonomi makroAS dengan kerugian sebesar US \$ 70 Miliar per tahun (Arnold, 2006, hal. 15).

3.1.1. Kapabilitas Al Qaeda untuk Melakukan Serangan terhadap Kapal dan Pemanfaatan *Container*

Terlepas dari ancaman terorisme dengan memanfaatkan *container* yang memiliki dampak ekonomi yang sangat material, yang tidak kalah penting untuk dibahas adalah kapabilitas kelompok terorismenya, karena kapabilitas ini yang menentukan apakah suatu pilihan serangan dipilih, walaupun kemudahan akses dan dampak yang signifikan.

Al Qaeda telah membuktikan kapabilitasnya untuk melakukan serangan dengan sasaran kapal laut, setidaknya tercatat dua kali serangan. Serangan 2002 terhadap kapal tanker Perancis *Limburg*, dilakukan saat kapal berjalan perlahan di Teluk Aden, menunggu tenaga pelabuhan untuk memandu kapal untuk tambatan/bersandar, kapal supertanker menjadi sasaran serangan dengan menggunakan *fiberglass boat* berisi bahan peledak TNT seberat 200 kg dan menabrakkan tegak lurus ke sisi *Limburg*. Serangan ini dengan mirip Serangan ke USS *Cole* tahun 2000 yang menabrak kapal dengan *skiff* (sampan kecil) berisi C4 seberat 600 pounds.

Jika melihat sasaran adalah kapal yang bergerak lambat menunjukkan bahwa Al Qaeda dalam serangannya memilih probabilitas keberhasilan yang paling tinggi walaupun dapat diartikan pula ketidakadaan ahli pelayaran di Al Qaeda karena serangan pada kapal yang bergerak cepat tidak mudah dilakukan kecuali oleh pelaut berpengalaman. Untuk semua kesulitan yang melekat dalam serangan maritim, kapal cepat muncul sebagai senjata pilihan, menyediakan kemampuan manuver yang unggul dan deteksi

radar berkurang, dan mampu melaksanakan serangan dari beberapa vektor dan bersembunyi di keramaian seperti armada penangkapan ikan, menciptakan hiburan, memikat sebuah menargetkan dengan panggilan marabahaya atau keadaan darurat palsu, dan melakukan serangan mematikan menggunakan berbagai bentuk senjata.

Daripada mengembangkan rasa aman palsu didasarkan pada keyakinan bahwa kesulitan yang melekat akan membatasi terorisme maritim untuk insiden sporadis, perlu dicermati pula adaptasi al Qaeda, kecerdikan, keuletan, dan keberanian. Keberhasilan pengembangan dan penerapan taktik maritim, teknik, dan prosedur telah terjadi dalam komunitas teroris. Debat mengenai hubungan yang mungkin antara pembajakan dan terorisme memiliki hubungan langsung, bajak laut kapal dagang *Dewi Madrim* di Selat Malaka pada Maret 2003, menampilkan serangan canggih dan kemampuan pengendalian kapal yang tak terpikirkan.

Selain memahami kapabilitas, perlu pula memahami intensi al Qaeda untuk mengintensifkan operasi terhadap target maritim. Mantan Direktur CIA George Tenet memperingatkan pada awal Februari 2003 bahwa al Qaeda sedang mengembangkan dan menyempurnakan kemampuan serangan maritim. Dua target utama yaitu kapal komersial, mengangkut 80% komoditas perdagangan dunia, dan kapal angkatan laut, simbol militer di mana menjadi simbol kekuasaan Barat. Mereka telah menunjukkan niat yang cukup terhadap kedua target maritim yang sangat menarik.

Dengan harga minyak yang berfluktuasi di harga tinggi, gangguan rute laut untuk atau serangan terhadap kapal tanker yang membawa sekitar dua pertiga minyak dunia akan memicu krisis ekonomi global. Tidak hanya kapal tanker minyak mengikuti rute tetap, dapat diprediksi, dan karena itu rentan, mereka secara rutin melintasi beberapa titik geografis, termasuk Selat Hormuz, Selat Bab-el-Mandeb, Terusan Suez, dan Selat Malaka, yang masing-masing telah terpapar serangan terorisme maritim di masa lalu dan diprediksi meningkat di masa depan teroris.

Pelkofski (2005, hal. 5) berpendapat bahwa jaringan Al Qaeda mempertahankan minat yang kuat dalam menyerang target maritim

komersial. Pada Oktober 2002, Al Qaeda perencana Adb Al Rahim Al Nashiri mengawasi serangan terhadap tanker minyak Perancis *Limburg* di lepas pantai Yaman, serangan ini dimaksudkan sebagai bagian dari symbol melawan kepentingan AS di kawasan. Bush dan para pejabat berbagai instansi pemerintah telah sering dikutip maksud al Qaeda untuk melanjutkan serangan terhadap sasaran Amerika, secara khusus menyebutkan serangan maritim menggunakan perahu dan penyelam scuba sebagai sarana pemberian peledak.

Serangan terhadap *Cole*, telah digambarkan sebagai operasi teroris yang ideal. Pada akhir 2001, pemerintah setempat terganggu adanya indikasi hubungan antara Al Qaeda dengan Jemaah Islamiyah yang menyerang kapal perang AS berlabuh di Singapura. Sebanyak 15 orang dari sel Al Qaeda ditangkap oleh polisi Maroko pada bulan Mei 2002 yang merencanakan untuk menggunakan speedboat Zodiac sarat dengan bahan peledak untuk serangan bunuh diri terhadap kapal AS, Inggris, dan mungkin anggota NATO lainnya perang transit Selat Gibraltar.

Empat faktor utama yang mendukung rasionalisasi pergeseran dalam fokus kelompok terorisme. Pertama, banyak kerentanan pada tingkat yang lebih tinggi pada serangan bajak laut juga berlaku untuk terorisme, termasuk pengawasan pesisir yang tidak memadai, longgarnya keamanan pelabuhan, sebuah target menarik, ketergantungan yang sangat besar terhadap perdagangan internasional yang sebagian besarnya menggunakan shipping system laut.

Kedua, pertumbuhan perusahaan komersial yang mengkhususkan diri dalam olahraga maritim dan peralatannya tersedia dan mudah diakses untuk digunakan untuk pelatihan dan sumber daya dalam suatu operasi di laut, misalnya Chalk (2008) dalam penelitian mendapatkan bukti adanya anggota Jamaah Islamiyah berbahasa Indonesia diketahui telah terdaftar dalam kursus scuba dan menjalankan perusahaan komersial. Pihak keamanan Philipina percaya bahwa tujuan utama untuk mengambil pelatihan ini, memfasilitasi serangan bawah air terhadap jaringan pipa gas dan minyak di lepas pantai di Mindanao.

Ketiga, serangan teroris maritim menawarkan sarana tambahan seperti menyebabkan destabilisasi ekonomi. Skenario yang umum diungkapkan oleh analis, serangan yang dirancang untuk menutup sebuah port atau memblokir *sea-lane of communication* (SLOC) untuk mengganggu pelayaran komersial dalam perdagangan internasional. Berhasil memblokir sebuah SLOC untuk semua lalu lintas akan sama sulitnya dengan menjegal beberapa kapal besar diwaktu yang sama. Mengatasi hambatan-hambatan logistik dan pengetahuan akan sangat sulit bagi serangan tunggal, apalagi serangan yang ditargetkan dua atau tiga kapal.

Keempat, terorisme di laut menjadi sarana pemberitaan yang luas. Sementara itu tidak adanya keamanan yang memadai di pelabuhan dan pesisir. Sejalan dengan pendapat Rober (2006) yang menyebutkan data bahwa ada celah keamanan hamper 80 % pelabuhan di dunia. Sasaran serangan terhadap kapal pesiar yang dipenuhi orang kaya dan kelas menengah dari wisatawan Amerika dan Eropa, kapal ini menyediakan resonansi yang sangat tinggi untuk pemberitaan media. Pemboman Superferry 14 di Filipina betapa mudahnya korban massal dapat terjadi dari hasil penyerangan terpadu terhadap pelayaran penumpang. Operasi, yang menyebabkan lebih dari 116 orang mati, melibatkan siklus perencanaan beberapa bulan, dieksekusi dengan sangat kasar dengan bom rakitan dari batang dinamit dalam televisi dengan biaya sekitar \$ 400.

3.1.2. Dukungan Keuangan Al Qaeda

Sejak didirikan pada tahun 1988, telah menggunakan berbagai metode untuk memperoleh pendanaan. Saat ini, sel-sel, cabang dan kelompok afiliasi diwajibkan untuk bertindak secara otonom, banyak dari mereka miliki, untuk sebagian besar, untuk membiayai diri mereka sendiri, termasuk melalui kejahatan biasa. Kelompok-kelompok ini juga harus mengambil jalan *hawala* (sistem perbankan yang berdasarkan kepercayaan informal) dan kurir uang tunai untuk memindahkan uang. Ada juga metode lain yang digunakan oleh kelompok teroris untuk mentransfer dana dengan sedikit risiko deteksi. Perdagangan internasional sangat rentan, karena

ukuran dan kompleksitas metode pembayaran. Munculnya metode pembayaran baru melalui perkembangan baru dalam teknologi informasi menimbulkan risiko tambahan.

Menurut laporan CIA, kebutuhan dana Al Qaeda sebelum serangan 11 September 2001 sebesar 30 juta dolar AS per tahun (National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004, hal.19). Uang ini dialokasikan untuk melakukan serangan, dan pelatihan militer anggotanya dan indoktrinasi dari anggotanya, untuk kontribusi kepada rezim Taliban. Saat ini sangat sulit untuk membuat estimasi yang wajar dari biaya operasi Al Qaeda, karena sekarang sejumlah besar sel dan kelompok teror lebih otonom.

Selain biaya serangan Al Qaeda juga harus membiayai biaya struktural untuk mempertahankan jejaringnya dan kebutuhan lainnya, seperti:

1. Biaya hidup bagi para anggotanya dan keluarga mereka. Beban tersebut cukup besar, walaupun gaya umumnya sederhana. Biaya bervariasi menurut kedekatan teroris dengan target mereka. Biaya kegiatan di Eropa Barat akan jauh lebih tinggi daripada di negara-negara Afrika atau Asia.
2. Sebuah sel teroris juga perlu saluran komunikasi yang dapat diandalkan bagi para anggotanya, termasuk saluran yang sangat rahasia untuk hubungan kepemimpinannya, dari yang menerima instruksi tersebut. Meskipun komunikasi biaya telah berkurang drastis melalui penggunaan telepon seluler, kartu pra-bayar dan e-mail (sering dikirim dari warung internet), pengadaan dan penggunaan alat-alat komunikasi dapat memerlukan biaya yang signifikan.
3. Pelatihan karyawan baru merupakan investasi besar untuk kelompok teroris, baik dalam hal indoktrinasi ideologis serta pengadaan barang praktis untuk mempersiapkan serangan. Meskipun bagian dari persiapan umum dapat dilakukan di kamp-kamp pelatihan teroris, beberapa operasi spesifik mungkin memerlukan ketrampilan khusus yang hanya dapat dicapai dengan pelatihan mahal seperti latihan terbang atau berlayar.

Tabel 3.1. Estimasi Biaya Serangan Al Qaeda

Target	Tanggal	Perkiraan Biaya
London Underground/Bus	7 July 2005	GBP 8,000
Madrid Railway Atocha)	11 March 2004	EUR 100,000
Istanbul	15 / 20 November 2003	US \$ 40,000
Marriot Hotel Jakarta	5 August 2003	US \$ 30,000
Bali Bombings	12 October 2002	US \$ 50,000
New York Twin Towers	11 September 2001	US \$ 500,000
USS Cole, Aden	12 October 2000	US \$ 10,000
US Embassies in Kenya and Tanzania	7 August 1998	US \$ 50,000

Sumber : Diolah United Nations (2004, hal. 12) dan United Kingdom Home Office (2006, para. 5-10)

4. Biaya perjalanan bagi anggota kelompok dalam persiapan serangan dan memperoleh dokumen palsu, yang mungkin juga melibatkan biro perjalanan. Perjalanan lebih lanjut diperlukan untuk bertemu dengan anggota lain dari jaringan, atau untuk bertemu dengan anggota senior dari hirarki atau bertemu individu mampu menyediakan materi.
5. Propaganda melalui berbagai saluran komunikasi dan termasuk kemampuan menggunakan *camrecorders* untuk menyiarkan rekaman video. Organisasi teroris juga membuat penyebaran berita menggunakan Internet untuk perekrutan, untuk menyebarkan pesan jihad dan untuk mengumpulkan dana.

6. Kegiatan amal sebagai alat legitimasi sosial dan mempertahankan konstituen.

Kebutuhan pendanaan Al Qaeda sangat besar walaupun serangan teroris secara individu dapat dilakukan dengan biaya yang relatif rendah, organisasi yang bertanggung jawab untuk mereka harus mampu untuk membiayai infrastruktur yang cukup untuk mempertahankan diri mereka sendiri dan untuk mempromosikan tujuan mereka. Sehingga Seorang pemimpin mereka, Mustafa Abu Yazid, juga dikenal sebagai Jeque Saeed, mengeluh dalam sebuah deklarasi yang dipublikasikan pada tanggal 10 Juni 2009 yang menyebutkan bahwa "banyak mujahidin telah tidak aktif dan gagal untuk berpartisipasi dalam jihad melalui kekurangan uang" (United Nations, 2009, hal. 22).

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Al Qaeda berada di bawah tekanan yang signifikan yang dihasilkan dari langkah-langkah internasional yang bertujuan membekukan aset dan memotong sumber tradisional pendapatan. Selain itu, Al Qaeda tidak dapat mentransfer uang dengan mudah seperti di masa lalu. Untuk memahami bagaimana Al Qaeda melakukan pendanaan aktifitasnya, perlu untuk mempelajari perkembangan struktur operasionalnya. Sejak serangan 11 September 2001 Al Qaeda telah berubah menjadi sebuah organisasi yang terdesentralisasi.

Al Qaeda dan kelompok yang terafiliasi telah sangat diversifikasi dalam metode pengumpulan uang untuk membiayai jihad. Mereka membiayai sendiri untuk berbagai luasan melalui kejahatan umum, sesuai dengan kondisi dan peluang di lokasi di mana mereka beroperasi. Oleh karena itu sering sulit untuk membedakan antara kelompok teroris, gerilyawan dan kelompok kejahatan terorganisir sejak kategori ini sering tumpang tindih. Metode dan sumber pembiayaan seringkali sama jika tidak sama.

Di antara sumber-sumber pendapatan lain, AQIM yang aktif di wilayah gurun antara Mauritania, Mali dan Aljazair, memperoleh uang dari tebusan penculikan, penyelundupan dan tampaknya juga dari perdagangan narkoba. Penemuan sisa-sisa sebuah Boeing 727 di gurun Mali

menimbulkan kecurigaan serius di antara badan intelijen di Eropa dan Amerika Serikat dimana beberapa daerah sebagian perdagangan *drug* Amerika Latin telah dikendalikan oleh AQIM untuk mengangkut *drug* dari Kolombia ke pasar Eropa. Dari negara-negara Barat pantai Afrika seperti Guinea-Bissau, obat terlarang yang dilaporkan diambil di Mauritania, Mali dan Niger ke Mesir dan Libya, dari mana mereka diangkut lebih lanjut dalam *container* (Passas dan Gimenez-Salinas, 2007, hal. 510-511).

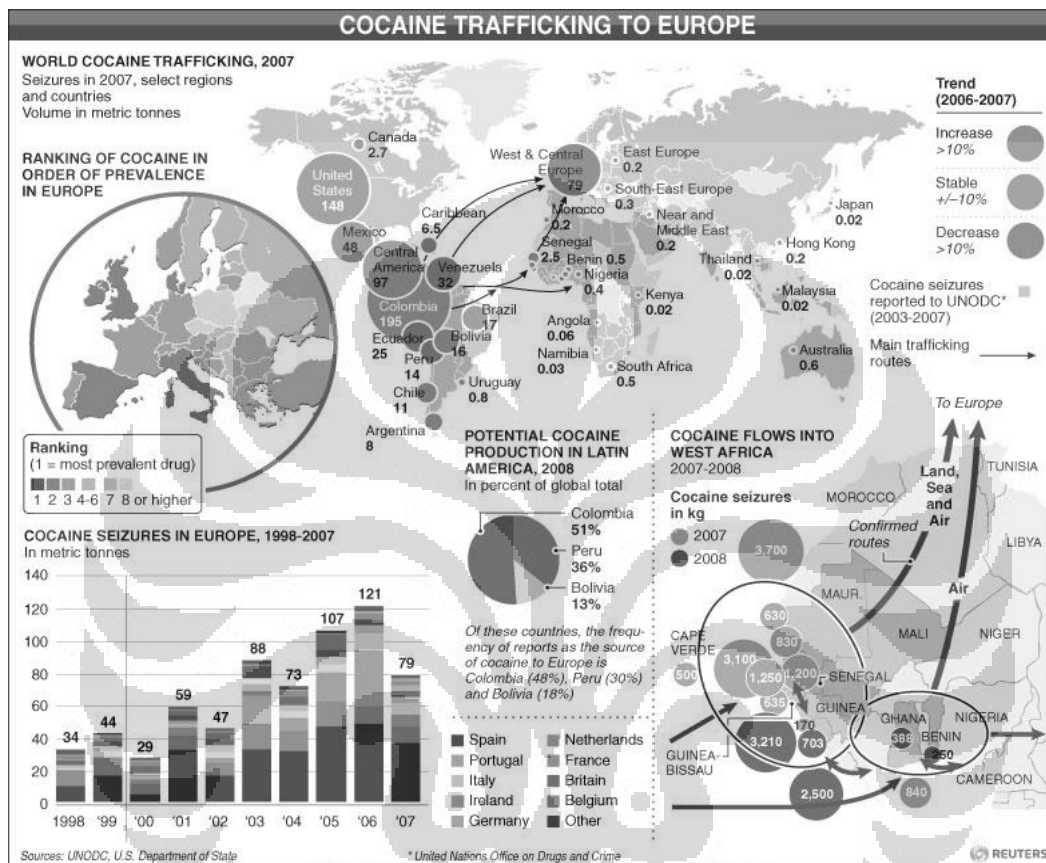
Menurut informan polisi Spanyol, kelompok perdagangan narkoba yang beroperasi di daerah-daerah kantong Ceuta dan Melilla di Afrika Utara mengirim sebagian dari keuntungan dari perdagangan ganja untuk membiayai kelompok teroris Islam. Sebuah laporan dari National Intelligence Centre (NIC) tanggal 27 Oktober 2003 menyimpulkan bahwa anggota Al Qaeda merupakan sel-sel tidur yang dibiayai oleh perdagangan narkoba dan pencurian kartu kredit (Passas dan Gimenez-Salinas, 2007, hal. 512-513).

The 11 Mar 2004 pemboman di Madrid merupakan contoh bagaimana serangan itu didanai oleh uang narkoba dan kejahatan. Berbagai anggota dari unit yang melakukan pengeboman-pengeboman ini terlibat dalam narkoba, pemalsuan dokumen perdagangan dan kejahatan lainnya dengan mana mereka berhasil mengumpulkan sejumlah besar pendapatan. Dan digunakan untuk memperoleh bahan peledak bagi mereka yang melakukan tindakan teroris. Beberapa kelompok radikal yang telah membiayai sendiri di Spanyol untuk tahun melalui perdagangan ganja telah mengambil langkah lebih lanjut dalam strategi mereka untuk mencari sumber daya baru.

AQIM menggunakan pendapatan dari perdagangan kokain dan obat-obatan sintetis antara Spanyol dan Aljazair untuk membiayai kampanye teror di Afrika utara. Setelah memperoleh kokain dari Amerika Latin dan sintetis obat pil diproduksi di Belanda dan di tempat lain di Eropa, mereka menjual kembali ini di Aljazair, dimana harga dilaporkan jauh lebih tinggi daripada di Uni Eropa. Seperti obat kegiatan perdagangan membentuk link

lain dalam rantai besar kegiatan kriminal untuk memperoleh pendanaan lintas batas.

Gambar 3.2. Peta Perdagangan Kokain



Sumber: UNCOG US Department of State

Penyelidikan bersama oleh, Spanyol Italia, polisi Swiss dan Perancis telah mengungkapkan bagaimana perampokan dan perdagangan narkoba di Spanyol, perampokan di Swiss dan penipuan pajak di Italia menghasilkan sejumlah besar uang yang kemudian digunakan untuk membiayai serangan bersenjata dan pelatihan teroris. Selain perdagangan ganja, radikal Maroko memiliki spesialisasi dalam perampokan dan penjualan kembali semua jenis teknologi informasi modern seperti GPS, telepon selular generasi baru dan buku harian elektronik. Dalam banyak kasus barang tersebut kemudian dijual kembali di Maroko atau Spanyol (Passas dan Gimenez-Salinas, 2007, hal. 514-517). Ada juga hubungan yang muncul antara kelompok teroris Islam dan komisi dari kejahatan cyber. Menurut investigasi yang dipimpin

oleh polisi Inggris, tiga anggota sebuah sel teroris yang merencanakan untuk melakukan serangan di AS, Eropa dan Timur Tengah menggunakan beberapa kartu kredit curian untuk membeli barang-barang seperti sistem GPS, malam visi kaca mata, tas tidur, telepon, pisau dan tenda dari ratusan website. Ini dimaksudkan untuk dikirim ke jihad di Irak. Di antara pembelian mereka adalah ratusan kartu pra-bayar telepon seluler dan lebih dari 250 tiket pesawat. Ini dibeli dengan 110 kartu kredit yang berbeda dari 46 perusahaan penerbangan yang berbeda dan agen perjalanan.

Ketiga orang yang terlibat juga mencuci uang dijarah dari rekening bank dengan bantuan on-line situs perjudian. Sejumlah rekening bank dicuri kartu kredit dan hack juga digunakan untuk membeli layanan berbasis web di Amerika Serikat dan Eropa dengan tujuan jelas untuk menciptakan jaringan online yang akan digunakan oleh sel jihad di seluruh dunia untuk uang, merekrut anggota dan informasi rencana serangan. Para anggota sel tiga terlibat menghabiskan 3,5 juta dolar dari kartu kredit dicuri oleh phishing pada ratusan website. Mereka juga membagikan spyware yang terdapat dalam email atau website yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kontrol dari komputer yang terinfeksi (Passas dan Gimenez-Salinas, 2007, hal. 518-520).

Anggota Al Qaeda Pakistan yang tinggal di Spanyol mengembangkan metode operasi mereka sendiri. Kelompok-kelompok ini memiliki hubungan dekat dengan sel radikal di Inggris yang mengkhususkan diri dalam mencuri kartu kredit. Seperti kartu yang dikloning dan dikirim ke Spanyol, di mana ratusan sampai ribuan euro pada tuntutan dilakukan oleh pemilik usaha tertentu yang kemudian mentransfer uang ke organisasi radikal, meminta komisi sebesar 10% untuk dirinya sendiri. Kelompok radikal Pakistan juga mendapatkan dana dengan mengumpulkan dana dari orang-orang sebangsanya yang berbasis di Spanyol. Pada kesempatan mereka bahkan terlibat dalam apa yang disebut *mengungkapkan* penculikan yang berakhir setelah anggota keluarga membayar uang tebusan di Pakistan (Passas dan Gimenez-Salinas, 2007, hal. 525-530).

Di antara sumber-sumber pendapatan Al Qaeda, temukan pula bukti adanya pengalihan dana dari organisasi amal ke sektor bisnis, keuntungan yang diperoleh dari bisnis yang dijalankan oleh anggota dikumpulkan. Pendirian perusahaan-perusahaan komersial untuk mempermudah mentransfer dana. Salah satu contoh adalah Barakaat, jaringan perusahaan yang, pada tahun 2001, memiliki cabang di 40 negara dengan menjalankan operasi telekomunikasi, konstruksi, dan jasa pengiriman uang kas valuta (National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, 2004, hal.67).

Penggunaan perusahaan fiktif dan perusahaan fidusia lepas pantai untuk melindungi identitas seseorang atau perusahaan yang mengambil bagian dalam pendanaan teroris menimbulkan masalah yang sulit bagi orang yang mencoba untuk mengatur transaksi bisnis. Ini adalah perusahaan, dana, entitas atau bisnis yang terdaftar di ekstra-teritorial. Di Spanyol, menurut penyelidikan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Fiskal (*Audiencia Nacional*), Kelompok Salafis untuk Pengajaran dan mantan Perang (GSPC),-sekarang terintegrasi ke dalam AQIM, dana diperoleh dari kurir dibawa ke Aljazair dan Suriah. Untuk melakukan ini, mereka menggunakan perusahaan yang tidak aktif atau perusahaan dalam proses likuidasi bebas pajak seperti Bahama dan Delaware. *Nacional Audiencia* mengikuti jejak warga negara Aljazair di Spanyol dengan rekening bank di Palma de Mallorca atas nama perusahaan Amerika yang dibentuk di Delaware. Dia mentransfer dana sebesar US \$ 200.000 dengan tujuan seharusnya membayar faktur untuk layanan dari sebuah perusahaan IT di Belanda dan Jerman. Perusahaan yang bersangkutan membantah telah mengeluarkan faktur yang ternyata palsu (Gómez, 2010, hal. 5).

3.2. Defisit Neraca Perdagangan dan Kebijakan GWoT AS

Amerika Serikat mempertahankan salah satu rezim paling terbuka di dunia perdagangan dan investasi, meskipun dalam beberapa bidang penting hambatan yang signifikan untuk akses pasar tetap dipertahankan. Mengurangi hambatan ini akan mengurangi distorsi di pasar global, friksi dengan mitra

dagang dan memperkuat sistem perdagangan multilateral berdasarkan laporan WTO tentang kebijakan perdagangan dan praktek Amerika Serikat. Setelah ekspansi pasar yang luas, pertumbuhan ekonomi AS melambat secara signifikan dan impor jatuh, kebijakan moneter telah mereda, dengan kebijakan fiskal juga memainkan peran. Lingkungan ekonomi berubah dan mempengaruhi implementasi kebijakan perdagangan AS, dengan perlambatan ekonomi cenderung meningkatkan tekanan untuk perlindungan pembatasan yang lebih besar. Beberapa mitra dagang telah melakukan tuntutan di WTO, metode AS tersebut diduga melakukan dumping, serta langkah-langkah pengamanan yang diterapkan sejak tahun 1998. Selanjutnya akan dibahas hubungan defisit neraca perdagangan dengan kebijakan *non tariff trade barrier* serta keterkaitan kebijakan Global War on Terrorism AS.

3.2.1. Dampak Defisit Neraca Perdagangan dalam Perekonomian AS

Amerika Serikat pada tahun 2000 mengalami defisit perdagangan signifikan yang berarti ekspor harus meningkat dan impor berkurang. Defisit perdagangan tersebut adalah penyumbang resesi ekonomi AS pada tahun 2001, akan mempengaruhi AS untuk memainkan peran untuk memasuki proses penyesuaian. Masuk akal perkiraan menunjukkan bahwa setiap proses penyesuaian tersebut kemungkinan memiliki dampak besar pada perekonomian negara terutama mitra dagang AS seperti Kanada, Meksiko, dan negara-negara di Karibia dan Amerika Tengah.

Penurunan impor AS akan berdampak pada ekspor dari negara-negara ini ke Amerika Serikat akan relatif besar berdampak pada ekonomi negara masing-masing. Kecuali penurunan ekspor ini diimbangi dengan beberapa sumber lain dari permintaan, dalam kasus terburuk, dengan penurunan dalam ekspor ke Amerika Serikat cukup untuk mendorong beberapa negara ke dalam resesi ekonomi.

Pertumbuhan di Kanada dan Meksiko, melambat tajam pada tahun 2001, dengan pertumbuhan GDP riil di Meksiko tergelincir ke nol untuk tahun itu. Negara-negara yang mungkin akan paling menderita sebagai akibat dari penurunan impor AS adalah negara-negara yang menandatangani FTA *agreement* misalnya NAFTA (antara Amerika Serikat, Kanada, dan

Meksiko, dan Republik Dominika-Amerika Tengah) dan DR-CAFTA (Guatemala, El Salvador, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, dan Republik Dominika). Sementara itu, negara-negara yang kurang tergantung pada Amerika Serikat, atau lebih bergantung pada permintaan domestik, akan melihat dampak yang lebih kecil dari resesi AS terhadap ekspor dan PDB nasional.

Perdagangan internasional barang dan jasa bersama dengan arus modal keuangan mempengaruhi hampir setiap orang yang tinggal di Amerika Serikat. Apakah membeli pakaian impor, bensin, komputer atau mobil, atau bekerja di sebuah industri yang bersaing dengan impor, atau menjual produk luar negeri, pengaruh perdagangan internasional terhadap kegiatan ekonomi di mana-mana.

Meskipun Amerika Serikat adalah salah satu dari tiga eksportir terbesar di dunia disamping Cina dan Jerman, penjualan AS luar negeri dibayangi oleh permintaan besar oleh Amerika untuk produk impor. Sejak 1976 Amerika Serikat telah mengalami defisit perdagangan barang terus-menerus dengan jumlah tahunan meningkat terus sampai dua tahun terakhir.

Defisit perdagangan dan aspek lain dari perdagangan internasional masuk ke dalam kebijakan publik. Pada tingkat makro ekonomi, defisit perdagangan sering dilakukan karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi AS, suku bunga, tenaga kerja, dan beban utang ekonomi. Seperti defisit perdagangan meningkat relatif terhadap total ekonomi, risiko meningkat dengan dolar yang melemah, menaikkan harga, mengganggu pasar keuangan, dan mengurangi ekonomi kesejahteraan penduduk.

Pada tingkat strategis, hubungan dagang sering menyebabkan memperdalam hubungan bilateral dengan lain negara yang dapat berkembang menjadi resmi perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian politik dan keamanan. Perdagangan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan khususnya strategis melalui penyediaan pengaturan perdagangan preferensial atau dengan menerapkan sanksi perdagangan.

AS dipaksa untuk melakukan tindakan penyelamatan ekonomi bahkan jika tindakan tersebut dapat mengorbankan kepentingan

internasionalnya. Mencari keuntungan nasional baik dengan melindungi industri dalam negeri atau mempromosikan ekspor. Di sisi ekonomi mikro, impor produk tertentu dapat menghasilkan friksi perdagangan dan tekanan dari kepentingan pemerintah untuk produsen perisai AS dari kompetisi asing untuk memberikan bantuan keuangan, membuka pasar asing, atau membantu industri AS untuk menjadi lebih kompetitif.

Secara keseluruhan defisit perdagangan AS mencerminkan kekurangan tabungan dalam ekonomi domestik dan ketergantungan pada impor. Kekurangan tabungan dapat dianalogikan dari belanja berlebihan yang dibiayai oleh pinjaman. Suatu rumah tangga meminjam untuk konsumsi, padahal idealnya pinjaman untuk berinvestasi sehingga biaya yang muncul dari pinjaman dapat dihilangkan. Jika pinjaman untuk membiayai investasi yang menghasilkan laba di masa depan pada tingkat yang cukup tinggi maka akan meningkatkan produksi masa depan dan produktivitas. Namun, jika impor hanya digunakan untuk dikonsumsi, efek bersihnya adalah defisit perdagangan.

Balance of Trade AS adalah variabel ekonomi makro yang menunjukkan adanya masalah dengan daya saing industri AS. Alasannya adalah bahwa arus perdagangan secara keseluruhan ditentukan, dalam kerangka kelembagaan untuk membuat hambatan perdagangan dan aktivitas industri individu, terutama oleh makroekonomi faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan, tabungan dan perilaku investasi, arus modal internasional, dan pertukaran mata uang.

Peningkatan defisit perdagangan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi, karena ekspor bersih (ekspor dikurangi impor) adalah komponen dari produk domestik bruto. Pada akhir 1980-an dan awal 1990, ekspor pertumbuhan merupakan unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi AS secara keseluruhan. Meningkatnya perdagangan defisit telah mengurangi permintaan domestik total dalam perekonomian, tapi kelemahan di sektor perdagangan telah diimbangi oleh konsumen yang kuat, bisnis, dan permintaan pemerintah.

Banyak ekonom khawatir bahwa perdagangan defisit AS naik dapat menyebabkan menjatuhkan nilai dolar AS. Dolar melemah meningkatkan ekspor dengan membuat mereka lebih murah, mempersempit defisit perdagangan AS. Dibandingkan dengan indeks Federal Reserve mata uang utama ditimbang dengan pentingnya perdagangan AS, dolar telah kehilangan sepertiga dari nilainya sejak 2002. Dolar telah turun terhadap euro, yen, pound Inggris, dolar Australia dan dolar Kanada. perdagangan AS dalam barang dan jasa ditambah arus setelah dikurangi pendapatan investasi dan pengiriman uang.

Meskipun dolar yang melemah membantu untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan AS, juga dapat mengurangi daya tarik dolar bagi investor asing. Jika investor asing menghentikan mengimbangi defisit dengan membeli dolar, nilai dolar bisa turun secara drastis. Dalam hal ini, tingkat suku bunga AS akan meningkat untuk menarik investasi asing, pasar keuangan bisa terganggu, dan tekanan inflasi bisa meningkat. Krisis keuangan global telah bekerja untuk memperkuat dolar vis-a-vis euro Uni Eropa, Inggris pound, dolar Kanada, dan mata uang banyak negara berkembang.

AS membuat beberapa hambatan perdagangan yang ditujukan ke negara-negara tertentu, terutama Cina. Biro Sensus juga melaporkan impor pada CIF (harga invoice, asuransi dan biaya pengiriman) dasar yang termasuk nilai asuransi, pelayaran internasional, dan biaya lainnya yang terjadi untuk membawa barang dagangan untuk pelabuhan AS masuk. Data impor AS dilaporkan secara pabean dengan asuransi dan ongkos angkut dihitung dalam perdagangan jasa AS. Negara lain, bagaimanapun, sering melaporkan angka impor barang yang termasuk asuransi dan ongkos angkut. Ini cenderung melebih-lebihkan impor mereka dan mengecilkan surplus perdagangan mereka dengan Amerika Serikat.

Neraca Perdagangan adalah indikator yang paling banyak dikenal dan sering digunakan kegiatan ekonomi internasional. Defisit AS meningkat pada tingkat dua digit dengan 22% pada tahun 2004 dan 18% pada 2005. Peningkatan defisit melambat pada tahun 2006, meningkat hanya 6,5%.

Defisit perdagangan AS dengan Cina melampaui Jepang untuk pertama kalinya pada tahun 2000 dan sekarang lebih dari tigakali lebih besar.

3.2.2. Kebijakan *Non Tarrif Trade Barrier* sebagai Pilihan

Kondisi defisit perdagangan AS menjadi perhatian pengambil keputusan di AS, karena perekonomian AS yang sedang mengalami resesi ekonomi sampai dengan November 2001, dimana defisit perdagangan memberikan kontribusi besar untuk memperburuk perekonomian. Sehingga penyesuaian yang paling mungkin adalah menaikkan ekspor AS dan atau menurunkan impornya. Menaikkan ekspor akan sangat menuntut kemampuan domestik AS yang sedang lesu akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang relatif lama. Sedangkan menurunkan impor dengan menaikkan tarif bea masuk akan sulit, karena perjanjian pasar bebas yang mengikat AS. Sehingga dibutuhkan instrumen perdagangan *non tariff trade barrier* yang tidak menimbulkan resistensi mitra dagang AS ataupun WTO. Kebijakan *non tariff trade barrier* menjadi pilihan yang paling mungkin dilakukan. Beberapa karakter kebijakan *non tariff trade barrier* yang dibuat haruslah memiliki dampak terhadap penurunan impor dan hal-hal lain yang sensitif terhadap efisiensi dalam rantai pasokan perdagangan.

Menimbang pada kebijakan kontra terorisme yang efektif haruslah melakukan prediksi *feedback* yang tercipta dari kebijakan tersebut. Misalnya hambatan perdagangan non-tarif yang dipilih, karena akan memiliki *effect* balikan yang sangat mungkin justru menciptakan kondisi yang lebih memberikan peluang terorisme mendapatkan keuntungan yang secara tidak langsung justru membesarkan kelompok terorisme.

Secara operasional kebijakan yang akan AS ambil seharusnya juga bersifat *asymmetric* dan hal ini juga berlaku untuk Cina yang pada uraian sebelumnya menjadi perhatian serius karena Cina adalah penyumbang defisit terbesar bagi AS. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah keberadaan negara berkembang yang dalam teori perdagangan banyak negara berkembang memiliki banyak mendapatkan keuntungan melalui internasional perdagangan. Ditemukan bahwa sementara ada contoh di mana

selisih impor dan ekspor atau surplus neraca perdagangan berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Banyak organisasi internasional, seperti OECD, dan UNCTAD untuk mempromosikan ekspor dan perdagangan internasional sebagai sarana untuk mendorong pembangunan di negara berkembang. Keterbukaan terhadap perdagangan, dan ekspor memiliki efek positif yang signifikan pada negara-negara berkembang. Sementara negara berkembang harus belajar menurunkan hambatan perdagangan dan ekspor di dalam negeri, negara maju harus juga bekerja mempromosikan suasana global di mana tarif dan hambatan non-tarif perdagangan diminimalkan.

Sehingga kebijakan AS yang memiliki hambatan non-tarif perdagangan harus menemukan rasionalisasi yang kuat. Negara berkembang merupakan sebagian besar negara di dunia sangat bergantung dari perdagangan eksportnya. Menurut penelitian Laite (2010) menunjukkan, lebih dari 80 persen serangan teroris yang dianalisis berasal dari kelompok atau individu dari negara berkembang.

Sementara hasil menunjukkan bahwa negara-negara maju sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi tempat kelompok terorisme. Bahkan, bukti secara konsisten menunjukkan bahwa subset dari negara dalam negara berkembang paling mungkin untuk kelompok teroris relatif lebih berkembang. Hanya 19,5 persen kelompok teroris yang kurang berkembang di negara berkembang, sementara 67 persen kelompok teroris lebih berkembang negara-negara berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa ada jendela pembangunan di negara-negara yang dimana paling mungkin untuk jejaring terorisme.

Sejak arus perdagangan internasional terbatas di negara-negara maju, mengurangi hambatan perdagangan akan memiliki sedikit efek pada perkembangan negara berkembang secara keseluruhan. Akibatnya, mengurangi hambatan perdagangan akan membantu mendorong negara-negara tersebut ke dalam jajaran negara maju, membuat dukungan mereka terhadap terorisme kecil kemungkinannya.

Negara maju dan negara berkembang secara tidak proporsional kebijakan global sering kali membebani negara-negara yang tidak mampu mematuhi peraturan baru. Sehingga semakin membuat *global injustice* menguat, yang secara tidak langsung ikut memberikan pembenaran terhadap propaganda jejaring terorisme global.

Hambatan perdagangan lebih lanjut untuk negara berkembang, untuk dapat *comply* pada kebijakan keamanan perdagangan global menunjukkan biaya untuk pelabuhan kecil akan membutuhkan 113 persen lebih tinggi dari pelabuhan besar, sedangkan beban operasional tahunan pelabuhan-pelabuhan kecil 58 persen lebih tinggi dari port besar. Skala ekonomi yang dinikmati oleh pelabuhan besar *vis-à-vis* pelabuhan-pelabuhan kecil hanya memperburuk perbedaan-perbedaan dalam biaya.

Hambatan perdagangan non-tarif yang dibuat oleh program-program keamanan perdagangan, dikombinasikan dengan fakta bahwa eksportir di negara berkembang sering membayar dua sampai tiga kali lebih banyak pada biaya impor daripada eksportir di negara-negara maju, jelas bahwa perdagangan hambatan yang signifikan untuk negara berkembang. Disparitas ini memiliki implikasi signifikan bagi negara berkembang.

Biaya yang lebih tinggi dari pengiriman lebih sulit bagi negara-negara tersebut, sehingga membatasi pertumbuhan PDB dan pembangunan ekonomi. Demikian pula, semakin rendah biaya impor ke negara-negara berkembang membuat lebih mudah bagi negara maju untuk membanjiri negara berkembang dengan produk mereka, yang membatasi pembangunan ekonomi dengan membuat mustahil bagi industri kecil di negara berkembang untuk bersaing.

Mengingat adanya keterkaitan antara kecenderungan negara berkembang dengan terorisme, dengan menciptakan hambatan non-tarif perdagangan program keamanan perdagangan mungkin secara tidak sengaja mempromosikan lingkungan yang lebih menguntungkan bagi terorisme. Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya harus mengatasi masalah ini, tidak hanya karena risiko keamanan terkait dengan tidak melakukannya, tetapi juga karena mereka memiliki tanggung jawab moral.

Untuk meminimalkan efek negatif dari keamanan perdagangan maritim, Amerika Serikat harus bekerja untuk mengurangi hambatan non-tarif perdagangan untuk mengimbangi program yang dibuat. Hal ini akan memberikan kewajiban AS untuk meningkatkan bantuan, terkait infrastruktur perdagangan dan biaya partisipasi kepatuhan terhadap program keamanan perdagangan maritim. AS dapat meminta US CBP dan US *Agency for International Development* (USAID), serta Departemen Perdagangan untuk mengembangkan kebijakan kepada negara berkembang untuk membantu mitra dagang AS yang paling terpengaruh/ sensitif terhadap biaya keamanan.

BAB 4

ANALISA TERHADAP HUBUNGAN *CONTAINER SECURITY INITIATIVE (CSI) DENGAN THREAT*

4.1. Analisa terhadap Statistika Deskriptif

Variabel Terikat (CSI) dan Variabel Bebas (QAE, REL, FRE) merupakan variabel *dummy* yang bersifat kategorial sehingga tidak memerlukan deskripsi statistik terkait nilai minimum, maksimal dan *mean*-nya. Sedangkan Variabel Bebas lainnya (INC, DIS, IMP, EXP, BOT) yang merupakan data metrik didapatkan informasi sebagaimana dalam Tabel 4.1., dimana variabel INC yang menggambarkan jumlah kejadian *political violence* di negara target dengan nilai maksimal 195 kejadian, negara tersebut adalah India, namun berdasarkan data pada Lampiran 2 didapatkan informasi bahwa India tidak merespon CSI, hal ini berlawanan dengan harapan yang diinginkan bahwa INC akan bersifat positif terhadap CSI.

Variabel kedua, DIS yang merupakan jarak terdekat dari pelabuhan negara target dengan pelabuhan besar AS (N.Y. *port* atau L.A. *port*), negara target yang memiliki jarak paling jauh adalah Pakistan yaitu 11 *kilo nautical miles*, dimana Pakistan merespon CSI. Hal ini menginformasikan tingginya kerentanan pemanfaatan container diatas kapal dalam perjalanan jarak jauh akan meningkatkan ancaman bagi AS. Selanjutnya variabel IMP dan EXP, nilai maksimalnya dimiliki oleh Canada yang merespon CSI. Harapannya didapatkan IMP dan EXP akan bergerak berlawanan, IMP positif terhadap CSI, karena IMP telah menjadi *economic threat* bagi AS karena resesi 2001, yang salah satunya dipicu dengan tingginya tingkat impor AS. Sedangkan variabel terakhir yaitu BOT yang merupakan neraca perdagangan AS dengan negara target, sehingga didapatkan Cina sebagai penyumbang defisit terbesar senilai \$ 84 Miliar dan Cina patuh terhadap CSI, sedang surplus terbesar senilai \$ 10 Miliar adalah Belanda, dan Belanda merespon CSI, namun demikian respon Belanda dapat dipahami sebagai kepentingan AS terhadap kapasitas pelabuhan Rotterdam yang sangat besar untuk mempermudah pencapaian target 100% scanning.

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSI	68	0	1	.50	.504
QAE	68	0	1	.43	.498
INC	68	0	195	14.75	34.953
REL	68	0	1	.15	.357
FRE	68	0	1	.59	.496
DIS	68	1	11	5.28	2.436
IMP	68	1	217	17.04	35.514
EXP	68	1	164	10.98	24.181
BOT	68	-84	10	-6.30	15.385
Valid N (listwise)	68				

Sumber: *Output SPSS Ver. 17.0*

Berdasarkan nilai mean atau rata-rata dalam Tabel 4.1. diatas dapat diperoleh informasi bahwa Variabel INC, dengan nilai mean 14,75 walaupun relatif kecil terhadap nilai maksimal namun jika melihat data yang digunakan adalah *cross sectional* sehingga dapat dipahami hampir terjadi 1 kejadian setiap bulan di setiap negara dalam populasi, ini juga mengancam keamanan. Namun perbedaan nilai yang tinggi menunjukkan bahwa kejadian *political violence* terkonsentrasi. DIS memiliki mean 5,28 *kilo nautical miles* atau hampir separuh dari nilai maksimal yang dapat diartikan negara target tersebar di Eropa dan Asia Timur. Sedangkan dalam Variabel IMP dan EXP memiliki jarak yang jauh dengan nilai maksimalnya memberikan informasi bahwa impor dan ekspor AS hanya terkonsentrasi di beberapa negara target. Sedangkan BOT menginformasikan bahwa secara umum negara dalam populasi berkontribusi pada defisit perdagangan AS sebesar \$ 6 Miliar.

4.2. Prediksi Model

Langkah pertama yang dilakukan adalah menilai *overall fit model* terhadap data, beberapa hasil pengujian statistik yang dapat digunakan untuk menerima atau menolak H_0 , dimana H_0 dalam tahapan ini adalah model yang diprediksikan layak (*fit*) dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood*. *Likelihood* dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji H_0

likelihood ditransformasikan menjadi *-2log likelihood*, model hanya memasukkan konstanta saja yang dari tabel 4.2. diketahui nilainya 94.268% dan H_0 dapat diterima jika nilai *-2log likelihood* lebih besar dari Chi Square Tabel (λ^2), df_{n-1} dimana n adalah jumlah sampel = 68, df_{67} dengan $\alpha = 5\%$ nilainya 87.108%, sehingga dapat diterima sehingga model *fit* dengan data. Hasil dari *Hosmer and Lemeshow Test* pada tabel 4.3. juga menguatkan hasil pada *likelihood*, karena *Chi Square* Tabel (λ^2) pada *Hosmer and Lemeshow Test* signifikan pada 0.089 lebih besar dari 0.05 sehingga H_0 diterima.

Tabel 4.2 *Likelihood Model*

Iteration	Coefficients	
	-2 Log likelihood	Constant
Step 0 1	94.268	.000

Sumber: *Output SPSS Ver. 17.0*Tabel 4.3. *Hosmer and Lemeshow Test*

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	13,749	8	.089

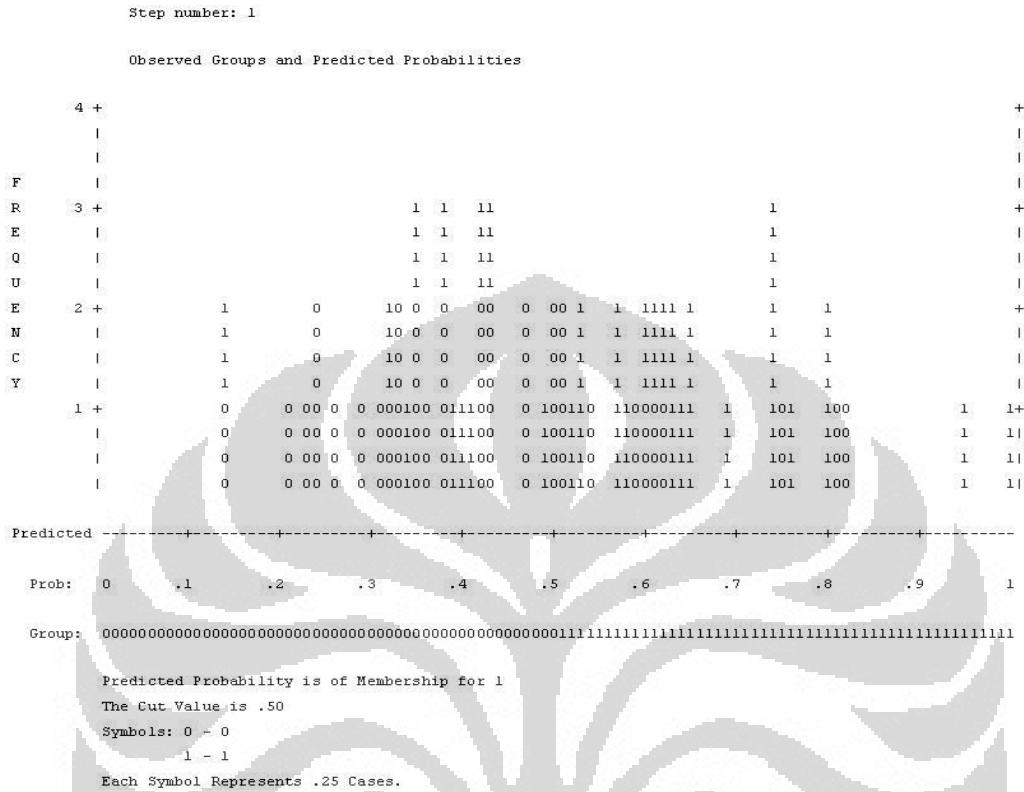
Sumber: *Output SPSS Ver. 17.0*Tabel 4.4. *Uji Wald*

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	.000	.243	.000	1	1.00	1.000

Sumber: *Output SPSS Ver.17.0*

Selanjutnya menguji variabilitas variabel bebas, yaitu melihat seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam memprediksi variabel terikat dalam model. Untuk menguji variabilitas dapat menggunakan uji wald, dengan hasil pada Tabel 4.4, dimana diketahui nilai *wald* =0.000 lebih kecil dari 0.05, dengan nilai signifikan pada 1.000 atau 100%, , sehingga dapat diartikan Variabel Bebas dapat menjelaskan Variabel Terikat pada tingkat Signifikan 100% dijelaskan oleh faktor dalam model.

Gambar 4.1 Class Plot Model



Sumber: *Output SPSS Ver.17.0*

Untuk menilai ketepatan prediksi, dapat dengan melihat *class plot* pada gambar 4.1, pada sumbu x merupakan probabilitas prediksi dari 0 sampai 1 bahwa variabel terikat dikelompokkan sebagai AS memilih menggunakan CSI ke negara target “1”. Sumbu y adalah frekuensi jumlah kasus yang dikelompokkan. Di dalam plot adalah kolom observasi dimana AS memilih menggunakan CSI ke negara target dengan kode “1” dan AS tidak memilih menggunakan CSI ke negara target dengan kode “0” keduanya dengan 0.25 kasus per symbol. Pengamatan terhadap plot menunjukkan model mampu mengelompokkan kasus yang sulit yaitu kasus yang mendekati $p = 0.5$. Selanjutnya menentukan koefisien dalam model, berdasarkan hasil pengolahan statistik SPSS dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5. Koefisien dalam Model

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	QAE(1)	.385	.719	.287	1	.592	1.469
	INC	-.005	.008	.380	1	.538	.995
	REL(1)	.529	.928	.325	1	.569	1.697
	FRE(1)	.543	.585	.861	1	.353	1.721
	DIS	.142	.137	1.072	1	.301	1.153
	IMP	.908	.442	4.224	1	.040	2.480
	EXP	-.887	.441	4.040	1	.044	.412
	BOT	.882	.434	4.131	1	.042	2.416
	Constant	-1.716	1.443	1.413	1	.235	.180

a. Variable(s) entered on step 1: QAE, INC, REL, FRE, DIS, IMP, EXP, BOT.

Sumber: *Output SPSS Ver. 17.0*

Model *Cumulative Logit/ Ordinary Logistic* Penelitian:

$$\ln \frac{CSI}{1 - CSI} = 0.908IMP - 0.887EXP + 0.882BOT \quad (4.1)$$

atau

$$CSI = \frac{1}{1 + e^{0.908IMP - 0.887EXP + 0.882BOT}} \quad (4.2)$$

4.3. Interpretasi

Dari model yang diperoleh sebagaimana dinyatakan pada koefisien pada Tabel 4.4., maka selanjutnya dapat dilakukan interpretasi sehingga diketahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pertama, variabel bebas QAE memiliki koefisien 39% dan berkorelasi positif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan menaikkan sebesar 39% jika terdapat peningkatan indikasi keberadaan jaringan Al Qaeda di negara target namun demikian signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT hanya

41%, yang berarti ancaman ada dan tinggi namun variabel ini tidak menjadi bahan pertimbangan pemilihan kebijakan tersebut.

Kedua, variabel bebas INC memiliki koefisien 0,5% dan berkolerasi negatif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan menurun sebesar 0,5% jika terdapat kenaikan tingkat *political violence* di negara target, demikian pula signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT hanya 46%, yang berarti ancaman ada dan tinggi namun variabel ini tidak menjadi bahan pertimbangan pemilihan kebijakan tersebut.

Ketiga, variabel bebas REL memiliki koefisien 53% dan berkolerasi positif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan naik sebesar 53% jika terdapat fakta bahwa negara target mayoritas muslim, namun demikian signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT hanya 43%, yang berarti ancaman ada dan tinggi namun variabel ini tidak menjadi bahan pertimbangan pemilihan kebijakan tersebut, sehingga variabel REL memiliki interpretasi yang relatif sama dengan variabel QAE.

Keempat, variabel bebas FRE memiliki koefisien 54% dan berkolerasi positif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan naik sebesar 54% jika negara target adalah anggota NATO atau negara partner NATO namun demikian signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT hanya 65%, yang berarti ancaman ada dan tinggi namun variabel ini tidak menjadi bahan pertimbangan pemilihan kebijakan tersebut.

Kelima, variabel bebas DIS memiliki koefisien 14% dan berkolerasi positif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan meningkat sebesar 14% jika terdapat penambahan jarak rute pelayaran perdagangan negara target dengan *L.A./N.Y. port* AS namun demikian signifikansi variabel tersebut untuk

menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT sebenar relatif tinggi yaitu hampir 70%, yang berarti ancaman ada dan tinggi namun variabel ini tidak menjadi bahan pertimbangan pemilihan kebijakan tersebut.

Keenam, variabel bebas IMP memiliki koefisien 91% dan berkolerasi positif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan meningkat sebesar 91% jika nilai impor AS dari negara target naik. Selanjutnya signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT sangat tinggi yaitu hampir 96%, yang berarti ancaman ada dan sangat tinggi dan variabel ini menjadi salah satu bahan pertimbangan penting pemilihan kebijakan tersebut.

Ketujuh, variabel bebas EXP memiliki koefisien 89% dan berkolerasi negatif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan menurun sebesar 89% jika nilai ekspor AS ke negara target naik. Selanjutnya signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT sangat tinggi yaitu hampir 96%, yang berarti ancaman ada dan sangat tinggi dan variabel ini menjadi salah satu bahan pertimbangan penting pemilihan kebijakan tersebut.

Kedelapan, variabel bebas BOT memiliki koefisien 88% dan berkolerasi positif dengan variabel terikat, dapat diartikan bahwa *log of odds* AS memilih menggunakan CSI kepada negara target akan meningkat sebesar 88% jika nilai defisit pada BOT AS dengan negara target naik. Selanjutnya signifikansi variabel tersebut untuk menjelaskan mengapa AS memilih/tidak memilih menggunakan CSI sebagai instrumen GWoT sangat tinggi yaitu hampir 96%, yang berarti ancaman ada dan sangat tinggi dan variabel ini menjadi salah satu bahan pertimbangan penting pemilihan kebijakan tersebut sebagaimana variabel IMP dan EXP.

Berdasarkan interpretasi terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa:

1. Variabel *Security Threat* yaitu variabel QAE, INC, REL, FRE, DIS tidak signifikan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan CSI dipilih/tidak sebagai instrumen kebijakan. Selain itu juga adanya pola pergerakan yang berlawanan dengan persepsi ancaman AS kepada kelima variabel tersebut. Selanjutnya hal ini harus dianalisa lebih lanjut untuk memahami fenomena tersebut karena berlawanan dengan *mainframe*.
2. Variabel *Economic Threat* yaitu variabel IMP, EXP, BOT menjadi faktor yang sangat signifikan dalam pertimbangan AS membuat kebijakan CSI tersebut dipilih sebagai instrumen kebijakan GWoT. Walaupun demikian analisa mendalam tetap diperlukan untuk mendapatkan pendapat pembanding pada penelitian atau literatur akademis serta teori yang relevan sehingga dapat memperkuat hipotesis yang diajukan.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa secara statistik bahwa terdapat persepsi adanya *threat* yang tinggi baik itu *security threat* maupun *economic threat*. Dimana kedua jenis ancaman tersebut diyakini oleh para pengambil keputusan di AS sebagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup negaranya. Sehingga hal ini memperkuat pandangan *Clausewitzian*, jika CSI sebagai *economic statecraft* adalah kelanjutan dari tujuan politik AS dalam mempertahankan pengaruhnya dengan cara lain. Dan terdapat suatu kecenderungan yang semakin tinggi adanya *threat against US* baik itu isu keamanan maupun ekonomi, AS akan semakin bersemangat dengan berbagai instrumen yang dimilikinya untuk menghapus ancaman tersebut dengan memastikan bahwa target adalah tidak lagi berbahaya.

4.4. Analisa Container Security Initiative (CSI) Sebagai Economic Statecraft

Dalam penelitian tersebut didapatkan fakta Belum lagi kondisi *non-reciprocal* dalam pemberlakuan CSI oleh AS, sampai dengan berakhirnya penelitian ini AS hanya memperbolehkan Jepang dan Kanada. Padahal Cina yang memiliki variabel statistik yang sama dalam penelitian ini tidak memperolehnya, sehingga benar bahwa CSI adalah *positive sanction* namun, pada kasus Cina dapat diduga, terjadi *trade barrier* dari AS karena

penyumbang defisit neraca perdagangan AS terbesar. Bukti semakin menguatkan temuan dalam penelitian sebelumnya.

Sehingga penelitian ini sejalan dengan laporan Uni Eropa yang menyatakan bahwa CSI telah meningkatkan biaya yang memungkinkan adanya *involuntary trade barrier* berupa biaya ekonomi tambahan dan keterlambatan pengiriman barang yang kemudian menurunkan efisiensi produksi negara. Dapat diduga CSI telah menciptakan *non tariff trade barrier* karena *tariff trade barrier* era perdagangan bebas akan berakhir dan akan digantikan dengan *trade barrier* baru semacam CSI ini. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Shakurova dan Velea (2011) yang menguji hubungan antara *trade flows* dengan *security measures* menyimpulkan bahwa CSI memang menyebabkan peningkatan biaya yang signifikan bagi negara dengan *weak power* namun tidak signifikan bagi negara yang *strong power*.

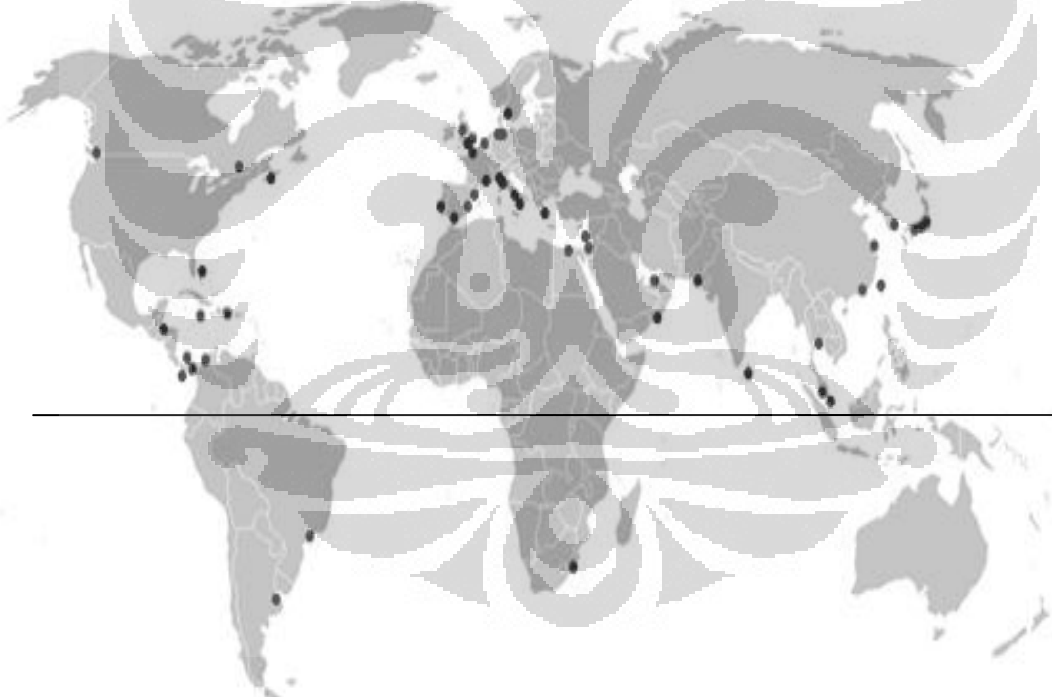
Hanya negara yang memiliki kemampuan keuangan yang besar dan kapasitas negara yang kuat yang mampu *compliance* dengan CSI akan dapat meningkatkan *gain utility*-nya. Adapun negara-negara berkembang seperti Pakistan patuh terhadap CSI karena bantuan ekonomi dari AS yang luar biasa meningkat, sebagai partner utama AS dalam GWOt yang dikenal sebagai negara *front liner*. Karena AS beraggapan Osama bin Laden menggunakan Afghanistan sebagai *safe house* sehingga kebutuhan AS untuk menjadikan Pakistan sebagai mitra. Namun ketika Osama ditangkap mati di Pakistan menimbulkan kemarahan AS kepada Pakistan, yang diketahui berdekatan dengan *camp* pelatihan militer Pakistan.

Temuan dalam penelitian ini berbeda dengan temua Shie (2004) dalam penelitiannya tentang respon negara terhadap CSI dan PSI di kawasan asia tenggara memberikan suatu kesimpulan bahwa kecuali Singapura, sebagian besar negara-negara di kawasan tersebut merasa tidak perlu merespon dengan dua alasan yaitu permasalahan kedaulatan dan tidak adanya *trade barrier* yang signifikan ke AS. Hal sama berbeda juga didapatkan dalam penelitian Nigel Brew (2003) yang melakukan penelitian respon Australia terhadap CSI, dimana disebutkan beberapa temuannya bahwa persepsi Australia terhadap CSI tidak akan mampu mencegah terorisme, sebagaimana pendapat Uni Eropa

yang menyatakan 100% scanning tidak berarti memberikan garansi aman 100%, sedangkan temuan selanjutnya, senada dengan adanya *non tariff trade barrier*, dimana Australia menolak CSI karena hanya menguntungkan pihak AS saja. Peneliti berpendapat bahwa kondisi ini terjadi, walaupun Australia mitra dekat AS, namun kepentingan ekonomi Australia ke AS tidak besar, hal ini dapat dilihat dari kecilnya nilai ekspor Australia ke AS.

CSI sebagai *non tariff trade barrier* dapat dibenarkan berdasarkan bukti sebaran CSI port yang tidak proposional, sebagaimana tergambar pada gambar 4.2., akan didapatkan analisa bagaimana AS hanya mendahulukan kepentingan negara-negara di utara dari pada di belahan selatan yang rata-rata negara dengan kondisi ekonomi berkembang.

Gambar 4.2. Sebaran CSI Port Antara Belahan Utara-Selatan



Sumber: diolah dari http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1165872287564.shtm

Sehingga pemahaman CSI sebagai sanksi ekonomi (*negative sanction*) bagi negara berkembang dapat dipahami karena ketidakmungkinan untuk mendapatkan *relative gain* yang ditawarkan oleh CSI. *Baseline* yang awalnya diposisikan pada kondisi *positive sanction*, karena secara statistik perdagangan

negara-negara yang patuh CSI tidak mengalami gangguan bahkan beberapa diantaranya seperti Belanda memetik buahnya.

Namun untuk negara-negara yang tidak dapat patuh karena ketidakmampuan kapasitas negaranya maka baseline-nya adalah membebankan biaya keamanan itu ke pelaku bisnisnya yang secara tidak langsung akan menurunkan daya saingnya di AS. Namun jika tidak maka harus mengalihkan pangsa pasar ekspornya dari AS ke negara lain. Tetapi kondisi ini juga dirasakan oleh Cina, sehingga satu-satunya rasionalisasi yang membuat mengapa Cina patuh terhadap CSI adalah ketergantungan ekonomi Cina terhadap Ekspor yang sangat tinggi, memindahkan pasar ekspor dari AS ke pasar lain hampir mustahil dilakukan oleh Cina karena begitu besarnya pasar AS.

Evaluasi kepraktisan CSI dapat dievaluasi dari mengevaluasi 34 negara yang merespon CSI, berdasarkan kerangka kerja yang dilakukan Giumelli (2011) yang membedakan setiap negara target antara aktor rasional, ideologis dan kriminal. Kategori pertama meliputi aktor yang berpikir dan bertindak secara strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, sehingga tidak ada statement resmi dari negara-negara target yang mengungkapkan hal ini, sehingga sulit mengidentifikasi dari ke 34 negara target CSI yang masuk dari kategori tersebut.

Sebagian besar menurut peneliti masuk kategori kedua dimana aktor tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat, tetapi mereka telah membangun legitimasi mereka untuk bertentangan dengan *sender* dan menganggap lebih penting daripada biaya yang mereka pikul atas sanksi. Hal ini ditunjukkan oleh upaya banding pembatalan CSI oleh Uni Eropa dan negara lainnya, namun usaha ini terlihat tidak berhasil. Sehingga satu-satunya alasannya adalah pasar AS yang besar memaksa semua negara harus membuat pelabuhannya patuh CSI, jika tidak maka biaya yang dibebankan akan lebih tinggi lagi. Dari ke-34 negara target CSI, peneliti hanya mengidentifikasi Pakistan, yang masuk kategori ketiga melibatkan aktor yang pada dasarnya keberadaannya adalah melawan sanksi, setiap biaya yang dapat

dikenakan kepada mereka tidak akan mengubah perilaku mereka, dan kepatuhan tidak akan menjadi pilihan.

4.5. Analisa *Threat* dalam Menjelaskan Pilihan AS terhadap CSI sebagai Kebijakan Luar Negeri AS

Yang menarik adalah kebijakan keamanan (*security initiative*) yang dikeluarkan AS keseluruhannya dilaksanakan setelah serangan terorisme 9/11, yang bertujuan untuk membuat perdagangan internasional lebih aman dari kegiatan terorisme sebagaimana diajukan dalam proposal AS ke WCO salah satu organisasi internasional dan kemudian disetujui. Ada 4 (empat) *security initiative* yang dikeluarkan AS yaitu *Container Security Initiative*, *Proliferation Security Initiative*, *Customs-Trade Partnership Against Terrorism*, *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*.

Bush Doctrine dalam arahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada periode 2001 – 2009, memberikan pedoman agar semua pendekatan dilakukan dalam studi kasus CSI, terlihat AS menggeser pendekatan multilateral ke pendekatan unilateral. CSI seolah menjadi pintu penguatan pendekatan unilateralisme AS yang kemudian dilakukan AS, atas Afghanistan (2002) dan Irak (2003) yang masih dalam konteks kebijakan GWoT-nya. Meski pendekatan unilateralisme ditolak oleh sekutu-sekutu terdekatnya di Eropa, semacam Perancis dan Jerman, dan juga Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat mengabaikannya. Inggris, meskipun bergabung dengan Amerika Serikat dalam invasi ke Irak, namun kemudian mundur dengan alasan penerimaan domestic Inggris.

CSI sebagai kebijakan luar negeri AS dapat dijelaskan oleh Robert Jervis dalam *Understanding the Bush Doctrine* bahwa Amerika Serikat untuk sedang melakukan pengujian kekuatan hegemoninya dalam politik internasional yaitu yang unipolaritas. CSI sebagai *economic statecraft* dianggap sukses jika asumsi ini terpenuhi. Berdasarkan tren CSI seolah AS menetapkan diri masih sebagai hegemon. Bahkan Cina pun patuh terhadap CSI, karena sebagai *economic statecraft* atau sanksi pada umumnya hanya dapat efektif jika bersifat asymmetric.

AS dengan CSI-nya, juga membenarkan teori Goldstein (1988) yang menyatakan jika hegemoni berarti kebiasaan untuk mendikte, mendominasi, mengatur, dan merancang konstelasi dan geopolitik internasional, maka AS dalam kasus CSI dapat dikatakan power-nya sebagai hegemoni masih dapat dirasakan. Peneliti berpendapat bahwa untuk melanggengkan hegemoni itu, AS tidak hanya sedang memperkuat militernya saja tetapi instrumen yang lain.

Mengikuti alur berpikir Robert Gilpin (2002) dalam teori yang menyebutkan dalam konteks sejarah keamanan internasional, penempatan aliansi Barat terhadap Uni Soviet, memainkan peran penting dalam promosi Amerika dalam perdagangan bebas. Meskipun *Bank of England* memainkan peran sentral dalam pengelolaan standar emas, namun sistem moneter abad kesembilan belas umumnya *denationalised*. Pasca Perang Dunia II sistem tersebut didasarkan pada dolar dan tunduk pada pengaruh Amerika. Maka dalam kasus CSI pun dapat dibuat suatu analogi baru, mungkin perdagangan tetap akan dikuasai oleh China, Jepang dan Jerman namun keamanan perdagangan ada dibawah AS, sehingga jika ingin mengamankan perdagangan mereka maka setiap negara harus mengeluarkan biaya keamanannya.

Selanjutnya CSI dalam perspektif Realism maka arah tujuannya tepat karena tujuan nasional dalam kebijakan AS dipengaruhi oleh perilaku internasional, seperti ancaman terorisme global dan kekuatan ekonomi baru seperti Cina. Maka bila dijabarkan, substansi kebijakan CSI sebagai kebijakan luar negeri AS dipengaruhi faktor-faktor konteks eksternal yang meliputi: struktur sistem internasional; struktur ekonomi dunia; tujuan dan kebijakan Negara lain; hukum internasional dan opini dunia, dan faktor-faktor politik domestik, yang meliputi kondisi ekonomi AS yang sedang resesi tahun 2001 dan yang selanjutnya pengaruh persepsi dan perilaku para aktor pembuat kebijakan terhadap ancaman. Dalam pendekatan internal dikemukakan bahwa kebijakan luar negeri hanya ditentukan oleh faktor internal salah satunya kepentingan nasional, hal ini sangat nampak dari penggunaan CSI.

Jika merujuk pendapat Giumelli (2011) yang menyatakan bahwa sanksi adalah salah satu aksi yang dapat dipilih para pengambil keputusan kebijakan luar negeri terhadap lingkungan eksternalnya, maka peneliti

berpendapat pembuatan CSI sebagai instrument kebijakan luar negeri sangat cerdas karena AS dapat memperoleh *total gain* terbesar dari pelaksanaannya walaupun biaya awalnya sangat mahal.

Namun jika dipahami lebih lanjut apa sebenarnya tujuan dari CSI, kita dapat menggunakan penjelasan Art (1980) yang menjelaskan sebagai “*What a policy instrument used for*” atau “*in what ways the target(s) is(are) influenced*” sehingga Giumelli menjadikannya dua kategori yaitu *cooperative* atau *non cooperative*. Melihat pola operasionalisasi CSI yang sangat *coercive* walaupun masih lebih dekat dengan constrain maka kebutuhan *exercise of power* dari AS sangat Nampak.

Selanjutnya jelas Bereskoetter dan Williams (2007) menjelaskan bahwa *exercise of power* dalam kebijakan luar negeri, dan *power* dapat diartikan menjadi tiga dimensi, *winning the conflict, limiting alternatives and shaping normality*, maka AS sedang memainkan untuk membatasi alternative setiap aktor, patuh CSI atau tidak bisa masuk pasar AS.

Terdapat bukti adanya persepsi *threat* yang tinggi, baik itu *security threat* maupun *economic threat*, pada para pengambil keputusan kebijakan luar negeri AS. Dimana kedua jenis ancaman tersebut diyakini oleh para pengambil keputusan di AS sebagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup AS. Temuan ini memperkuat pandangan *Clausewitzian*, sehingga CSI sebagai *economic statecraft* dapat disebut sebagai kelanjutan dari tujuan politik AS untuk mempertahankan pengaruhnya (*exercise of power*). Semakin tinggi *threat against US*, baik itu isu keamanan maupun ekonomi, muncul maka para pengambil keputusan AS, akan semakin bersemangat dengan berbagai instrumen yang dimilikinya untuk menghapus ancaman tersebut dengan memastikan bahwa target adalah tidak lagi berbahaya.

4.6. Analisa Threat dalam Menjelaskan Pilihan AS terhadap CSI sebagai Strategi Penanggulangan Terorisme dalam GWoT

CSI sebagai bagian kebijakan GWoT secara efektif meningkatkan keamanan bagi seluruh pelabuhan dan pesisir di AS dari serangan terorisme.

Hal ini ditunjukkan adanya kenaikan yang signifikan terhadap pemeriksaan *container* dari yang sebelumnya hanya 2-5% per tahun meningkat hampir mencapai 100%. Jika ditinjau dari Strategi Kontra Terorisme, AS telah mampu menciptakan kondisi *deterrence* bagi kelompok terorisme dengan menutup pintu masuk ke AS bagi serangan terorisme. Ini membuktikan kebenaran saran Masci dan Jost (2001), bahwa strategi kontra terorisme akan efektif jika tidak hanya berkonsentrasi pada individu dan kelompok, namun aktor negara harus terlibat, karena kondisi anarki hanya bisa diselesaikan jika aktor negara secara bersamaan dalam konteks strategi yang sama dalam penanggulangan terorisme, baik itu dipaksa atau sukarela.

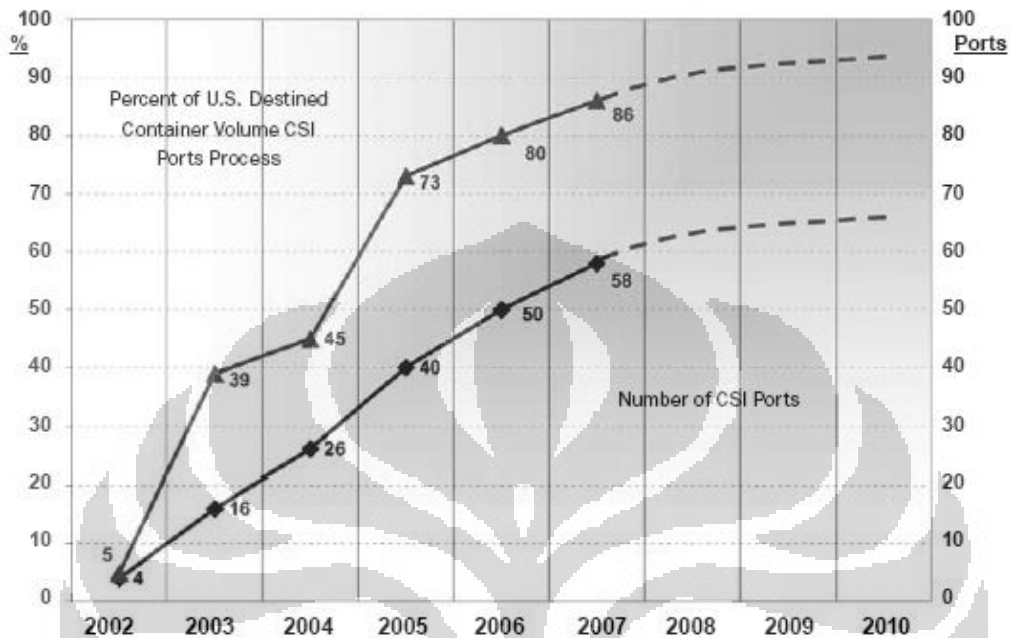
Dalam perspektif Fiala, A. (2002) menjelaskan bahwa tujuan dari *self preservation* dari segala hal yang teratribusi kepada negara, dari perspektif ini maka terorisme harus dianggap sebagai serangan terhadap *political power* yang ditunjukkan dengan menjadikan terorisme sebagai ancaman (*threat*) terhadap *life* dan disisi yang lain *a no-limits war against terrorism* dianggap sebagai usaha untuk mempertahankan *power* dan kehidupan. Maka faktor penting dari mengapa CSI muncul harus dipahami dengan pendekatan *threat*. Maka pernyataan Bush sejalan dengan pengambilan keputusan CSI, walaupun ia dibuat atas pertimbangan ekonomi namun pengambil keputusan dapat mengemasnya sebagai agenda keamanan.

Pada Gambar 4.3 menunjukkan peningkatan implementasi CSI dalam presentasi jumlah pelabuhan di tiap negara yang patuh dan *container* yang dapat diperiksa. Maka usaha semacam ini menunjukkan effort yang sangat luar biasa dari AS untuk negara harus memandang strategi kontra terorisme sebagai bagian dari pertahanan diri dan *power*.

Boaz Ganor (2005, hal. 44-46) menyebutkan bahwa pengukuran efektifitas dari sebuah strategi kontra terorisme maka harus mampu menyambungkan hasil dengan tujuan dari kontra terorisme itu sendiri. CSI dalam hal ini dapat dievaluasi dari, pertama, kemampuan CSI untuk *eliminating terrorism acts*, berdasarkan paparan dan data yang diuraikan dalam bahasan didapatkan bahwa CSI cukup memberikan batasan bagi

jejaring terorisme untuk menjadikan pelabuhan AS sebagai sasaran. Hal ini terbukti pasca 9/11 belum ada insiden di pelabuhan AS.

Gambar 4.3. Tren CSI port dan Presentase Container Diperiksa



Sumber: Container Security Initiative: 2006–2011 Strategic Plan. US CBP: 2006, pp 37.

Kedua, kemampuan CSI untuk *minimizing damage caused by terrorism*, terlihat dengan memindahkan pemeriksaan container di pelabuhan keberangkatan atau bukan di AS. Hal ini menunjukkan CSI sangat cerdas memindahkan kemungkinan pemanfaatan container jauh sebelum sampai di tujuannya di pelabuhan AS dengan pendeteksian yang lebih awal. Karena terdeteksinya container yang dimanfaatkan oleh teroris di pelabuhan AS saja sudah dapat dianggap terlambat.

Ketiga, CSI dapat berfungsi sebagai *preventing the escalation of terrorism*, secara teknis CSI memang ditujukan sebagai langkah *preventive* dalam strategi kontra terorisme AS. Sehingga CSI sebagai bagian strategi pencegahan terjadinya sasaran pada pelabuhan yang terbentang di seluruh pesisir AS dari serangan terorisme global, sebuah kerangka kerja yang menarik, walaupun biaya yang dikeluarkan sangat tinggi. Dan berdasarkan US CBP, walaupun mahal namun *net benefit*-nya masih menguntungkan.

BAB 5 KESIMPULAN

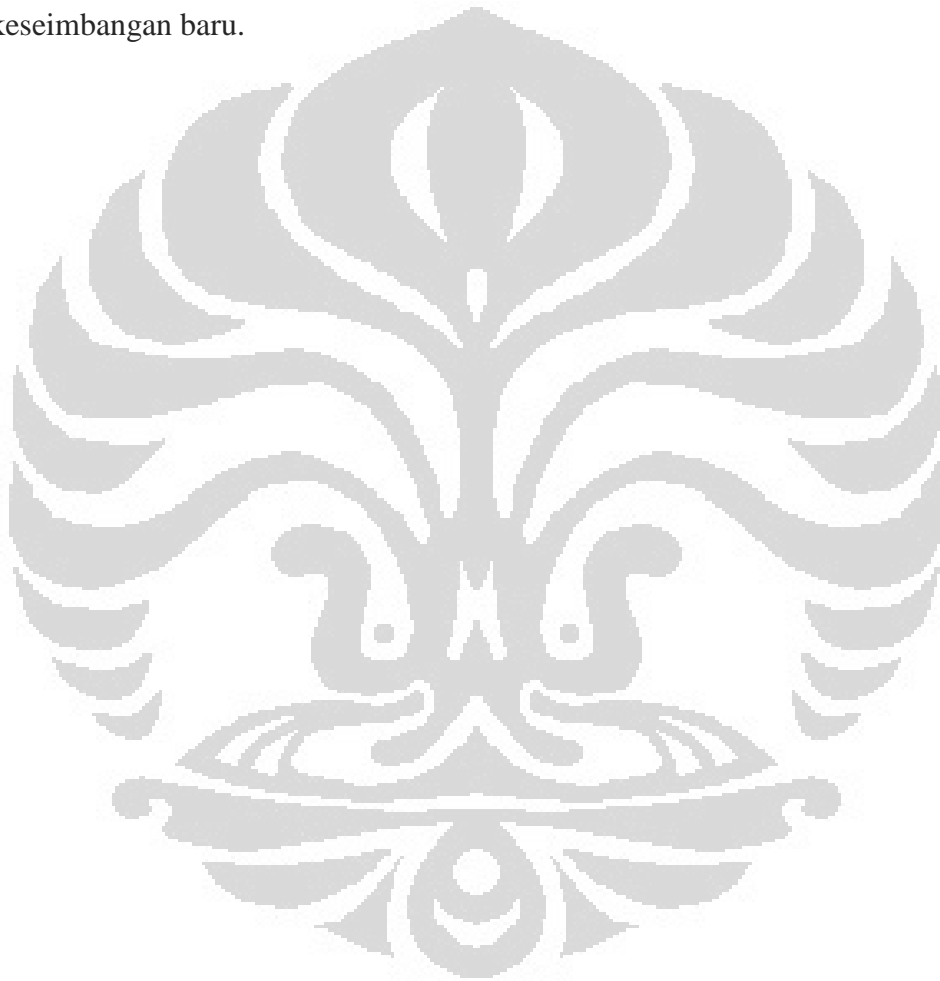
Peneliti dalam penelitian terhadap *Container Security Initiative* sebagai *Economic Statecraft* dalam kebijakan GWOt AS tersebut, dapat membuat kesimpulan bahasan yang terdiri dari beberapa poin penting sebagai berikut:

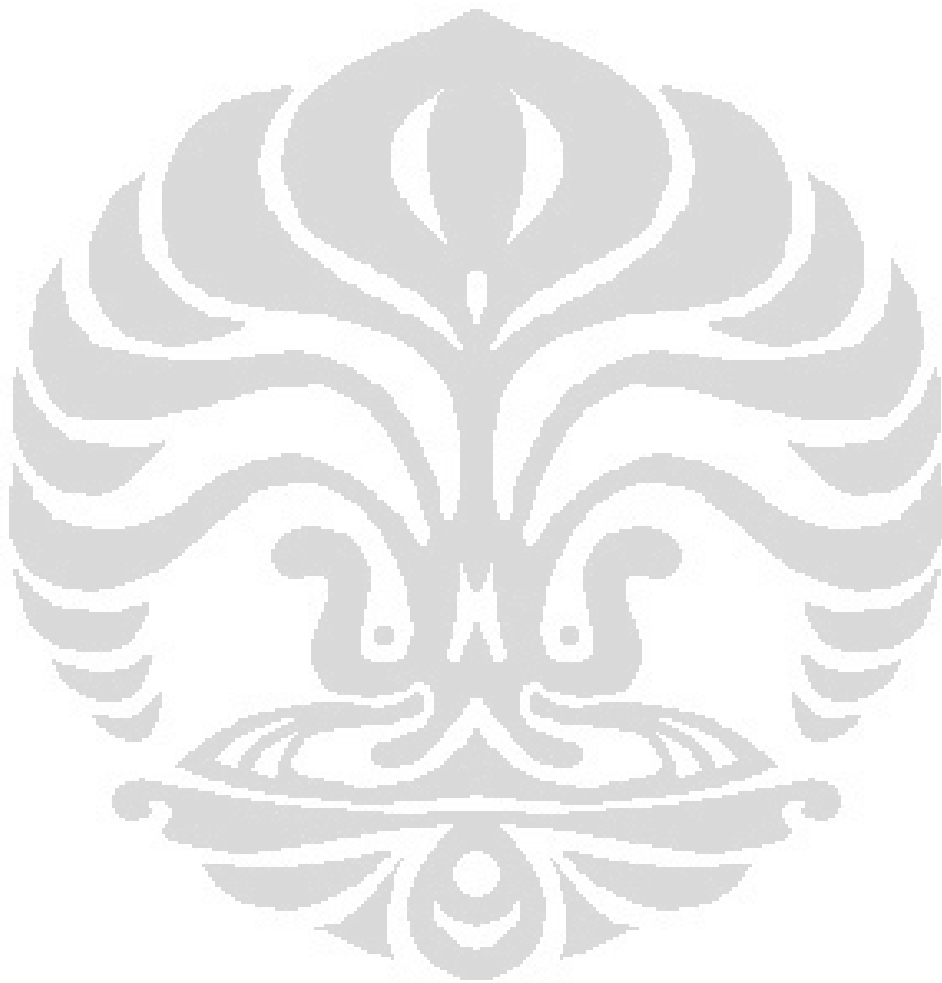
1. Terdapat bukti empiris bahwa CSI merupakan kebijakan ekonomi luar negeri AS untuk tujuan keamanan nasional AS yang secara menyakinkan bahwa CSI adalah *economic statecraft* dalam kebijakan GWOt AS. Hal ini diperoleh dalam pengolahan data secara statistik menunjukkan bahwa variabel *security threat*, tidak mampu secara signifikan memberikan penjelasan bagaimana proses pemilihan CSI sebagai instrumen kebijakan. Sedangkan variabel *economic threat* secara signifikan mampu menjelaskan bagaimana CSI dikonstruksi menjadi sebuah kebijakan dan dipilih sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS.
2. CSI sebagai *non tariff trade barrier* dapat dibenarkan berdasarkan sebaran CSI port yang tidak proposional, walaupun dampak ekonomi seperti penurunan impor AS dan defisit neraca perdagangan tidak signifikan. Biaya yang mahal untuk implementasi CSI dampaknya sangat terasa bagi negara berkembang. Belum lagi kondisi *non-reciprocal* dalam pemberlakuan CSI oleh AS, sampai dengan berakhirnya penelitian ini AS hanya memperbolehkan Jepang dan Kanada. Padahal Cina yang memiliki variabel statistik yang sama dalam penelitian ini tidak memperolehnya, sehingga benar bahwa CSI adalah *positive sanction* namun, pada kasus Cina dapat diduga, terjadi *trade barrier* dari AS karena penyumbang defisit neraca perdagangan AS terbesar. Bukti semakin menguatkan temuan dalam penelitian sebelumnya.
3. Terdapat bukti adanya persepsi *threat* yang tinggi, baik itu *security threat* maupun *economic threat*, pada para pengambil keputusan kebijakan luar negeri AS. Dimana kedua jenis ancaman tersebut diyakini oleh para pengambil keputusan di AS sebagai ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup AS. Temuan ini memperkuat pandangan *Clausewitzian*, sehingga CSI sebagai *economic statecraft* dapat disebut sebagai kelanjutan dari tujuan politik AS untuk mempertahankan pengaruhnya (*exercise of*

power). Semakin tinggi *threat against US*, baik itu isu keamanan maupun ekonomi, muncul maka para pengambil keputusan AS, akan semakin bersemangat dengan berbagai instrumen yang dimilikinya untuk menghapus ancaman tersebut dengan memastikan bahwa target adalah tidak lagi berbahaya.

4. CSI sebagai bagian kebijakan GWoT secara efektif meningkatkan keamanan bagi seluruh pelabuhan dan pesisir di AS dari serangan terorisme. Hal ini ditunjukkan adanya kenaikan yang signifikan terhadap pemeriksaan *container* dari yang sebelumnya hanya 2-5% per tahun meningkat hampir mendekati 100%. Jika ditinjau dari Strategi Kontra Terorisme, AS telah mampu mencapai posisi *deterrence* bagi kelompok terorisme dengan menutup pintu masuk ke AS bagi serangan terorisme. Ini membuktikan kebenaran saran Masci dan Jost (2001), bahwa strategi kontra terorisme akan efektif jika tidak hanya berkonsentrasi pada individu dan kelompok, namun aktor negara harus terlibat, karena kondisi anarki hanya bisa diselesaikan jika aktor negara secara bersamaan dalam konteks strategi yang sama dalam penanggulangan terorisme, baik itu dipaksa atau sukarela.
5. Didapatkan suatu kondisi dimana AS secara menyakinkan masih didominasi pandangan *realist* dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri AS, dimana dalam penelitian ini nampak AS mengutamakan *national interest*-nya menggantikan arti penting ekonomi, sehingga ekonomi dianggap sebagai *a tool of politic*. Dan kondisi ini seolah menegaskan pendapat Kaufman (1969) bahwa kelompok-kelompok dalam dinamika domestik AS memiliki perbedaan tentang tujuan dari kebijakan luar negeri AS, namun mereka sepakat tentang penggunaan *economic statecraft*.
6. *Terakhir*, Penelitian tersebut juga menemukan indikasi adanya arah yang akan menjadikan *Global War on Terrorism* dengan seluruh kebijakan turunannya dalam jangka panjang akan mengubah asumsi-asumsinya tentang rasionalitas aktor terkait polaritas dan membenarkan pendapat kemampuan pandangan realisme untuk *endurance* (daya tahan yang panjang) dalam kajian keamanan karena tersedianya berbagai fasilitas adaptasi termasuk instrumen ekonomi semacam CSI ini.

Walaupun penggunaan *Economic Statecraft Concept* dan *Foreign Policy Analysis* serta Teori Kontraterorisme mampu menjelaskan perilaku aktor dalam penelitian ini namun perlu ada penelitian lanjutan yang memungkinkan adanya keterkaitan antar instrumen dalam kebijakan GWOt sehingga didapatkan konstruksi utuh bagaimana suatu *grand strategy* kebijakan luar negeri AS baru, yang secara langsung sebagai pemilik *power* terbesar saat ini, akan memiliki dampak besar pada tatanan dunia, yang menurut pendapat peneliti sedang mencari keseimbangan baru.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Allison, G.(2004). *Nuclear Terrorism: The Ultimate Preventable Catastrophe* (hal. 107). New York: Times Books.
- Baldwin, D. A. (1985). *Economic Statecraft* (hal. 8-42).New Jersey: Princeton University.
- Caldwell, S.L. (2009). *Maritime Security: National Strategy and Supporting Plans Were Generally Well-Developed and are Being Implemented* (hal.1-5). DIANE Publishing.
- Dallimore (2008). *Securing the Supply Chain: Does the Container Security Initiative Comply with WTO Law?*(hal.34-41). Deutschland: Universität Münster.
- Elman, Collin.(2008).Security Studies:An Introduction. *Realism* (hal. 507). Dalam Williams, Paul (Ed.).New York: Routledge.
- Ganor, B. (2005).*The Counter-Terrorism Puzzle: A Guide For Decision Makers*(hal.44-46). Hertselyah: Transaction Publishers.
- Gilpin, R. (1981). *War and Change in International Politics* (Ch. 1- 5). London: Cambridge University Press.
- Gilpin, R.(2002). *The Rise of American Hegemony," in Two Hegemonies: Britain 1846-1914 and the United States 1941-2001* (hal. 165-182). Patrick Karl O'Brien and Armand Clesse (Ed.), Aldershot: Ashgate Publishing, Ltd., 2002.
- Ghozali, I. (2009). *Analisa Multivariate Lanjutan dengan SPSS* (hal.5-7). Semarang: Badan Penerbit Univeritas Diponegoro.
- Ghozali, I.(2001). *Analisa Multivariate dengan SPSS* (hal.5-7). Semarang: Badan Penerbit Univeritas Diponegoro.
- Giumelli, F. (2011). *Coercing, Constraining and Signalling* (hal. 29-30). ECPR Press.
- George, A.L.(1980). *Presidential Decisionmaking in Foreign Policy* (hal.114). Colorado: Westview Press.
- Gordon, P. , Moore, J.E., Richardson, H.W. dan Pan, Q. (2005). The Economic Impact of a Terrorist Attack on the Twin Ports of Los Angeles-Long Beach. Dalam Harry Ward Richardson and Peter Gordon (Ed.). *The EconomicImpacts of Terrorist Attacks*(hal.262-286). UK: Edward Elgar.

- Hufbauer, G.C., Schott, J.J., dan Elliot (2007). *Economic Sanction Reconsidered* (hal.125-148). (3rd ed.). Washington: Peterson Institute for International Economics.
- Holsti, K.J.(1992).*International Poltics : A Framework for Analysis* (6th ed.). (hal. 82,269). New Jersey: Prentice Hall Internaional.
- Hosmer, D.W. & Lemeshow, S.(1989). *Applied Logistic Regression* (hal.1-10).Canada: John Wiley and Sons Inc.
- Iseby, J.(2008). *9/11 Commission* (hal.10-12).Nova Publishers.
- Kim, S. (Ed.) (1994). *Cina and the World : Chinese Foreign Relations in the post-Cold War Era*. hal.21. Colorado: Westview Press.
- Krasner, S.(1978). *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy*. (hal. 70).Princeton University Press.
- Morgenthau, H. J.& Thompson, K.W. (1993).*Politics Among Nations* (6th ed.).New York : McGraw-Hill.
- Reams, B.D.(1985). *Congress and the courts: a legislative history, 1978-1984 : documents and materials regarding the creation, structure, and organization of federal courts and the federal judiciary*.(section (A), par 2). Volume 1. W.S. Hein.
- Rosenau, J.N. (1987). New Directions in the Study of Foreign policy. In Hermann, C.F., Kegley, C.W., Rosenau, Jr. J.N. (Ed.). *Introduction : New Directions and Recurrent Questions in the Comparative Study of Foreign Policy* (hal.1). Boston : Allen & Unwia.
- Rosenau, J.N. (1969). *Lingcake Politics : Essays on the Convergence of National an International Systems* (hal. 1-16). New York : The Free Press.
- Singh, R.(2006). The Bush Doctrine and the War on Terrorism: Global Responses, Global Consequences. Dalam Mary E. A. Buckley & Robert Singh (Ed.). *The Bush Doctrine* (hal. 11). New York: Taylor & Francis.
- Swarson.(2003). *America Unbound: the Bush Revolution in Foreign Policy*. Dalam I.H. Daalder & J.M. Lindsay (Ed.).(hal.120). Washington: Brookings Institution Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics* (hal.126). Berkeley: Addison-Wesley Publishing Company.
- Wein, L.M. (2003). *Preventing the Importation of Illicit Nuclear Materials in Shipping Containers* (hal. 24). Stanford University.

JURNAL

- Bush, G.W.(2001, September 20).*Address to a Joint Session of Congress* (hal.2.). Volume 107, Issue 1 of House document. University of Minnesota.
- Byman, D. (2006). *Allies in the War on Terrorism* (hal. 767-811). *Journal of Strategic Studies*.
- Davis, C.L. (2009). *Linkage Diplomacy: Economic and Security Bargaining in the Anglo-Japanese Alliance, 1902-23*. (hal.143-179). *International Security* 33(3).
- Fiala, Andrew(2002). Terrorism and the Philosophy of History: Liberalism, Realism, and the Supreme Emergency Exemption. *Essays in Philosophy*. Vol. 3.
- Fleck, R.K. & Kilby,C. (2010). *Changing Aid Regimes? U.S. Foreign Aid from the Cold War to the War on Terror* (hal. 185-197). *Journal of Development Economics*, 91.
- Gómez, J.M.C. (2010). *A Financial Profile of the Terrorism of Al-Qaeda and its Affiliates*. *Perspective on Terrorism*. Vol 4, No 4.
- Hill, C. & Light, M. (1986). *International Relations: A Handbook of Current Theory*. In Light, Margot dan Groom, A. J. R. (ed.). *Foreign Policy Analysis* (hal.157).London: St. Martins Pr.
- Walters,K.L. (2006). *Industry on Alert: Legal and Economic Ramifications of the Homeland Security Act on Maritime Commerce* (hal. 329). *Tulane Maritime Law Journal*, 30.
- Mirza,D. & Verdier,T.(2007). *Are Lives a Substitute for Livelihoods? Terrorism, Security, and U.S. Bilateral Imports*.CEPR Discussion Paper No. DP61773. World Bank: 2011. hal. 1-2.
- Passas, N. & Gimenez-Salinas, A. F. (2007). *The Financing of Al Qaida's Terrorism: Myths and Realities* (hal.511). *Review of Penal and Criminal Law*,2nd Semester, no.19.
- Randall L. & Schweller. (Summer, 1994). *Bandwagoning for Profit* (hal.74). *International Security*, Vol 19, No 1. The MIT Press.
- Shie, T. R. (July 2004). *The Nexus Between Counterterrorism, Counterproliferation, and Maritime Security in Southeast Asia*. *Issues & Insights* Vol. 4 - No. 4 Pacific Forum CSIS Honolulu, Hawaii.
- Waltz, K. N. (1997). *Evaluating Theories* (hal. 915–916). *American Political Science Review*. Vol. 91. No. 4.

Walt, S.M. (Spring. 1985). *Alliance Formation and the Balance of World Power* (hal.4). International Security Vol 9 No. 4. MIT Press.

Wrone,C., Howell,W. & Lewis,D.E.(2008). *Toward a Broader Understanding of Presidential Power: A Reevaluation of the Two Presidencies Thesis.*(hal.1-16) Journal of Politics 70(1).

PERANGKAT LUNAK KOMPUTER

SPSS Statistics 17.0 Release 17.0.0 (2008, August 23)

SPSS Advanced Statistics 17.0

SPSS Categories 17.0

SPSS Statistics Base 17.0 User's Guide

PUBLIKASI ELEKTRONIK

Annual Report (2005).Maritime Intelligence Group analyst. Washington, D.C.
http://www.dryadmaritime.com/team/darren-kelly/anonymous_silhouette-3/

Brew,N. (2003). *Rippples from 9/11: the US Container Security Initiative and its Implications for Australia.* Advice for the Parliement.
www.aph.gov.au/library/pubs/CIB/2002-2003/03cib27.pdf

Container Security Initiative: 2006–2011 Strategic Plan. (pp ii).(2006). U.S. Customs and Border Protection Office of Policy and Planning and Office of International Affairs Container Security Division. 30 Maret 2012.
<http://epic.org/privacy/surveillance/spotlight/1006/csiplan.pdf>

DHS (2009, June 18). Container Security Initiative Port.
http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1165872287564.shtm

Epstein dan Kronstadt (2011). *Commision Research Services.* Washington.
<http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41832.pdf>

Frittelli, John F.(2004, December 30). *Port and Maritime Security: Background and Issues for Congress.* Washington, D.C.: Congressional Research Service,RL31733.
<http://www.fas.org/sgp/crs/homesecc/RL31733.pdf>

National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States (2004). *Monograph on Terrorist Financing*. Washington, DC.: Staff Report to the Commission.
http://govinfo.library.untedu/911/staff_statements

US Customs and Border Protection (2011, July 10). *CSI in Brief*.
http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/csi/csi_in_brief.xml

United Kingdom Home Office (2006). *Report of the Official Account of the Bombings in London on 7th July 2005*. London.
<http://www.homeoffice.gov.uk/documents/7-july-report?version=1>

United Nations (2009). *Tenth Report of the Analytical Support and Sanctions Implementation Monitoring Team submitted pursuant to Resolution 1822 (2008) Concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities* .(hal. 22). New York: United Nations, note 47.
<http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Terrorism%20S%202010%20125.pdf>

United Nations (2004). *First Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team appointed pursuant to resolution 1526 (2004) concerning Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities*. New York: United Nations. para.12.
<http://www.un.org/sc/committees/1267/monitoringteam.shtml>

SUMBER DATA

VARIABEL	DATASET	DIMENSI	TAHUN	SUMBER DATA
VARIABEL TERIKAT				
CSI	Port	Negara Target yang merespon CSI	2002-2009	DHS (2009, June 18). <i>Container Security Initiative Port</i> . Diakses tanggal 8 Juni 2012. http://www.dhs.gov/files/programs/gc_1165872287564.shtm
VARIABEL BEBAS: SECURITY THREAT				
QAE		Keberadaan Jaringan Al Qaeda per negara	2001	Gunaratna, Rohan (2005). <i>Inside Al Qaeda: Global Network of Terror</i> . Victoria: Griffin Press.
INC	Global Terrorism Database	Jumlah Kejadian <i>Bombing, Armed/un-armed Assault, Assassination, Infrastructu-re Attack, kidnapping, Hijacking</i> per negara	2001	National Consortium for Study of Terrorism and Response to Terrorism (START), A Center of Excellence of The U.S. Department of Homeland Security Based at the University of Maryland. Diakses pada tanggal 8 Juni 2012. http://www.start.umd.edu/datarivers/vis/GtdExplorer.swf
REL	Religion Statistics	Negara Target yang Mayoritas Penduduknya Muslim	2001	http://www.nationmaster.com/graph/rel_rel_all-religion-religions-all This website was created by Rapid Intelligence, a web technology company based in Sydney, Australia.
FRE	List of Member/Partnership	Negara target Anggota/ Partner NATO	2001	http://www.nato.int/cps/en/natolive/nato_countries.htm dan http://www.nato.int/cps/en/SID-7E4E1495-65485619/natolive/51288.htm
DIS	International Nautical Mile represent Shortest Navigable Routes (2001)	Jarak Port LA dan NY dengan Port Negara Target	n/a	U.S. National Imagery and Mapping Agency(2001). <i>Distances Between Ports</i> . Maryland: U.S. Government Printing Office.
VARIABEL BEBAS: ECONOMIC THREAT				
IMP	US Trade for All Countries Dataset	Import AS dari Negara Target	2001	U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census, Foreign Trade Division. http://www.census.gov/foreign-trade/balance/country.xls
EXP		Ekspor AS ke Negara AS	2001	
BOT		Surplus (Defisit) Neraca Perdagangan AS	2001	

DATA TERKAIT PENELITIAN

NO.	CODE	COUNTRY	CSI	QAE	INC	REL	FRE	DIS	IMP	EXP	BOT
1	1220	Canada	1	1	0	0	0	2	217	164	-53
2	2010	Mexico	0	1	4	0	1	1	132	102	-31
3	2050	Guatemala	0	0	0	0	1	3	3	2	-1
4	2110	El Salvador	0	0	0	0	1	3	2	2	-1
5	2150	Honduras	1	0	0	0	1	2	4	3	-1
6	2230	Costa Rica	0	0	0	0	1	3	3	3	-1
7	2250	Panama	1	0	0	0	1	3	1	2	2
8	2360	Bahamas	1	0	0	0	1	1	1	2	1
9	2410	Jamaica	1	0	0	0	1	2	1	2	1
10	2470	Dominican Republic	1	0	0	0	1	2	5	5	1
11	2740	Trinidad and Tobago	0	0	0	0	1	2	3	2	-2
12	3010	Colombia	1	0	124	0	1	2	6	4	-3
13	3070	Venezuela	0	0	5	0	1	2	16	6	-10
14	3310	Ecuador	0	0	0	0	1	3	3	2	-1
15	3330	Peru	0	0	2	0	1	4	2	2	-1
16	3370	Chile	0	0	2	0	1	5	4	4	-1
17	3510	Brazil	1	0	1	0	1	5	15	16	2
18	3570	Argentina	1	0	0	0	1	6	4	4	1
19	4010	Sweden	1	0	0	0	0	4	9	4	-6
20	4039	Norway	0	0	0	0	0	4	6	2	-4
21	4050	Finland	0	0	0	0	1	5	4	2	-2
22	4099	Denmark	0	0	0	0	0	4	4	2	-2
23	4120	United Kingdom	1	1	11	0	0	4	42	41	-1
24	4190	Ireland	0	0	1	0	1	3	19	8	-12
25	4210	Netherlands	1	1	0	0	0	4	10	20	10
26	4231	Belgium	1	1	0	0	0	4	11	14	4
27	4279	France	1	1	9	0	1	4	31	20	-11
28	4280	Germany	1	1	4	0	0	4	60	30	-30
29	4330	Austria	0	0	0	0	0	5	4	3	-2
30	4351	Czech Republic	0	1	1	0	0	4	2	1	-1
31	4370	Hungary	0	0	0	0	0	5	3	1	-3
32	4419	Switzerland	0	0	2	0	0	4	10	10	1
33	4621	Russia	0	0	118	0	1	5	7	3	-4
34	4700	Spain	1	1	69	0	0	4	6	6	1
35	4710	Portugal	1	0	0	0	0	3	2	2	-1
36	4759	Italy	1	1	9	0	0	5	24	10	-14
37	4840	Greece	1	0	10	0	0	5	1	2	1
38	4890	Turkey	0	1	13	1	0	5	4	4	1
39	5050	Iraq	0	1	0	1	0	9	6	1	-6
40	5081	Israel	1	0	58	0	0	6	12	8	-5
41	5130	Kuwait	0	1	1	1	0	9	2	1	-2
42	5170	Saudi Arabia	0	1	1	0	1	6	14	6	-8

NO.	CODE	COUNTRY	CSI	QAE	INC	REL	FRE	DIS	IMP	EXP	BOT
43	5200	United Arab Emirates	1	1	0	1	0	9	2	3	2
44	5230	Oman	1	0	0	1	1	10	1	1	-1
45	5330	India	0	1	195	0	1	10	10	4	-6
46	5350	Pakistan	1	1	30	1	0	11	3	1	-2
47	5380	Bangladesh	0	1	11	1	1	10	3	1	-3
48	5420	Sri Lanka	1	0	32	0	1	10	2	1	-2
49	5490	Thailand	1	1	10	0	1	8	15	6	-9
50	5570	Malaysia	1	1	1	0	1	8	23	10	-13
51	5590	Singapore	1	1	0	0	1	8	15	18	3
52	5600	Indonesia	0	1	85	1	1	8	11	3	-8
53	5650	Philippines	0	1	43	0	1	7	12	8	-4
54	5660	Macau	0	0	0	0	1	7	2	1	-2
55	5700	China	1	1	13	0	1	6	103	20	-84
56	5800	Korea, South	1	0	0	0	0	6	36	23	-14
57	5820	Hong Kong	1	0	0	0	1	7	10	15	5
58	5830	Taiwan	1	0	2	0	1	7	34	19	-16
59	5880	Japan	1	0	2	0	0	6	127	58	-70
60	6021	Australia	0	1	2	0	0	8	7	11	5
61	6141	New Zealand	0	1	1	0	0	6	3	3	-1
62	7210	Algeria	0	1	89	1	0	4	3	2	-2
63	7290	Egypt	1	1	0	1	0	5	1	4	3
64	7530	Nigeria	0	0	3	0	1	5	9	1	-8
65	7550	Gabon	0	0	0	0	1	6	2	1	-2
66	7620	Angola	0	0	35	0	1	6	4	1	-3
67	7910	South Africa	1	1	0	0	1	7	5	3	-2
VARIABEL			KETERANGAN								
CSI			Dummy (1=Target, 0=Not Target)								
QAE			Dummy (1=Exist, 0=Not Exist)								
INC			Scale								
REL			Dummy (1=Moslem Majority, 0=Not)								
FRE			Dummy (1=NATO Member/Partner, 0=Not)								
DIS			Kilo Nautical Mile								
IMP			Dalam Miliar US \$								
EXP											
BOT											

OUTPUT DESCRIPTIVE STATISTICS

Notes

Output Created	06-Jul-2012 08:17:23	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	68
Missing Value Handling	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	All non-missing data are used.
Syntax	DESCRIPTIVES VARIABLES=CSI QAE INC REL FRE DIS IMP EXP BOT /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.	
Resources	Processor Time	0:00:00.000
	Elapsed Time	0:00:00.015

[DataSet1]

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSI	68	0	1	.50	.504
QAE	68	0	1	.43	.498
INC	68	0	195	14.75	34.953
REL	68	0	1	.15	.357
FRE	68	0	1	.59	.496
DIS	68	1	11	5.28	2.436
IMP	68	1	217	17.04	35.514
EXP	68	1	164	10.98	24.181
BOT	68	-84	10	-6.30	15.385
Valid N (listwise)	68				

OUTPUT LOGISTIC REGRESSION

Logistic Regression

Notes

Output Created	06-Jul-2012 09:14:23	
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	68
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing
Syntax	<pre>LOGISTIC REGRESSION VARIABLES CSI /METHOD=ENTER QAE INC REL FRE DIS IMP EXP BOT /CONTRAST (FRE)=Indicator /CONTRAST (REL)=Indicator /CONTRAST (QAE)=Indicator /CLASSPLOT /CASEWISE /PRINT=GOODFIT CORR ITER(1) /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5).</pre>	
Resources	Processor Time	0:00:00.047
	Elapsed Time	0:00:00.063

[DataSet1]

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	68	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	68	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		68	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
0	0
1	1

Lanjutan

Categorical Variables Codings

		Frequency	Parameter coding
			(1)
FRE	0	28	1.000
	1	40	.000
REL	0	58	1.000
	1	10	.000
QAE	0	39	1.000
	1	29	.000

Block 0: Beginning Block

Iteration History^{a,b,c}

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	94.268	.000

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 94.268

c. Estimation terminated at iteration number 1 because parameter estimates changed by less than .001.

Classification Table^{a,b}

	Observed	Predicted		
		CSI		Percentage Correct
		0	1	
Step 0	CSI	0	34	.0
		1	34	100.0
	Overall Percentage			50.0

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	.000	.243	.000	1	1.000	1.000

Variables not in the Equation

	Score	Df	Sig.
Step 0 Variables QAE(1)	.541	1	.462
INC	.663	1	.415
REL(1)	.469	1	.493
FRE(1)	.971	1	.324
DIS	.003	1	.960
IMP	3.188	1	.074
EXP	2.873	1	.090
BOT	1.898	1	.168
Overall Statistics	9.118	8	.332

Block 1: Method = Enter

Iteration History^{a,b,c,d}

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients								
		Constant	QAE(1)	INC	REL(1)	FRE(1)	DIS	IMP	EXP	BOT
Step 1 1	84.440	-1.332	.197	-.004	.540	.435	.110	.780	-.770	.758
2	83.890	-1.658	.342	-.005	.549	.525	.138	.891	-.873	.866
3	83.861	-1.714	.383	-.005	.530	.543	.142	.908	-.886	.882
4	83.861	-1.716	.385	-.005	.529	.543	.142	.908	-.887	.882
5	83.861	-1.716	.385	-.005	.529	.543	.142	.908	-.887	.882

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 94.268

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

	Chi-square	Df	Sig.
Step 1 Step	10.407	8	.238
Block	10.407	8	.238
Model	10.407	8	.238

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	83.861 ^a	.142	.189

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	13.749	8	.089

Lanjutan

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		CSI = 0		CSI = 1		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	6	5.570	1	1.430	7
	2	5	4.783	2	2.217	7
	3	5	4.478	2	2.522	7
	4	4	4.722	4	3.278	8
	5	5	3.676	2	3.324	7
	6	2	3.271	5	3.729	7
	7	4	2.819	3	4.181	7
	8	0	2.519	7	4.481	7
	9	1	1.713	6	5.287	7
	10	2	.449	2	3.551	4

Classification Table^a

	Observed	Predicted		
		CSI		Percentage Correct
		0	1	
Step 1	CSI 0	24	10	70.6
	1	11	23	67.6
	Overall Percentage			69.1

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

Step 1 ^a		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
	QAE(1)	.385	.719	.287	1	.592	1.469
	INC	-.005	.008	.380	1	.538	.995
	REL(1)	.529	.928	.325	1	.569	1.697
	FRE(1)	.543	.585	.861	1	.353	1.721
	DIS	.142	.137	1.072	1	.301	1.153
	IMP	.908	.442	4.224	1	.040	2.480
	EXP	-.887	.441	4.040	1	.044	.412
	BOT	.882	.434	4.131	1	.042	2.416
	Constant	-1.716	1.443	1.413	1	.235	.180

a. Variable(s) entered on step 1: QAE, INC, REL, FRE, DIS, IMP, EXP, BOT.

Correlation Matrix

		Constant	QAE (1)	INC	REL (1)	FRE (1)	DIS	IMP	EXP	BOT
Step 1	Constant	1.000	-.383	-.037	-.633	-.432	-.809	-.131	.119	-.132
	QAE (1)	-.383	1.000	.142	-.290	.261	.325	.353	-.335	.350
	INC	-.037	.142	1.000	-.062	.116	-.153	-.020	.025	-.019
	REL (1)	-.633	-.290	-.062	1.000	.183	.320	-.099	.091	-.095
	FRE (1)	-.432	.261	.116	.183	1.000	.158	.088	-.088	.081
	DIS	-.809	.325	-.153	.320	.158	1.000	.200	-.188	.206
	IMP	-.131	.353	-.020	-.099	.088	.200	1.000	-.999	.998
	EXP	.119	-.335	.025	.091	-.088	-.188	-.999	1.000	-.996
	BOT	-.132	.350	-.019	-.095	.081	.206	.998	-.996	1.000

Casewise List

Case	Selected Status ^a	Observed	Predicted	Predicted Group	Temporary Variable	
		CSI			Resid	ZResid
1	S	1	.990	1	.010	.100
2	S	0**	.743	1	-.743	-1.699
3	S	0	.424	0	-.424	-.858
4	S	0	.229	0	-.229	-.545
5	S	1**	.395	0	.605	1.238
6	S	0	.233	0	-.233	-.551
7	S	1	.628	1	-.372	.770
8	S	1**	.345	0	.655	1.379
9	S	1**	.377	0	.623	1.285
10	S	1	.616	1	.384	.789
11	S	0	.209	0	-.209	-.514
12	S	1**	.133	0	.867	2.556
13	S	0	.463	0	-.463	-.928
14	S	0	.424	0	-.424	-.858
15	S	0	.253	0	-.253	-.582
16	S	0	.290	0	-.290	-.638
17	S	1	.752	1	.248	.575
18	S	1	.735	1	.265	.601
19	S	1**	.412	0	.588	1.194
20	S	0**	.612	1	-.612	-1.257
21	S	0**	.501	1	-.501	-1.002
22	S	0**	.600	1	-.600	-1.224
23	S	1	.687	1	.313	.674
24	S	0	.310	0	-.310	-.670
25	S	1	.524	1	.476	.953
26	S	1	.737	1	.263	.597
27	S	1	.515	1	.485	.970
28	S	1	.793	1	.207	.510
29	S	0	.416	0	-.416	-.844
30	S	0	.492	0	-.492	-.984

Lanjutan

31	S	0	.412	0	-.412	-.837
32	S	0**	.802	1	-.802	-2.012
33	S	0	.376	0	-.376	-.776
34	S	1	.644	1	.356	.743
35	S	1**	.338	0	.662	1.399
36	S	1	.647	1	.353	.738
37	S	1	.603	1	.397	.811
38	S	0**	.609	1	-.609	-1.247
39	S	0	.349	0	-.349	-.732
40	S	1**	.426	0	.574	1.161
41	S	0	.324	0	-.324	-.693
42	S	0**	.500	1	-.500	-1.000
43	S	1	.736	1	.264	.599
44	S	1**	.316	0	.684	1.471
45	S	0	.380	0	-.380	-.782
46	S	1	.578	1	.422	.855
47	S	0	.239	0	-.239	-.560
48	S	1**	.407	0	.593	1.207
49	S	1	.566	1	.434	.875
50	S	0**	.584	1	-.584	-1.184
51	S	1	.623	1	.377	.778
52	S	1	.565	1	.435	.877
53	S	0	.326	0	-.326	-.695
54	S	0	.468	0	-.468	-.938
55	S	0	.345	0	-.345	-.725
56	S	1	.791	1	.209	.513
57	S	1	.635	1	.365	.759
58	S	1	.595	1	.405	.824
59	S	1	.527	1	.473	.948
60	S	1	.941	1	.059	.250
61	S	0**	.817	1	-.817	-2.115
62	S	0	.351	0	-.351	-.736
63	S	0	.135	0	-.135	-.395
64	S	1**	.388	0	.612	1.255
65	S	0**	.531	1	-.531	-1.064
66	S	0	.313	0	-.313	-.676
67	S	0	.494	0	-.494	-.988
68	S	1**	.481	0	.519	1.038

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases.

